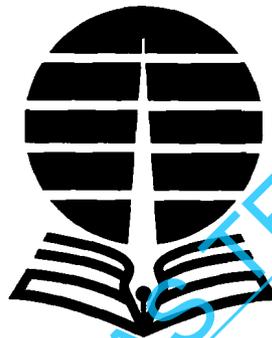


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Kasus Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HERMAWAN

NIM: 017106028

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul evaluasi keberhasilan program pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang (studi kasus program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil menengah) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Batam, September 2013

Yang Menyatakan,



(HERMAWAN.SE)

NIM. 017106028

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul evaluasi keberhasilan program pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang (studi kasus program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil menengah) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Batam, September 2013

Yang Menyatakan,

(HERMAWAN.SE)

NIM. 017106028

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada data primer, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan menggunakan *multistage sampling*, dengan jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 100 (seratus) pengusaha UMKM dimana penarikan sampel akan dilakukan secara proporsional terhadap UMKM yang sudah atau belum pernah mendapatkan program bantuan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu analisis deskriptif, *importance-performance analysis* dan analisis Wilcoxon. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses penerimaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dari hasil *importance-performance analysis* yaitu efektivitas tenaga pendamping, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, efektifitas proses pendampingan, dan perguliran bantuan ke pihak lainnya sedangkan faktor yang sudah sangat memuaskan pelaksanaannya yaitu birokrasi pemerintah. Hasil evaluasi dampak pemberian program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dengan menggunakan *uji wilcoxon* secara signifikan program tersebut berpengaruh terhadap rata-rata omzet per bulan, rata-rata keuntungan per bulan, rata-rata modal usaha dan rata-rata jumlah tenaga kerja. Kenaikan omzet per bulan setelah adanya program tersebut sebesar 15,61 %, kenaikan keuntungan per bulan sebesar 59,47%, kenaikan jumlah modal usaha sebesar 68,82% dan kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 13,56% sedangkan hasil evaluasi strategis, bentuk bantuan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu berupa bantuan permodalan, bantuan per modalan dengan tingkat suku bunga rendah dan angsuran ringan, bantuan tempat usaha yang memadai, bantuan permodalan yang berkelanjutan dan bergulir, bantuan pelatihan, serta bantuan promosi usaha. Hal ini menunjukkan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah sudah sangat tepat untuk digulirkan karena kegiatan-kegiatan dalam program tersebut sudah sesuai dengan bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaannya, bentuk bantuan yang diperoleh para pelaku UMKM sebagian besar hanya berupa permodalan dan sebagian dalam bentuk penerimaan gerobak (sarana pendukung usaha), sedangkan untuk sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan partisipasi sekolah lapangan belum bisa dinikmati oleh sebagian besar pelaku UMKM di kota Tanjungpinang, kedepannya kegiatan-kegiatan yang belum bisa dinikmati oleh sebagian pelaku seperti sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan partisipasi sekolah lapangan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi kuotanya agar sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang bisa memperoleh bantuan tersebut dan juga dari sisi penyediaan sarana pendukung usaha selain dalam bentuk bantuan gerobak juga bisa ditambah dengan penyediaan tempat usaha yang memadai.

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the implementation of business supporting system development program for micro small and medium sized enterprises (MSMEs) undertaken by the city Government of Tanjungpinang . In terms research methodology, this study are qualitative and quantitative approach. As for the primary data , sample selection method used is a multistage probability sampling technique the number of samples taker are as many as 100 (one hundred) small madium and micro entrepreneurs where sampling ins done in proportion small madium and micro entrepreneurs, that have ot have not received assistance programs.

The analysis used in this study is descriptive in nature analysis, importance-performance analysis and Wilcoxon analysis .Based on the evaluation of the process of receiving assistance program business support systems for micro- small and medium businesses that need the attention of the government Tanjungpinang of importance-performance analysis results of the effectiveness of the assistants , the process of reporting , monitoring and evaluation , the effectiveness of mentoring , and support to roll whereas the other factors that have been very satisfactory implementation of the government bureaucracy . Results of evaluation of the impact aid program providing business support system for small and medium micro enterprises by using the Wilcoxon test the program significantly affect the average turnover per month , the average profit per month , the average venture capital and the average number of workers . The increase in turnover per month after the program was 15.61 % , an increase in profit per month at 59.47 % , an increase in the number of venture capital amounted to 68.82 % and an increase in the number of workers was 13.56 % , while the results of the strategic evaluation , forms of assistance expected by the Small,medium and micro enterprises in the form of aid Tanjungpinang capital , aid per modalan with low interest rates and mild installment , help businesses adequate , sustainable funding assistance and rolling , training assistance , and support of business promotion . This shows the development assistance programs of business support systems for micro small and medium enterprises have been very apt to be rolled because the activities in the program are in accordance with the form of aid expected by Small,medium and micro enterprises in Tanjungpinang . In practice, the form of assistance that obtained the majority of Small,medium and micro enterprises in the form of capital and only partly in the form of acceptance cart (business support facilities) , while for socialization , coaching , training , promotion and participation in the field school participation can not be enjoyed by the majority of Small,medium and micro enterprises in Tanjungpinang city , future events which can not be enjoyed by most actors such as socialization , coaching , training , promotion and participation in the field school participation should be further enhanced quota that most Small,medium and micro enterprises in Tanjungpinang can obtain such assistance and also from the supply side means of supporting business other than in the form of aid carts can also be coupled with the provision of adequate

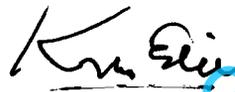
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Keberhasilan Program Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Tanjungpinang Studi Kasus Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyusun TAPM : Hermawan.SE
 NIM : 017106028
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Hari/Tanggal : Sabtu/19 Oktober 2013

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr.Karnedi MA
 NIP. 196405081999031002

Pembimbing I,



Prof.Dr.Hj.Ngadisah.MA
 NIP. 195107031979032001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Direktur Program Pascasarjana



Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
 NIP. 19710609 199802 2 001



Dr. Suciati, M.Sc
 NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : HERMAWAN.SE
 NIM : 017106028
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Evaluasi Keberhasilan Program Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Tanjungpinang Studi Kasus Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/19 Oktober 2013
 Waktu : 10.00 s.d 11.30 WIB

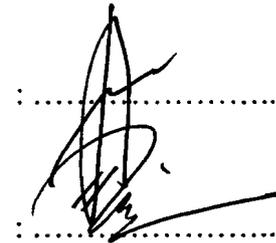
dan telah dinyatakan LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Paken Pandianganm S.Si., M.Si
 NIP. 19700820 199703 1 003



Penguji Ahli : Dr. MH.Thamrin.MSi



Pembimbing I : Prof.Dr.Hj.Ngadisah.MA
 195107031979032001



Pembimbing II : Dr.Karnedi MA
 196405081999031002



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Suciati, M.Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
- (3) Paken Pandiangan, S.Si, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Batam penyelenggara Program Pascasarjana sekaligus Ketua Komisi Penguji;
- (4) Prof.Dr.Hj.Ngadisah.MA, selaku Pembimbing I dan Dr.Karnedi.MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (5) Dr.MH.Thamin.MSi selaku Penguji Ahli;
- (6) Kedua orang tua yang kami muliakan, Ayahanda (Alm) H. Achmad Akil, BA dan (Alm) Ibunda Salmah, serta keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
- (7) Istri tercinta, Julriana yang selalu mendoakan dan setia mendampingi penulis, serta putera dan puteri tercinta, Haliza Fitri, Muhammad Raihan dan Herni Febriana.
- (8) Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih terdapat beberapa kekurangan atau keterbatasan. Ibarat kata orang alim bijak “ tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali milik Allah SWT” maka penulis mohon saran dan kritikan dari pembimbing dan penguji serta rekan-

rekan mahasiswa dan pembaca laporan ini guna memberi masukan agar Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat diperbaiki dan dapat lebih baik lagi. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Batam, 19 Oktober 2013

Hormat saya,

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teoritik	8
B. Jenis – Jenis UKM	15
C. Landasan Hukum UKM	16
D. Karakteristik UMKM	17
E. Beberapa Permasalahan UMKM	20
F. Pengembangan UMKM	26
G. Beberapa Defenisi Mengenai Evaluasi	29
H. Jenis Evaluasi	32
I. Indikator Pengukuran Evaluasi Program	39
J. Penilaian Kebutuhan	41
K. Penelitian Terdahulu	52
L. Kerangka Pikir/ Alur Penelitian	64

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	65
	A. Desain Penelitian	65
	B. Populasi Dan Sampel	67
	C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	71
	D. Analisa Data	74
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	79
	A. Temuan Lokasi Penelitian	79
	B. Deskripsi Objek Penelitian	86
	C. Pembahasan	95
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	154
	A. Kesimpulan	154
	B. Saran	157
	DAFTAR PUSTAKA	159
	LAMPIRAN	
	A. BIODATA MAHASISWA	
	B. INSTRUMEN PENELITIAN	
	1. Pedoman Wawancara	
	2. Kuesioner	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategori Perusahaan	68
Tabel 3.2	Alokasi Sampel Perusahaan	69
Tabel 4.1	PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012	84
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Bidang UMKM di Kota Tanjungpinang	94
Tabel 4.3	Jenis Usaha UMKM	97
Tabel 4.4	Pendidikan Pengusaha UMKM	98
Tabel 4.5	Tahun Berdiri UMKM	100
Tabel 4.6	Sektor Usaha	103
Tabel 4.7	Sumber Modal UMKM	104
Tabel 4.8	Nilai Rata-rata dan Nilai Maksimum Omzet Perusahaan dan Keuntungan Perusahaan Perbulan	106
Tabel 4.9	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor UMKM Menurut Jenjang Tertinggi Pendidikan yang Ditamatkan	107
Tabel 4.10	Matriks Batasan Kegiatan Informal	108
Tabel 4.11	Jumlah Pelaku UMKM Menurut Tenaga Kerja	108
Tabel 4.12	tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha dan Jenjang Pendidikan Yang di Tamatkan.....	109
Tabel 4.13	Jarak Ketempat Usaha	111
Tabel 4.14	Pengalaman UMKM Dalam Mengikuti Pelatihan	112
Tabel 4.15	Modal Awal UMKM	113
Tabel 4.16	Pernah Ada Penjelasan Dari Pemerintah Daerah Tentang Dukungan Permodalan	115
Tabel 4.17	Pernah Tidaknya Mendengar Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	116
Tabel 4.18	Pernah Mendapatkan Program Bantuan Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	117
Tabel 4.19	Jumlah UMKM Berdasarkan Alasan Tidak Mendapatkan Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	118

Tabel 4.20 Jumlah UMKM Berdasarkan Bantuan Yang Diterima Dalam Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	119
Tabel 4.21 Frekuensi Menerima Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	121
Tabel 4.22 Jumlah UMKM Berdasarkan Bentuk Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	122
Tabel 4.23 Jumlah UMKM Menurut Pemanfaatan Bantuan Modal Berupa Uang	123
Tabel 4.24 Proses Seleksi/ Persyaratan Administrasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	124
Tabel 4.25 Manfaat Seleksi Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	125
Tabel 4.26 Efektifitas Proses Pencairan Dana Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	126
Tabel 4.27 Efektifitas Proses Pendampingan Dalam Program Bantuan	127
Tabel 4.28 Efektifitas Penyaluran Dana Pengembangan Sistem Pendukung UMKM	128
Tabel 4.29 Perguliran Dana Ke Pihak Lainnya	129
Tabel 4.30 Efektifitas Tenaga Pendampingan	130
Tabel 4.31 Proses Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi	132
Tabel 4.32 Penyaluran Tepat Waktu	133
Tabel 4.33 Penyaluran Tepat Jumlah	134
Tabel 4.34 Penyaluran Tepat Sebaran	135
Tabel 4.35 Penyaluran Sesuai Mekanisme	136
Tabel 4.36 Birokrasi Pemerintah	136
Tabel 4.37 Evaluasi Proses Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM	137
Tabel 4.38 Proses Seleksi UMKM Penerima Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM Telah Dilakukan Secara Adil	138
Tabel 4.39 Prioritas Peningkatan Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM Berdasarkan Tingkat Kesesuaian	139

Tabel 4.40 Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Program	142
Tabel 4.41 Evaluasi Dampak Program Terhadap Rata-rata Omzet Perbulan, Keuntungan Perbulan, Rata-rata Jumlah Modal Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah Mendapatkan Program Bantuan	143
Tabel 4.42 Rata-rata Omzet, Keuntungan, Modal Usaha dan Tenaga Kerja Perbulan	145
Tabel 4.43 Hasil Output Uji Wilcoxon	146
Tabel 4.44 Bentuk Bantuan Yang Diharapkan Para Pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang	147
Tabel 4.45 Kepedulian Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan UMKN di Kota Tanjungpinang	150
Tabel 4.46 Kepedulian Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan UMKM ..	151
Tabel 4.47 Bentuk Kepedulian Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Penelitian	64
Gambar 4.1	Importance-Performance Analysis	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Perkembangan PDRB Kota Tanjungpinang Tahun 2008-2012 Pada Harga Berlaku Maupun Konstan	82
Grafik 4.2	Distribusi PDRB Kota Tanjungpinang Menurut Sektor Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Berlaku	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Mahasiswa
Lampiran 2	Pedoman Wawancara SKPD Terkait
Lampiran 3	Kuisisioner Pelaku Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas usaha untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang manajemen organisasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktek-praktek berusaha yang benar (*best practices*) telah menyebabkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi UMKM. Bersamaan dengan masalah tersebut, UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Pembangunan perekonomian ini bersandarkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagaimana yang disampaikan oleh Adiningsih (2008:117) dalam Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, "Krisis ekonomi 1997

telah membuat peranan UKM meningkat secara signifikan di Indonesia. Terbatasnya lapangan kerja di sektor formal dan persaingan ketat membuat UKM khususnya usaha kecil berkembang pesat, sebagai *safety nets* bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan mencari pekerjaan”.

Sejalan dengan perkembangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Otonom dan pusat Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, maka tercipta peluang – peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang. Usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang memegang peranan yang sangat penting. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2012 yaitu sebanyak 4.264 usaha. Data tersebut bersumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Namun dari jumlah tersebut yang memiliki izin usaha sebanyak 3.080 yang terdiri dari jenis usaha mikro 510 usaha kecil 2.269 usaha menengah 292 dan usaha besar 9 perusahaan data terakhir tahun 2012. Data tersebut di peroleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang. Dalam hal perbedaan data tersebut, maka didapat bahwa jenis usaha mikro banyak yang tidak memiliki izin usahanya yaitu berjumlah 1193 .

Dalam pembangunan UMKM, berdasarkan data diatas maka peranan pemerintah dan instansi terkait serta masyarakat sangat diharapkan sehingga UMKM dapat menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri dan profesional dengan semangat kerakyatan. Evaluasi program yang dilakukan oleh Pemerintah hanya menilai dari sisi anggaran saja, hal ini terlihat juga pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan dokumen monitoring dan evaluasi tiap tahunnya. Sedangkan evaluasi pelaksanaan hasil program/kegiatan

tiap tahun di SKPD terkait yang berhubungan dengan UMKM sampai saat ini belum pernah terlihat laporannya ke Unit kerja Bappeda, sehingga keberhasilan dan tingkat pencapaian yang dilakukan oleh SKPD terkait harus segera dievaluasi apakah sudah sesuai dengan harapan pelaku usaha (masyarakat umum) dan Pemerintah atau belum sesuai harapan bersama.

Pelaku UMKM dalam berbagai kesempatan, baik pembahasan di forum SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sosialisasi maupun kegiatan pelatihan, sering mengungkapkan bahwa mereka merasa diperlakukan sebagai objek ketimbang sebagai subjek. Mereka berharap, pendapat mereka juga didengar agar permasalahan dan hambatan yang mereka hadapi dapat dijawab bersama-sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan adanya pertemuan antara pelaku usaha dengan SKPD terkait, sebaiknya Pemerintah mengetahui rencana yang akan diterapkan agar program/kegiatan sesuai dengan harapan bersama. Melalui data – data pelaku UMKM yang selama ini dibina oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk bersama – sama membahas apa yang sebaiknya dilakukan menurut hasil evaluasi perkembangannya yang terkait tentang program – program yang berhubungan dengan pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang oleh SKPD terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berkeinginan besar untuk melakukan penelitian yang lebih jauh terhadap program/kegiatan di sektor UMKM di Kota Tanjungpinang, secara langsung berkaitan dengan program/kegiatan yang telah di laksanakan dalam 5 (lima) tahun yang lalu di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun dalam hal ini penulis akan meneliti hanya 1 (satu) program dari 6 (enam) program yang ada yaitu pada program

pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha UMKM merupakan program yang secara langsung dapat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan jenis usaha yang menjadi sumber pendapatan ekonomi dalam bentuk kegiatan – kegiatan baik dalam bentuk Sosialisasi, pembinaan, pelatihan, bantuan permodalan, partisipasi promosi, partisipasi sekolah lapangan serta memberikan sarana – sarana pendukung yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan.

Dalam kesempatan ini, penulis melakukan penelitian evaluasi pada salah satu program di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang dengan judul yaitu **Evaluasi Keberhasilan Program Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Tanjungpinang “Studi Kasus Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah”**.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Agar pelaksanaan pembangunan yang mengarah kepada perkembangan ekonomi kerakyatan terlaksana sesuai dengan harapan semua kalangan, maka program/kegiatan yang berkaitan dengan para pelaku UMKM sebaiknya dilakukan suatu rencana agar segala bantuan serta pembinaan yang diberikan tepat pada sasarannya. Karena selama ini program/kegiatan yang telah dijalankan belum semua berjalan sesuai dengan keinginan dari masyarakat dan anggaran yang diberikan belum optimal peruntukannya. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi mengenai hasil dari kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD terkait

berupa evaluasi lima tahun terakhir agar dapat dilihat sampai sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dijalankan melalui Program/Kegiatan 5 (lima) tahun terakhir.

Di dalam permasalahan – permasalahan yang terkait tentang kegiatan – kegiatan di sektor UMKM, peneliti akan mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik UMKM di Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana proses penerimaan bantuan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait kepada pelaku UMKM Kota Tanjungpinang?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha di Kota Tanjungpinang setelah menerima program pengembangan fasilitas usaha bagi UMKM yang dilaksanakan oleh SKPD terkait?
4. Strategi apa yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang terkait atas bantuan atau pembinaan yang diperlukan oleh para pelaku UMKM Kota Tanjungpinang berdasarkan proses dan dampak pemberian bantuan?
5. Kendala – kendala apa yang dihadapi oleh UMKM dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya SKPD terkait untuk mengembangkan usaha serta menjalankan kegiatan yang disesuaikan dengan aturan – aturan yang ada ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini antara lain :

1. Melihat karakteristik UMKM di Kota Tanjungpinang

2. Mengkaji proses penerimaan bantuan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait kepada pelaku UMKM Kota Tanjungpinang, apakah proses kebijakan sudah sesuai dengan prosedur .
3. Melihat dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha di Kota Tanjungpinang terhadap program pengembangan fasilitas usaha bagi UMKM yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
4. Mengevaluasi strategi yang perlu dilaksanakan oleh SKPD yang terkait atas bantuan atau pembinaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM Kota Tanjungpinang.
5. Mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh UMKM dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Memberikan manfaat teoretis bagi ilmu pengetahuan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya pengembangan sektor UMKM oleh SKPD terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Membicarakan masalah program kegiatan pengembangan kelompok usaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah yang disingkat UKM tidaklah mudah. Banyak istilah dan definisi yang muncul dari berbagai literatur yang ada. Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep dan definisi yang digunakan penulis sebagai dasar teoritis dalam melakukan studi ini untuk membuat kerangka pemikiran dan keperluan analisis. Konsep dan definisi menjadi amat penting untuk memahami lebih lanjut mengenai karakteristik, batasan dan sifat kegiatan tentang eksistensi suatu program pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM di Kota Tanjungpinang.

A. Kajian Teoritik

UKM merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaan perlu terus dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. UKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (asset) atau jumlah pekerjanya sesuai dengan defenisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi karakteristik UKM menurut Mintzberg, Musselman dan Hughes adalah (Situmorang, J. 2008: 15):

1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis
2. Struktur organisasinya bersifat sederhana
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan
5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memiliki
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
7. Kemampuan dasar serta diversifikasi pasar cenderung terbatas
8. Margin keuntungan sangat tipis
9. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu mempekerjakan manajer-manajer profesional. Hal itu menyebabkan kelemahan manajerial, yang meliputi kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Perlunya kita mengetahui kriteria – kriteria dari usaha UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang bisa membedakannya dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Kriteria Usaha Mikro yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. Kriteria Usaha Kecil yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C. Kriteria Usaha Menengah yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sebagaimana dijelaskan oleh Urata (2000) dan Adiningsih (2003:3) secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu permasalahan finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam finansial diantaranya adalah:

- Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM.
- Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM.
- Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil.
- Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

- Banyak IKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (*nonfinansial*) diantaranya adalah:

- Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
- Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Urata (2000) dan Adiningsih (2003:4), beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan-permasalahan diatas adalah pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai masih terjadinya *mismatch* antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UKM dengan industri yang lebih besar.

Standar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat pengukuran yang berkelanjutan, dokumentasi, penilaian dan penyesuaian. Standar memperlihatkan syarat bagi sistem manajemen kualitas dimana sebuah organisasi:

(1) perlu untuk memperlihatkan keahliannya dalam penyediaan produk dan jasa yang mampu memenuhi persyaratan pelanggan, (2) bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan lewat aplikasi efektif pada sistem, termasuk didalamnya proses untuk perbaikan yang berkelanjutan pada sistem dan kepastian kesesuaian dengan persyaratan yang diajukan pelanggan (Kuncoro, 2005:292).

Untuk menghadapi perekonomian global tersebut tidak ada cara lain bagi Indonesia kecuali melakukan upaya-upaya guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Upaya-upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi usaha-usaha besar saja, namun harus mencakup upaya peningkatan kemampuan UMKM, agar dapat terus berkembang dan mampu bersaing dalam era globalisasi tersebut. Upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut antara lain dengan meningkatkan kemampuan permodalan UMKM termasuk koperasi (Gopar, 2010:75).

Permasalahan utama adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Walaupun banyak skim kredit khusus bagi pengusaha mikro dan kecil, sebagian besar dari responden terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mereka tergantung sepenuhnya pada uang/tabungan mereka sendiri, uang/bantuan dan dari saudara/kenalan atau dari sumber-sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi mereka. Alasannya beragam; tidak pernah dengar atau menyadari adanya skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba tetapi ditolak karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai atau mengundurkan diri karena ruwetnya prosedur administrasi, atau tidak mampu memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari

awalnya memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga keuangan formal (Tambunan, 2010:2).

Penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UKM untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari penciptaan iklim ini adalah terjaminnya “*level playing field*” bagi semua pihak. Aspek ini meliputi penyempurnaan sistem perundang-undangan dan kebijakan sektoral, dan perlu mendapat dukungan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan (pelayanan satu atap) dan upaya penegakan hukum, penciptaan iklim usaha juga menuntut peningkatan kemampuan aparatur pemerintah agar mampu berperan sebagai fasilitator bagi UKM (Soetrisno, 2000:6).

Sukamdani dan Kadarisman (2007:177-178) mengemukakan enam faktor strategis yang diperlukan sebagai pendukung agar dunia usaha kita sehat dan kuat. Ke enam faktor tersebut meliputi:

1. Perlunya pemerintah menjalankan *good governance*.
2. Perlunya pemerintah memiliki visi dan misi berdasarkan prinsip pasar (yang terbuka) dan demokrasi (berkeadilan sosial).
3. Perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha yang didasarkan pada rumusan misi dan tujuan serta program yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten dan tegas selama kurun waktu tertentu sesuai dengan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program secara tuntas.
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara konsisten sebagai wirausaha
5. Tersedianya organisasi bisnis yang profesional dan didukung oleh banyak kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang handal.

6. Tersedianya media cetak dan elektronik yang proaktif dalam memberikan informasi, analisis bisnis serta kajian kecenderungan bisnis untuk masa depan baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

B. Jenis-Jenis UKM

Secara umum UKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa. Menurut Keppres No. 127 Tahun 2001, adapun bidang/ jenis usaha yang terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan adalah:

1. Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
2. Industri penyempurnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
3. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dsb.
4. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan yang terdiri dari:
 - a. Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arang, sabut.
 - b. Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
5. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.

6. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
7. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
8. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
9. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi dan Perdagangan dengan skala kecil dan informasi.

C. Landasan Hukum UKM

Adapun yang menjadi landasan hukum UKM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU No. 1 Tahun 1985.
2. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No. 9 Tahun 1995.
3. Bentuk badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.
4. Perijinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan tanda daftar industri.

5. Tata cara perijinan usaha perdagangan (SIUP) diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPP/Kep/99 tentang tata cara pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP).
6. Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

D. Karakteristik UMKM

Beberapa karakteristik utama dari pelaku UMKM yaitu

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) berbeda dengan usaha besar dan menengah, usaha mikro kecil, menengah tersebar diseluruh pelosok pedesaan, termasuk wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Karena itu kelompok usaha ini mempunyai signifikansi “lokal” yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM nya
2. Karena sangat padat karya, UMKM mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai elemen penting dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin.
3. Kegiatan produksi dari kelompok usaha ini pada umumnya berbasis pertanian, karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umumnya dipakai oleh oleh usaha

besar) terhadap proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang melimpah.

5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar tahun 1997/1998. Karena itu kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar.
6. UMKM bisa menjadi titik awal bagi mobilisasi tabungan/investasi perdesaan, sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha orang-orang perdesaan.
7. Pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar usaha operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari para pemberi kredit informal, pedagang, atau pengumpul, para pemasok bahan baku dan pembayaran dimuka dari para konsumen.
8. Salah satu keunggulan UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang relatif tinggi terhadap pesaingnya (usaha besar). Dalam Berry dkk (2001), kelompok usaha UMKM dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau pada ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/1998 yang dialami oleh beberapa Negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. (tulus Tambunan, 2012:2).

Menurut Tulus Tambunan (2012:11), apabila dilihat dari sisi pendidikan, untuk pengusaha mikro, jumlah pengusaha yang berpendidikan sekolah dasar lebih

banyak dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. sedangkan untuk usaha kecil, memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha mikro.

Menurut Tulus Tambunan (2012:5), UMKM bisa tumbuh sangat cepat dan mampu bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Pendapat Tulus Tambunan (2012) dan Berry dkk (2001) yang menyatakan bahwa usaha UMKM mampu bertahan sangat lama terhadap krisis ekonomi 1997/1998 atau pun pada saat terjadi krisis Global pada tahun 2009.

Menurut Tulus Tambunan (2012), pada umumnya pengusaha - pengusaha UMKM membiayai sebagian besar operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, para pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka para konsumen. Menurut Tulus Tambunan (2012:7), apabila dilihat dari sisi pendidikan, untuk usaha mikro, memiliki tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin dengan motivasi utama yaitu untuk survival. sedangkan untuk usaha Kecil, memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha mikro.

Dari sisi formalitas, usaha mikro sebagian besar beroperasi disektor informal, usaha tidak terdaftar dan tidak jarang bayar pajak. usaha kecil, beberapa beroperasi disektor formal, beberapa tidak terdaftar dan juga sedikit yang bayar pajak. Dari sisi kesempatan kerja, usaha mikro kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar, usaha kecil beberapa menggunakan tenaga kerja yang digaji dan usaha menengah, semuanya memakai tenaga kerja digaji dan memiliki sistem perekrutan formal.

Untuk orientasi pasar, usaha mikro umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah, usaha kecil banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas sedangkan untuk usaha menengah, semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor serta melayani kelas menengah ke atas. (Tulus Tambunan, 2012:7).

E. Beberapa permasalahan UMKM

Permodalan merupakan hambatan yang sering terjadi pada dunia usaha kecil. Ada sejumlah persoalan umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di negara berkembang termasuk juga di Kota Tanjungpinang. Hambatan tersebut diantaranya yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas dan menentu arahnya (Tulus Tambunan, 2012:51).

Menurut Arif dan Wibowo (2004) dalam Budi Lenora (2008), permasalahan yang dihadapi UKM meliputi masalah pemasaran produk, teknologi, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Sedangkan menurut Sumardjo (2001) dan Yuni (2003), permasalahan yang dihadapi oleh UKM disebabkan oleh :

1. Posisi dalam persaingan rendah karena lemahnya informasi tentang kondisi lingkungan yang menyangkut pemasok, peraturan/kebijakan pemerintah, kecenderungan perubahan pasar/teknologi baru sehingga memiliki daya saing rendah.
2. Usaha kecil sering tidak memiliki catatan mengenai usahanya secara teratur dan sistematis karena sering tercampur antara modal usaha dengan uang untuk rumah tangga, sehingga kesulitan untuk memperoleh dana dari bank.
3. Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk mengakses ke bank karena tidak adanya agunan untuk memenuhi tuntutan audit akuntansi dari bank.
4. Keluar masuk karyawan usaha kecil dengan intensitas yang tinggi yang disebabkan oleh rendahnya upah, ketidakjelasan masa depan, tidak adanya jaminan sosial dan kepastian usaha, sehingga sering ditinggalkan karyawan yang terampil.

Jafar (2004) dan Budi Lenora (2008) juga menjelaskan, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UKM secara umum meliputi permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Masalah Internal

a. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Pada umumnya UKM merupakan suatu usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit untuk dipenuhi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang

pada umumnya usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan, yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Masalah Eksternal

a. Iklim Usaha Yang Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi Otonomi Daerah

Berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (sekarang UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

c. Implikasi Perdagangan Bebas

Telah kita ketahui bahwa AFTA yang berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020, berimplikasi luas terhadap UKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu

maka diharapkan UKM, perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

e. Sifat Produk Dengan *Lifetime* Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri/karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan waktu yang pendek.

f. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun pasar internasional

Iwantono (2006) dan Budi Lenora (2008) juga mengemukakan tentang permasalahan UKM di Indonesia yang sangat bervariasi. Permasalahan tersebut meliputi :

1. Akses pasar. Pada umumnya UKM tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pasar. Mereka tidak memahami dan tidak memiliki informasi tentang pasar potensial atas barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, pelaku UKM juga tidak memahami sifat dan perilaku konsumen pembeli hasil produksinya dan juga sering gagal bertransaksi dalam kegiatan ekspor karena tidak terbiasa dengan praktek-praktek bisnis internasional.
2. Kelemahan dalam pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan UKM dalam penyediaan dukungan keuangan yang bersumber dari internal usaha. Selain itu, sumber-sumber keuangan eksternal baik yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank, masih belum sepenuhnya berpihak pada UKM.

Ketersediaan dana melalui berbagai kredit masih terbatas, prosedur perolehan yang rumit dan persyaratan yang cukup membebani seperti persyaratan administratif dan penjaminan.

3. Kelemahan dalam organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang dimiliki UKM sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan manajemen dan bisnis yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan para pelaku UKM akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya yang memiliki keterampilan manajemen modern.
4. Kelemahan dalam kapasitas dan penguasaan teknologi. Para pelaku UKM mengalami kesulitan dalam menghasilkan produk yang selalu dapat mengikuti perubahan permintaan pasar, sehingga barang-barang yang dihasilkan umumnya konvensional, kurang mengikuti perubahan model, desain baru, pengembangan produk dan bahkan mereka tidak menyadari pentingnya mempertahankan hak paten.
5. Kelemahan dalam jaringan usaha. *Networking* atau jaringan bisnis merupakan unsur baru keunggulan bersaing dan penetrasi pasar. Kualitas SDM yang masih rendah dalam penguasaan teknologi informasi, mengakibatkan UKM pada umumnya belum mampu membangun jaringan bisnis dan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi. Cara-cara pemasaran maupun pengadaan bahan baku masih terbatas pada cara-cara konvensional menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan potensi pasar melalui pengembangan jaringan usaha.

F. Pengembangan UMKM

Menurut Partomo dan Soejoedono (2004) dan Budi Lenora (2006), strategi bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan UKM adalah sebagai berikut :

1. Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi/pengertian, kelemahan-kelemahan, potensi-potensi yang tersedia serta perundang-perundangan yang mengatur tentang UKM.
2. Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi dalam mengelola UKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar.
3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UKM bisa menjadikan diri sebagai komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama diperlukan suatu strategi UKM untuk menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.
4. Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (*entry*) dalam usaha tertentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan Koperasi. Jafar (2004) dan Budi Lenora (2008) menyatakan bahwa, UKM pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka perlu diupayakan hal - hal sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas sistim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Perlu untuk dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan golongan usaha ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan tersebut dapat berupa undang - undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan

demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibentuk lembaga yang khusus bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuhkembangkan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Guna mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9. Mengembangkan Kerjasama Yang Setara

Perlu adanya kerja sama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

G. Beberapa Definisi Mengenai Evaluasi

Dalam menganalisis kebijakan, evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing – masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata – kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah – masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Dunn, (2000).

Jones (1996:25) mengemukakan bahwa : “*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya).

Anderson (1984:7) mengatakan bahwa : “*policy evaluation, as a functional activity, is as old as policy itself. Policy – makers and administrator have always made judgments concerning the worth or effects of particular policies, programs, and projects*” (evaluasi kebijakan, sebagai suatu kegiatan fungsional, adalah suatu kebijakan itu sendiri. Pengambil-pengambil kebijakan dan administrator-administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau terhadap dampak dari kebijakan-kebijakan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilakukan itu).

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing - masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata - kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah - masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argumen perlunya evaluasi :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada yang berkepentingan manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Jones (1977) dan Tangkilisan (2003: 25) mengemukakan bahwa evaluasi suatu kebijakan publik berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan. Selanjutnya Ripley (1975) dan Tangkilisan (2003: 26) mengemukakan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap suatu tindakan kebijakan sesungguhnya merupakan evaluasi terhadap proses implementasinya; kemudian bagaimana kepatuhan dari kelompok - kelompok

ketika proses implementasi berlangsung; dan terakhir bagaimana prospek ke depan dari dampak kebijakan tersebut.

Melihat pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan dimana hal ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Menurut Wirawan (2011:7-8), evaluasi merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi.

H. Jenis Evaluasi

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Menurut Abidin (2004: 215), evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian : Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*); Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*).

Pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasakan ada keperluan untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat. Contoh yang paling jelas dapat dilihat dalam proses pembuatan

sebuah Undang-Undang. Bersamaan dengan proses pelaksanaan ada kegiatan penilaian yang disebut monitoring. Sekalipun kedua proses itu berjalan bersamaan, monitoring tidak boleh sampai mengganggu proses pelaksanaan. Bahkan monitoring diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan. Dengan monitoring diharapkan, setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena ada perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan, segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Dengan demikian kekeliruan tidak berlarut-larut sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kegagalan. Dengan menggunakan istilah *engineering*, kelemahan yang diidentifikasi melalui monitoring adalah kesalahan pelaksanaan dari manusia atau *human error*, karena asumsi yang dipakai disini adalah, rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan sempurna atau perfect sifatnya. Dengan kata lain, monitoring tidak bertujuan untuk mengubah kebijakan, tetapi hanya mengadakan penyesuaian.

Monitoring dirujukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan target yang direncanakan. Informasi yang dihasilkan berkenaan dengan kelemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan sehingga tidak dapat mencapai target *output* dari suatu kebijakan. Apakah tujuan yang dirumuskan memberi hasil akhir atau *outcomes* yang terbaik, tidak menjadi fokus monitoring. Monitoring berakhir pada saat target *outputs* tercapai. Penilaian didasarkan pada efisiensi dan ketepatan (*appropriate*) dalam pemanfaatan keseluruhan faktor pendukung (*supporting factors*) yang ada dalam proses pelaksanaan.

Sesudah pelaksanaan ada evaluasi akhir atau *ex-post evaluation*. Evaluasi akhir ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara

menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri maupun karena kelemahan dalam pelaksanaan. Tujuan dari evaluasi akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan. Maka itu fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi pada keseluruhan proses. Karena itu, obyek yang diidentifikasi bukan sekedar kegagalan, melainkan juga keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sementara keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan. Menurut Abidin (2004: 217), informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan:

1. Efisiensi (*efficiency*), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya).
2. Keuntungan (*profitability*), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-biaya).
3. Efektif (*effectiveness*), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.
4. Keadilan (*equity*), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan).
5. *Detriments*, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya.
6. Manfaat tambahan (*marginal rate of return*), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (*change-in-benefits/change-in-cost*).

William N.Dunn dan Abidin (2004: 218), menunjuk pada perbedaan fungsi antara monitoring atau evaluasi dalam proses pelaksanaan dengan evaluasi kinerja atau evaluasi sesudah pelaksanaan. William N. Dunn mengemukakan bahwa

monitoring ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan, bagaimana terjadinya dan mengapa, "*What happened, how and why ?*" Sementara evaluasi akhir menjawab persoalan tentang perubahan-perubahan apa yang telah terjadi, "*what differences does it make ?*". Jelasnya, di sini terdapat perbedaan fungsi di antara kedua jenis evaluasi tersebut. Sebagai konsekuensi dari perbedaan fungsi ini terdapat perbedaan pada informasi yang dihasilkan. Monitoring, menurut Dunn, menghasilkan informasi yang sifatnya empiris, berdasarkan fakta-fakta yang ada (*designative claims*), sementara evaluasi akhir menghasilkan informasi yang bersifat penilaian (*values*) dalam memenuhi kebutuhan, peluang dan/atau memecahkan permasalahan. Lebih lanjut Tangkilisan (2003: 26) menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seorang analis atau evaluator kebijakan, yaitu :

1. Aspek perumusan kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan.
2. Aspek implementasi kebijakan, dimana analis atau *evaluator* berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan.
3. Aspek evaluasi dimana analis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Dengan mengkaji ketiga aspek tersebut di atas, maka studi evaluasi mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan publik. Penentuan aspek evaluasi menjadi sangat penting dan strategis dikarenakan tahap ini merupakan

tonggak dari tipe evaluasi yang akan dilakukan oleh analis. Evaluasi dilakukan dengan memenuhi syarat obyektifitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan dari tindakan kebijakannya.

Berbicara mengenai jenis atau tipe kebijakan, Heath (1997) dan Tangkilisan (2003: 27) membedakan evaluasi kebijakan publik atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe evaluasi proses (*process evaluation*), dimana evaluasi dilakukan dengan memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana program dilaksanakan ? (*how did the program operate ?*).
2. Tipe evaluasi dampak (*impact evaluation*), dimana evaluasi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program ? (*What did the program do ?*).
3. Tipe evaluasi strategi (*strategic evaluation*), dimana evaluasi ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana program dapat dilaksanakan secara efektif untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dibanding dengan program-program lain yang ditujukan pada masalah yang sama sesuai dengan topik mengenai kebijakan publik.

Menurut Wirawan (2011:17), setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya.

2. Evaluasi Program

Menurut Wirawan (2011:17), Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk waktu yang tidak terbatas. semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang

ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program yang ditentukan. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Banyak sekali definisi mengenai evaluasi program. Tetapi dalam penelitian ini mengacu kepada *General Accounting Office*, yang melakukan evaluasi komprehensif yang salah satu yang terbaik di dunia terhadap berbagai program pada pemerintah federal di negara Amerika Serikat, yang mendefinisikan evaluasi program sebagai berikut: “*A systematic study conducted to assess how well a program is working...typically focused on achievement of program objectives.*” Kemudian *Office of Management and Budget* (Nuryana, 2009 dalam Pastaliza fatma, 2012) mendefinisikan evaluasi program sebagai: “*An assessment, through objective measurement and systematic analysis, of the manner and extent to which Federal programs achieve intended objectives.*” Dengan kata lain evaluasi program itu adalah sebuah studi sistematis untuk menguji bagaimana sebuah program bekerja dengan baik yang secara tipikal fokus pada pencapaian tujuan program. Bisa juga dikatakan bahwa evaluasi program itu adalah sebuah pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematis, terhadap cara -

cara dan sejauhmana program itu mencapai tujuan yang direncanakan. Evaluasi program dapat membantu menjelaskan “*Why*” hasil tersebut dapat muncul. Mengetahui “*Why*” adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan “*good performance*” atau memperbaiki “*poor performance*”. Dalam McNamara (1997-2010) dan Pastaliza fatma (2012) bahwa dalam merancang program evaluasi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan : a) Untuk apa dilakukan evaluasi; b) Siapa respondennya; c) Jenis informasi apa yang diperlukan, d) Dari siapa saja informasi diperoleh; e) Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan informasi misalnya, kuesioner, wawancara, memeriksa dokumentasi, mengamati kelompok penerima bantuan, melakukan kelompok fokus di antara kelompok penerima bantuan atau instansi pemberi bantuan, dll; f) Kapan informasi yang dibutuhkan harus dikumpulkan?; g) Apa saja sumberdaya yang tersedia untuk mengumpulkan informasi?. Untuk menyusun program pemberdayaan khususnya untuk mengurangi kemiskinan diperlukan keterpaduan dalam pembinaan kelompok, peningkatan keterampilan pengurus dan anggota kelompok sehingga bantuan yang diterima mencapai sasaran.

3. Evaluasi Proyek

Pelaksanaan proyek perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek.

4. Evaluasi Material

Merupakan suatu proses evaluasi untuk mengukur sejumlah material atau produk - produk tertentu yang digunakan dalam suatu kebijakan, proyek atau program.

Dalam penelitian ini akan digunakan evaluasi program khususnya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah di Kota Tanjungpinang.

I. Indikator Pengukuran Evaluasi Program

Menurut Tangkilisan (2003: 28), walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum evaluasi kinerja program tersebut mengacu empat indikator pokok yaitu indikator input, process, outputs dan outcomes. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Menurut George Edwards (Tangkilisan 2003: 55), sumberdaya ini terdiri dari Staf yang cukup dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan (berhubungan dengan sumber daya manusia), informasi yang menjelaskan bagaimana para implementor melakukan kebijakan (implementor perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika diberikan petunjuk untuk bertindak) dan bentuknya seperti data berupa peraturan pemerintah serta fasilitas yang cukup.

Sedangkan indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Efektivitas menurut Dunn (2000: 610) dalam pengevaluasiannya harus bisa menjawab apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? dimana efektivitas ini berkenaan dengan

tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Rasionalitas teknis ini maksudnya adalah karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing - masing memecahkan masalah - masalah publik secara efektif. Contohnya, kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah hasil yang bernilai (tujuan). Sedangkan efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam pengevaluasiannya, menurut Dunn, efisiensi hendaknya bisa menjawab pertanyaan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensi saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Efektivitas lebih melihat kepada hasil/tujuan yang hendak dicapai sedangkan efisiensi melihat kepada berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya. Dan terakhir indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Perlu diketahui apakah tujuan yang dirumuskan memberi hasil akhir atau *outcomes* yang terbaik, tidak menjadi fokus dari evaluasi dalam proses pelaksanaan kebijakan (monitoring). Monitoring berakhir pada saat target *outputs* tercapai. Penilaian

didasarkan pada efisiensi dan ketepatan (*appropriate*) dalam pemanfaatan keseluruhan faktor pendukung (*supporting factors*) yang ada dalam proses pelaksanaan.

Menurut Wirawan (2011:19-21), Kegiatan evaluasi biasa dibedakan menurut fokusnya yaitu *assessment* kebutuhan program (*program need assessment*), evaluasi proses program (*process program evaluation*), evaluasi keluaran program (*outcome program evaluation*) dan evaluasi efisiensi (*program efficiency evaluation*)

J. Penilaian Kebutuhan

Penilaian kebutuhan (*need assessment*) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh suatu organisasi atau masyarakat. Asesmen kebutuhan perlu dilakukan sebelum merencanakan suatu kebijakan, program atau proyek. Evaluator mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan masyarakat dan mengumpulkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari sejumlah alternatif yang diidentifikasi evaluator memilih salah satu alternatif terbaik yang merupakan inti dari rencana program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Evaluasi proses

Evaluasi ini dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain layanan dari program; pelaksanaan pelayanan; pemangku kepentingan yang dilayani; sumber-sumber yang dipergunakan; pelaksanaan program dibandingkan yang diharapkan dalam rencana; dan kinerja pelaksanaan program.

b. Evaluasi keluaran

Merupakan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yang mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijarah antara lain mengenai:

1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan
2. Jumlah dan jenis orang yang dilayani
3. Pengaruh dan akibat dari program terhadap orang/objek yang mendapatkan layanan.
4. Mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung terus menerus.

c. Evaluasi Efisiensi

Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh biaya atau anggaran (*cost*) tertentu.

Manajemen strategik adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas keputusan - keputusan dan tindakan - tindakan dalam suatu organisasi publik atau organisasi berkaitan dengan perlunya penerapan strategi. Manajemen strategik senantiasa diperlukan oleh suatu organisasi publik, dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi akan dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat sasaran (Nugraha, 2009;1.2). Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi beban perekonomian rakyat setidaknya meliputi tiga langkah berikut; pertama meningkatkan efisiensi sektor negara dengan penekanan khusus penanggulangan korupsi, kolusi yang dimulai dari atas, kedua meningkatkan alokasi anggaran negara dan daerah untuk

menciptakan proyek - proyek padat karya, ketiga melanjutkan reformasi ekonomi Indonesia dengan reformasi politik (Baswir, 1999:187).

Chandler (1962) dan Rangkuti (2009;4), menyebutkan bahwa, “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep - konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep - konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Distinctive competence*; tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.
- b. *Competitive advantage*; kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan - tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan - tujuan itu dapat tercapai (Terry, 2008:43). Jika demikian halnya maka proses perencanaan itu hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila administrasi dan manajemen sebelum menjalankan fungsi perencanaan itu mengumpulkan data - data dan fakta - fakta selengkap mungkin. Data - data yang dikumpulkan perlu dianalisis dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan mungkin akan dihadapi dimasa depan, baik situasi politik, sosial maupun keamanan dan terutama yang bersifat ekonomi (Siagian, 2008:89).

Perencanaan ekonomi bisa diartikan dengan suatu usaha pemerintah yang sungguh - sungguh untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa

hal, bahkan mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel ekonomi yang penting dari satu negara (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor dan lain-lain) dalam rangka usaha untuk mencapai sekumpulan keputusan pendahuluan mengenai tujuan - tujuan pembangunan. Suatu rencana ekonomi hanyalah merupakan serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam satu jangka waktu tertentu. Rencana-rencana ekonomi bisa bersifat komprehensif (meliputi keseluruhan) atau bisa juga hanya bersifat sebagian - sebagian/partial. Rencana yang komprehensif targetnya meliputi semua aspek-aspek penting yang menyangkut perekonomian nasional. Rencana yang sebagian - sebagian/partial hanya meliputi sebagian dari ekonomi nasional umpama, bidang perindustrian, pertanian, sektor pemerintah, sektor swasta asing dan sebagainya. Akhirnya, proses perencanaan itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu latihan bagi pemerintah, pertama untuk memilih tujuan - tujuan sosial, kemudian menyusun berbagai target, dan terakhir mengorganisir suatu kerangka kerja untuk diimplementasi, dikoordinasi dan memonitor rencana pembangunan tersebut (Todaro, 1983:164-165).

Empat unsur pembangunan sebagaimana dijelaskan oleh Samuelson (1985:554), unsure - unsur pertumbuhan dinegara berkembang pun sebenarnya tidak berbeda, yang berbeda hanya kebutuhan dan tingkat kelangkaan factor - faktor produksi. Mesin kemajuan ekonomi bergerak diatas empat roda, yaitu:

- Sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi dan lain-lain).
- Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, iklim dan lain-lain).
- Pembentukan modal (mesin - mesin, pabrik, jalan raya dan lain-lain).

- Tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen kewiraswataan dan lain-lain).

Pemerintah Daerah merupakan aktor penting dalam pemberdayaan masyarakat mengingat peranannya yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan serta dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah masalah menyangkut keberadaan dan peran dari Pemerintah Daerah ini yang berakar dari masalah birokrasi, serta mekanisme standarisasi (prosedur) yang ada (Prasojo, 2007:5.15).

Fenomena birokrasi telah mendominasi pembicaraan mengenai organisasi, administrasi dan manajemen. Padahal, ketika Weber muncul pertama kali dengan tipe ideal birokrasinya sama sekali tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa inilah bentuk organisasi yang paling tepat untuk kegiatan bersama manusia. Sebagaimana dijelaskan Miftah Thoha (1991) dan Sundarso (2007:2.6), tulisan tentang birokrasi Weber ini baru muncul di tahun 1921 ketika terbit buku *Witchcraft und Gessellschaft*. Menurut Martin Albrow, Weber tidak pernah menggunakan istilah “birokrasi” dalam tulisannya. Istilah itu digunakan Vincent de Gournay ketika menguraikan sistem pemerintahan Prusia di tahun 1745.

Masyarakat sudah terkondisi mempersepsikan birokrasi sebagai sesuatu yang negatif. Birokrasi identik dengan peraturan berbelit - belit, lamban, mempersulit, tidak efisien, tidak adaptif, memperhatikan diri sendiri dan sebagainya. Bagi para pelaku ekonomi, birokrasi adalah pola kerja aparat

pemerintahan yang tidak profesional yang sering berarti biaya tambahan (Sundarso, 2007:2.12).

Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengurangi beban perekonomian rakyat setidaknya meliputi tiga langkah berikut; pertama meningkatkan efisiensi sektor negara dengan penekanan khusus penanggulangan korupsi, kolusi yang dimulai dari atas, kedua meningkatkan alokasi anggaran negara dan daerah untuk menciptakan proyek-proyek padat karya, ketiga melanjutkan reformasi ekonomi Indonesia dengan reformasi politik (Baswir, 1999:187).

Harga yang dihasilkan dari pasar bersaing sempurna (pbs) akan mengalokasikan sumberdaya secara optimal. Jika harga yang ada tidak sama dengan harga yang bersangkutan, maka arah perbaikannya adalah menuju ke harga pbs. Fenomena kegagalan pasar bisa diindikasikan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pbs (orang akan mengatakan kemahalan), lebih rendah dari harga pbs (terlalu murah), atau harga untuk suatu produk tidak bisa dibentuk oleh pasar. Barang yang dimonopoli biasanya akan mahal; barang yang disubsidi biasanya akan murah; pasar tidak mampu memproduksi harga polusi; dan adanya *asymmetric information* membuat produk menjadi *overpriced*, misalnya seperti pada kasus seseorang membeli durian busuk. Jika pasar gagal membentuk harga dengan “tepat” maka pemerintah mendapat pembenaran untuk melakukan intervensi, yaitu membuat harga tersebut menjadi tepat. Jadi arah regulasi adalah membuat harga menjadi tepat, sehingga harga tersebut mampu membimbing pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumberdayanya secara optimal. Ingat, fungsi harga adalah memberikan sinyal kelangkaan suatu barang kepada pelaku

ekonomi. Jika harga ini benar seperti yang diskenariokan dalam pasar bersaing sempurna, maka pelaku ekonomi akan mampu mengalokasikan sumberdayanya secara efisien (Sunaryo, 2001:189).

Keberadaan berbagai organisasi dalam suatu masyarakat tidak hanya demi kepentingan organisasi dan berbagai pihak yang berkepentingan saja, akan tetapi juga demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebenaran pendapat ini terlihat pada ungkapan bahwa setiap organisasi mempunyai tanggung jawab sosial. Penunaian kewajiban sosial sangat mungkin tidak dapat terlaksana dengan baik apabila suatu organisasi bekerja sendirian. Berarti kerja sama antar organisasi sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk penggabungan sumber, penyatuan gerak langkah dan kesamaan tindakan. Dengan kata lain diperlukan pembentukan jaringan kemitraan (*networking*) (Siagian, 2007:260).

Sebagaimana dijelaskan oleh Urata (2000) dan Adiningsih (2003:3), secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu permasalahan finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam finansial diantaranya adalah:

- Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM.
- Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM.
- Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
- Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.

- Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- Banyak IKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (*non finansial*) diantaranya adalah:

- Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- Kurangnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
- Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Standar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat pengukuran yang berkelanjutan, dokumentasi, penilaian dan penyesuaian. Standar memperlihatkan syarat bagi sistem manajemen kualitas dimana sebuah organisasi; (1) Perlu untuk memperlihatkan keahliannya dalam penyediaan produk dan jasa yang mampu memenuhi persyaratan pelanggan, (2) Bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan lewat aplikasi efektif pada sistem, termasuk didalamnya proses untuk perbaikan yang berkelanjutan pada sistem dan kepastian kesesuaian dengan persyaratan yang diajukan pelanggan (Kuncoro, 2005:292).

Untuk menghadapi perekonomian global tersebut tidak ada cara lain bagi Indonesia kecuali melakukan upaya - upaya guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Upaya - upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi usaha - usaha besar saja, namun harus mencakup upaya peningkatan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar dapat terus berkembang dan mampu bersaing dalam era globalisasi tersebut. Upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut antara lain dengan meningkatkan kemampuan permodalan UMKM termasuk koperasi (Gopar, 2010:75).

Permasalahan utama adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran. Walaupun banyak sekali kredit khusus bagi pengusaha mikro dan kecil, sebagian besar dari responden terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga - lembaga keuangan lainnya. Mereka tergantung sepenuhnya pada uang/tabungan mereka sendiri, uang/bantuan dan dari saudara/kenalan atau dari sumber - sumber informal untuk mendanai kegiatan produksi mereka. Alasannya beragam; tidak pernah dengar atau menyadari adanya skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba tetapi ditolak karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai atau mengundurkan diri karena ruwetnya prosedur administrasi, atau tidak mampu memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari awalnya memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga keuangan formal (Tambunan, 2010:2).

Sukamdani dan Kadarisman (2007:177-178) mengemukakan enam faktor strategis yang diperlukan sebagai pendukung agar dunia usaha kita sehat dan kuat.

Ke enam faktor tersebut meliputi:

- a. Perlunya pemerintah menjalankan *good governance*.
- b. Perlunya pemerintah memiliki visi dan misi berdasarkan prinsip pasar (yang terbuka) dan demokrasi (berkeadilan sosial).
- c. Perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha yang didasarkan pada rumusan misi dan tujuan serta program yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten dan tegas selama kurun waktu tertentu sesuai dengan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program secara tuntas.
- d. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara konsisten sebagai wirausaha
- e. Tersedianya organisasi bisnis yang profesional dan didukung oleh banyak kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang handal.
- f. Tersedianya media cetak dan elektronik yang proaktif dalam memberikan informasi, analisis bisnis serta kajian kecenderungan bisnis untuk masa depan baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

Hampir semua bentuk intervensi yang diketahui pernah diaplikasikan, antara lain program-program pelatihan *technical skills* dan kewirausahaan, konsultasi pemberdayaan karyawan, subsidi input, peningkatan infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, pembangunan sentra - sentra industri, kredit subsidi dan lainnya. *Review* menunjukkan ada lebih dari 30 program-program pendampingan teknis UMKM di Indonesia yang tersebar di beberapa departemen. Pelatihan teknis yang dilakukan lebih difokuskan pada pelatihan kepada produsen dalam hal pembukuan, manajemen, *technical skills*, kewirausahaan dan marketing.

Kesimpulan umum yang diperoleh adalah bahwa sebagian besar program tersebut memberikan pengaruh yang sedikit sekali terhadap pengembangan

UMKM. Sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan untuk begitu banyaknya program dan dengan jumlah UMKM yang begitu besar (Setyari, 2005:3).

Penciptaan iklim usaha yang seluas - luasnya bagi UKM untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari penciptaan iklim ini adalah terjaminnya "*level playing field*" bagi semua pihak. Aspek ini meliputi penyempurnaan sistem perundang - undangan dan kebijakan sektoral, dan perlu mendapat dukungan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan (pelayanan satu atap) dan upaya penegakan hukum, penciptaan iklim usaha juga menuntut peningkatan kemampuan aparat pemerintah agar mampu berperan sebagai fasilitator bagi UKM (Soetrisno, 2000:6).

Segmen pasar adalah kelompok individu atau perusahaan yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Oleh karena itu, mereka memiliki kebutuhan produk yang relatif sama. Analisis peluang pasar merupakan gambaran dan perkiraan atas ukuran dan potensi penjualan suatu segmen pasar yang menarik bagi perusahaan dan penilaian tentang para pesaing utama di segmen - segmen tersebut (Lamb, 2001:54).

Inovasi adalah suatu produk yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh calon pengguna. Tidak jadi masalah apakah produk tersebut tergolong baru terhadap dunia atau beberapa kategori lain yang termasuk dalam produk baru. Jika produk ini baru bagi calon pengguna, maka hal ini merupakan inovasi dalam konteks ini (Lamb, 2001:462).

Promosi merupakan aktifitas yang menunjang keberhasilan strategi bauran pemasaran lainnya. Tanpa promosi keunggulan produk dapat tidak diketahui

konsumen. Program harga diskon yang disusun perlu diperkuat dengan iklan sehingga diketahui oleh target pasar. Komponen promosi terdiri dari periklanan, hubungan masyarakat, penjualan personal dan promosi penjualan (Wijatno 2009:191).

K. Penelitian Terdahulu

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan sektor usaha kecil. Pendekatan yang dilakukan untuk menumbuhkan sektor usaha kecil adalah dengan pembukaan akses – akses usaha kecil ke pasar yang lebih luas atau introduksi usaha baru yang layak dan menguntungkan. Sedangkan untuk mengembangkan sektor usaha kecil dilakukan dengan memperkuat dan meningkatkan akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, pemasaran dan standarisasi kualitas produk. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan UMKM penghasil sandal adalah penerimaan, jumlah tenaga kerja, jarak ketempat penjualan, usia, lama usaha, pendidikan dan skala usaha. Sedangkan factor-faktor yang tidak berpengaruh secara nyata adalah jumlah mesin jahit, jumlah tanggungan, sumber modal, pelatihan dan jenis UMKM. (Lenora B, 2008)

Menurut P. Eko Prasetyo (2008), Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Selain itu,

terhadap kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar yang umumnya lebih birokratis. Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki usaha sendiri yang tangguh dan mandiri, maka masalah kemiskinan justru akan lebih mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang yang tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya orang yang tidak berpenghasilan, dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah kenyataan hidup.

Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar. Modal tetap masih masalah utama tetapi, bukanlah selalu menjadi masalah yang pertama, karena pada umumnya masalah kekurangan modal pada UMKM lebih mudah diatasi dengan sendirinya selama hasil produksi laku keras di pasaran dan sebagian dari keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan kembali sebagai modal yang berputar. Sebaliknya, sekalipun modal usaha besar dan dapat meningkatkan kapasitas produksi tetapi, jika pangsa pasarnya terbatas, maka akan lebih dekat dengan kerugian dan kebangkrutan.

Melihat kenyataan itu, maka kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui bantuan modal usaha tidaklah salah dan tetap harus diteruskan dan ditingkatkan, sebab UMKM identik dengan “(Usaha Memang Kurang Modal)”. Tetapi, sadarlah bahwa keberadaan UMKM itu beragam dan tidak selamanya masalah utama dan pertama yang dibutuhkan oleh UMKM adalah masalah permodalan. Bisa jadi masalah utama dan pertama yang sedang dihadapi oleh UMKM adalah masalah terbatasnya faktor pemasaran termasuk masih terbatasnya pangsa pasar dan rendahnya daya saing, maka masalah inilah yang

harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya program kebijakan yang baik untuk diterapkan dalam pemberdayaan UMKM adalah bersifat simultan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, oleh karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk mempercepat pembangunan daerah, maka pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan pembangunan harus selalu mengintegrasikan semua lintas pelaku, termasuk berbagai unsur dalam pemerintah daerah, bisnis, organisasi nirlaba dan penduduk lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar UMKM semakin maju antara lain :

1. Promosi Inovasi

Seorang wirausaha secara umum mampu memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas ekonomi dan pengalokasian sumber daya secara efektif. Sejalan dengan tren baru dalam pembangunan ekonomi, wirausaha juga harus mampu menghadapi kompetisi dan berinovasi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pembaharuan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber daya lokal harus dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan bisnis dengan memfasilitasi pengusaha untuk mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan bagi keberhasilan bisnisnya. Lebih penting lagi, otoritas daerah harus mampu melakukan upaya penyederhanaan proses administrasi bagi usaha pemula (*new business start-up*). Sistem inovasi lokal merupakan mekanisme fundamental untuk penguatan kapasitas inovasi ditingkat lokal.

Adapun aktor utama dalam sistem ini meliputi pemerintah setempat, industri, lembaga riset dan perguruan tinggi. Untuk penguatan operasi sistem inovasi lokal, pemerintah daerah perlu mengembangkan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi dengan menyediakan insentif untuk pengembangan usaha patungan antara pengusaha daerah dan perguruan tinggi. Pengembangan inkubator akan meningkatkan diseminasi ilmu pengetahuan dalam sistem inovasi.

Pembentukan kluster akan mampu merangsang pertumbuhan bisnis baru dan menarik perusahaan bisnis baru dari luar daerah, sehingga meningkatkan *output* industri dan menciptakan kesempatan kerja baru. Melalui interaksi dan berbagai sumber daya dalam jejaring, inovasi dan perbaikan teknologi dapat ditingkatkan. Dalam kaitan ini pemerintah daerah perlu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sesuai dengan kondisi lokal untuk pengembangan industri kluster.

2. Pengembangan SDM.

Kebijakan tenaga kerja terkait erat dengan strategi pengembangan ekonomi dan kebijakan stabilitas sosial. Dan keberhasilan pada satu sisi suatu kebijakan tergantung pada keberhasilan yang lain. Unsur - unsur interaksi mempengaruhi keberhasilan kebijakan tenaga kerja meliputi seberapa baik kebijakan itu sejalan dengan seluruh strategi pengembangan ekonomi, yang juga harus membangun jejaring dengan layanan organisasi ekonomi dan sosial lain, dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi fleksibilitas implementasinya.

UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan tenaga kerja di tingkat lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai andil penting dalam penyusunan kebijakan tenaga kerja diberbagai wilayah. Agar kebijakan UMKM dan bisnis pemula berjalan dengan baik, otoritas pemerintah daerah harus melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Pendirian organisasi pelatihan lokal perlu koordinasi antar pembisnis, tenaga ahli, dan perguruan tinggi. Masukan dari pembisnis dapat membantu menjamin kandungan pelatihan dapat merefleksikan keterampilan yang sesuai dengan alam kebutuhan pasar tenaga kerja. Otoritas daerah dapat menawarkan insentif untuk mengembangkan pelatihan keterampilan, dan mendorong partisipasi dalam pelatihan. Dalam era globalisasi, keterampilan yang dibutuhkan pasar berubah cepat.

Tenaga kerja harus fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu sangat penting untuk mempercepat kapasitas pekerja untuk mempelajari keterampilan baru, dan alih keterampilan bagi industri yang lain.

3. Dukungan Keuangan (*Financial*)

Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) biasanya diiringi dengan kebutuhan modal. UMKM yang semakin berkembang, disebabkan karena semakin besarnya pula peluang usaha yang dapat diakses. Dalam kondisi tersebut biasanya UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, karena kurangnya dukungan dana. Di sinilah pentingnya lembaga pemberi modal memainkan peranannya, sekaligus melakukan pendampingan.

Sejumlah mekanisme dapat dilakukan sesuai dengan keragaman kondisi yang dihadapi UMKM berkaitan dengan akses finansial. Untuk pembiayaan usaha mikro biasanya memerlukan pengembangan lembaga keuangan mikro dan ketersediaan kredit yang dapat diakses mereka. Lembaga keuangan mikro bisa berbentuk bank atau non bank, termasuk koperasi. Bagi usaha pemula, pengembangan jejaring lokal usaha malaikat (*Business Angels*) dapat mengatasi sebagian masalah mereka. Lembaga jaminan kredit termasuk di tingkat lokal juga memadai untuk pasar lokal yang lebih kecil.

Tujuan pengembangan lembaga jaminan kredit untuk menjamin keamanan pembiayaan UMKM, membantu UMKM mengatasi keterbatasan agunan, meningkatkan minat lembaga keuangan memberikan kredit kepada UMKM dan mendukung lembaga lain yang telah berusaha membantu UMKM, sebab selama ini perbankan tidak kondusif dalam memberikan pinjaman kredit, karena kredit yang mereka kucurkan selalu berdasarkan 5 C, yakni *character, capacity, capital, condition of economic, and collateral*. Akibatnya perbankan selalu menerapkan berbagai persyaratan jaminan keamanan kredit yang disalurkan. Apalagi mereka juga sering kali tidak membedakan persyaratan kredit antara usaha mikro atau kecil dengan usaha besar. Karena itulah pemerintah mendukung peran serta lembaga keuangan lain seperti lembaga modal ventura sebagai alternatif solusi didalam pemberdayaan UMKM.

Keunggulan modal ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada UMKM dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik mempunyai tingkat resiko atau

modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor. Modal ventura merupakan investasi aktif, yakni jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha UMKM investasi bersifat sementara dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.

Dibandingkan dengan perbankan, lembaga modal ventura memiliki beberapa kelebihan didalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah antara lain: *Pertama*, lembaga modal ventura menyediakan modal seperti halnya perbankan, tetapi dengan syarat lebih sederhana dalam aspek formal maupun agunan karena lebih mengedepankan kelayakan usaha. *Kedua*, selain modal, pola ventura juga menyediakan pendampingan sesuai kebutuhan UMKM, sehingga dapat berjalan lebih efektif bagi kedua pihak. Pola pendampingan ini menjadi *trademark* ventura. Pendampingan ini dapat berbentuk pembinaan atau Pelatihan, konsultasi, manajemen dan perluasan pasar bagi UMKM. Ini yang menyebabkan pola modal ventura berbeda dengan perbankan. Faktor lain yang mendukung lembaga modal ventura menjadi alternatif, adalah akses jaringan di seluruh Indonesia.

4. Strategi Pemasaran.

Di banyak daerah, masalah strategi pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untuk produk budaya lokal. Industri budaya lokal yang tradisional mungkin masih menggunakan metode pemasaran kadaluarsa. Ini bisa membuat industri ini mengalami penurunan. Tetapi, upaya mengembangkan industri budaya lokal dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih kembali keuntungan pasar. Kebijakan seperti ini dapat mencegah hilangnya nilai budaya dan sejarah karena dampak globalisasi.

Produk dari industri budaya lokal merupakan ekspresi budaya dan seni, yang biasanya banyak menarik bagi pembeli asing dan memiliki potensi ekspor tinggi. Walaupun secara umum, sebagian dari industri ini adalah usaha mikro yang kesulitan pemasaran di luar negeri. Pengembangan *e-commerce* merupakan strategi yang dapat membantu memasarkan produknya keluar negeri dengan biaya yang murah. Sebelum itu, memperkecil kesenjangan digital perlu dilakukan dan sekaligus pembangunan infrastruktur internet.

Untuk mengatasi keterbatasan ukuran dan sumber daya, pebisnis budaya lokal dapat menerapkan strategi pembangunan kerjasama, seperti kerja sama pemasaran dengan pebisnis di industri budaya lokal dan bisnis lain yang saling menguntungkan. Para pasangan bisnis ini dapat bekerja sama untuk membangun asosiasi atau jejaring untuk mempromosikan produk.

5. Membangun Kemitraan

Pembangunan daerah sebagian besar tergantung pada kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis dan lembaga non pemerintah. Kemitraan ini memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. Pasangan lokal dari sektor swasta dapat membantu mengeksplorasi kesempatan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Kunci utama dari kemitraan ini adalah mekanisme untuk mengatur dan mengkoordinir secara benar sumber daya dan upaya - upaya yang berbeda dari para pelaku yang berbeda.

Perencanaan dan implementasinya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing - masing. Selama dalam proses ini penting untuk diperhatikan, yakni membentuk jejaring kerjasama dan mengembangkan

rasa saling percaya. Karena keterbatasan institusionalisasi, kemitraan untuk pembangunan daerah kerap kurang berjalan dengan stabil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memimpin di depan dalam membangun mekanisme yang lebih stabil dan formal untuk membantu memberikan kemitraan sebagai basis pelembagaan dan kemampuan merancang dan menerapkan rencana pengembangan.

Konsep kemitraan untuk pembangunan daerah dekat hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Sejalan dengan filosofi CSR, perusahaan ingin mendedikasikan dirinya untuk membangun kemitraan lokal, memperkuat kapasitas lokal, perlindungan lingkungan dan berkontribusi dana untuk pembangunan daerah. Kesadaran akan pentingnya CSR diantara para pebisnis menjadi prasyarat penting untuk melibatkan para pebisnis dalam kemitraan untuk pengembangan daerah. Membangun kesadaran ini merupakan bidang yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurut Abdullah Abidir, S.E. (2005), Dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah *Pertama*, potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. *Kedua*, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. *Ketiga*, Sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sanagat tinggi. *Keempat*, peranan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha

mikro. *Kelima*; Sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika disain dan *strategi replikasi* yang meliputi kerjasama jaringan (*network*) pemerintah, LSM, lembaga swasta dan individu maupun kelompok di kelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.

Menurut sukesi (2012), Secara spesifik pembinaan dan pengembangan yang perlu diperhatikan dalam bidang pemasaran bagi UKM di Kota Malang adalah

- a. Memberikan bantuan tentang akses pasar dan informasi pasar
- b. Mengembangkan jaringan usaha di daerah-daerah lain (luar kota atau ekspor)
- c. Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen
- d. Membantu meningkatkan mutu produk dan kualitas kemasan

Untuk membedakan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya dengan penulisan yang dilakukan saat ini yang berjudul evaluasi keberhasilan program pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang “study kasus program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah” dapat dilihat pada analisisnya, yaitu untuk penelitian saat ini menggunakan tiga analisa dalam pendataan antara lain yang pertama menggunakan analisis deskriptip yaitu menggambarkan persoalan – persoalan yang sedang di hadapi. Kedua *importance – performance analysis* yang bisa mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan baik terhadap koordinasi, proses, dampak dan pelaksanaan bantuan terhadap UMKM. Dalam hal ini penulis juga menggunakan analisis ke tiga yaitu analisis Wilcoxon yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberian program bantuan terhadap omzet, keuntungan, jumlah modal dan jumlah anggota sebelum dan sesudah

mendapatkan program bantuan apakah memberikan dampak yang signifikan atau tidak terhadap keempat unsur tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan analisis deskriptif yang hanya menggambarkan terhadap persoalan yang sedang dihadapi yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Didalam pelaksanaan dan pembahasannya, penelitian yang dilakukan terdahulu yang membedakan dengan penelitian saat ini yaitu bahwa penulisan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk melihat tentang karakteristik UMKM, mengkaji proses bantuan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait kepada pelaku UMKM yang dilihat manfaatnya dalam efisiensi dan efektifitas program kegiatan tersebut, melihat dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha terhadap program pengembangan fasilitas usaha bagi UMKM yang dilaksanakan oleh SKPD terkait, mengevaluasi strategi yang perlu dilaksanakan oleh SKPD yang terkait atas bantuan atau pembinaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM.

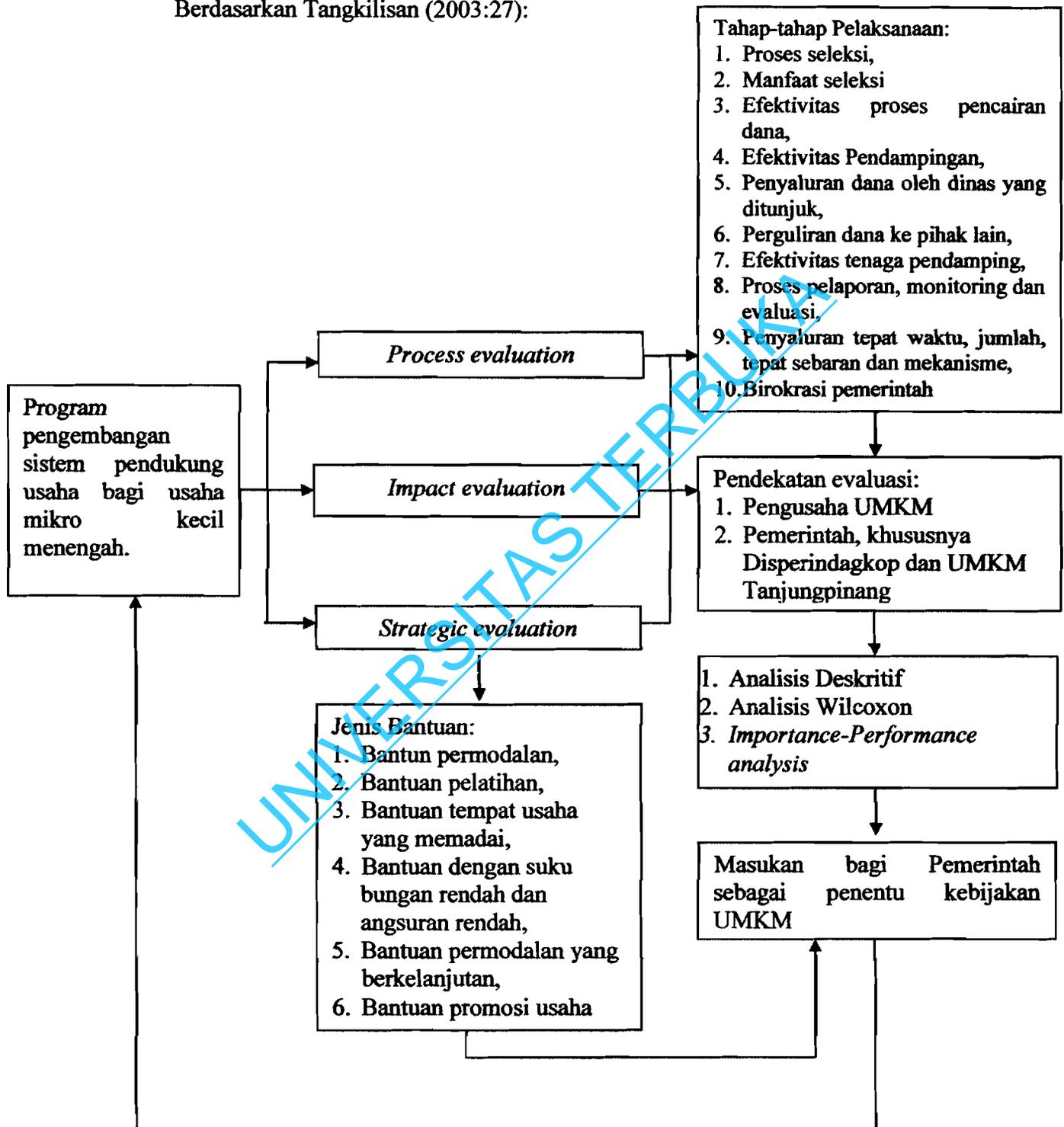
Dengan tujuan tersebut, maka penulis dapat melihat keberhasilan program kegiatan bidang UMKM melalui program pengembangan sistem pendukung bagi usaha kecil menengah di Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan permasalahan – permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Permasalahan tersebut meliputi tentang bagaimana tanggapan dari para pelaku UMKM terhadap bantuan Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha UMKM serta pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang baik dari sisi proses, dampak dan evaluasi strategis ?, seberapa besar pengaruh program bantuan tersebut terhadap pelaku usaha bagi UMKM ?, apakah Program

pengembangan sistem pendukung bagi usaha UMKM yang dilakukan dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi kepada pelaku usaha di Kota Tanjungpinang tersebut sudah berhasil dan tepat sasaran ?, kendala – kendala apa yang dihadapi oleh UMKM dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya SKPD terkait untuk mengembangkan usaha serta menjalankan kegiatan yang disesuaikan dengan aturan – aturan yang ada?.

Dari permasalahan dan tujuan tersebut, maka penulis bisa menjawab tentang perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang yang akan di teliti, di analisa serta di bahas pada bab IV. Pada penelitian sebelumnya memperhatikan tentang pemberdayaan UMKM yaitu untuk menumbuhkan sektor usaha melalui akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, pemasaran dan standarisasi kualitas produk. Melalui hal tersebut, maka dengan dilakukanya pemberdayaan tersebut akan memperkuat perekonomian bagi pelaku usaha dan dapat melakukan aktifitas secara berkelanjutan untuk mengembangkan usahanya. Melalui penelitian tersebut dapat dilihat langkah – langkah apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk mengembangkan UMKM dalam hal promosi inovasi, pengembangan SDM, dukungan finansial, strategi pemasaran serta bagaimana membangun kemitraan. Dari analisa yang didapat, maka dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih membahas tentang bagaimana mengembangkan UMKM agar dapat meningkatkan usahanya, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini adalah mengevaluasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM di Kota Tanjungpinang melalui proses pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha serta memberi dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha.

L. Kerangka Pikir/Alur Penelitian

Berdasarkan Tangkilisan (2003:27):



Gambar 1. Alur Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam upaya memperkaya fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif (Singarimbun, 1987:10). Penelitian Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Defenisi lain mengatakan penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Penelitian kualitatif dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang biasanya menekankan ukuran dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (*generation of theory*). Oleh karena itu, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk

memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata - kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam metodologi penelitian kualitatif ini berlaku logika induktif, dimana kategori muncul dari informan ketika penelitian sedang berlangsung, bukan diidentifikasi oleh peneliti sebelum penelitian.

Menurut Marshall & Rossman dalam Sarosa (2012:29) mengemukakan bahwa desain atau rancangan penelitian adalah rencana yang disusun peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan. Bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian, desain penelitian merupakan peta yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (*research questions*) yang dipengaruhi oleh filosofi penelitian dan pendekatan yang akan dianut. Di dalam melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Keberhasilan Program Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah), penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan di perkuat dengan penelitian kuantitatif. Penelitian Kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sutopo dan Arief, 2010:1). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya - upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan - pertanyaan dan prosedur - prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema - tema yang khusus ke tema - tema umum, dan menafsirkan makna data. Siapa pun yang terlibat

dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandangan penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan Creswell (2010:4-5).

Menurut Moleong (2011:4) (yang dikutip dari Bogdan dan Taylor) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sedangkan Denzin dan Lincoln (Moleong, 2011:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jadi dari definisi tersebut diatas dapatlah disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik (utuh) dan dengan cara, deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono (2003:14), penelitian dengan pendekatan naturalistic/kualitatif merupakan penelitian dengan kebanyakan datanya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data dan analisis secara kuantitatif. dimana data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

B. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui survei ke lapangan dan *indepth*

interview, untuk *indepth interview* dilakukan terhadap pengusaha UMKM baik yang pernah mendapatkan program bantuan ataupun yang belum mendapatkan program bantuan hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun penulis melakukan wawancara (*Key Informant*) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang tentang proses pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan informasi mengenai program tersebut. Sedangkan data sekunder didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan data lainnya yang bersumber dari berbagai dinas/instansi yang ada di Kota Tanjungpinang seperti Instansi Badan Pusat Statistik dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Jumlah populasi usaha mikro, kecil menengah, bisa terlihat pada tabel 3.1. berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2012 di Kota Tanjungpinang terdapat 510 perusahaan yang termasuk kategori Mikro, 2269 termasuk Kecil dan 292 termasuk kategori Menengah.

Tabel 3.1. Kategori Perusahaan

Kategori Perusahaan	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Mikro	510	15,11
Kecil	2.269	76,22
Menengah	292	8,67
Total	3.071	100,00

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM Kota Tanjungpinang

Pada data primer, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan menggunakan *multistage sampling*, dengan jumlah

sampel yang akan digunakan sebanyak 100 (seratus) pengusaha UMKM dimana Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penarikan sampel akan dilakukan secara proporsional terhadap UMKM yang sudah atau belum pernah mendapatkan program bantuan. 100 responden ini diambil berdasarkan keterangan masri singarimbun, untuk penelitian yang bersifat eksploratif, minimal jumlah sampel adalah 30 responden, dengan prinsip semakin banyak sampel maka akan semakin mendekati populasi diambil jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Adapun tujuan pengambilan sampel secara *probability sampling* bertujuan agar hasil penelitian bisa digunakan untuk mengestimasi populasinya (Kish, 1999). Langkah pertama, secara proporsional akan menentukan jumlah sampel untuk masing - masing perusahaan mikro, kecil, dan menengah kemudian langkah berikutnya adalah akan memilih sampel dengan menggunakan *Stratified Proportional Random Sampling (SKS)* untuk menentukan perusahaan mana yang akan terpilih menjadi sampel dari masing -masing kategori perusahaan. Untuk alokasi sampel pada masing - masing kategori usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Alokasi sampel Perusahaan

Kategori Perusahaan	Populasi	Sampel	Persentase
[1]	[2]	[3]	[4]
Mikro	510	15	16,61
Kecil	2.269	76	73,88
Menengah	292	9	9,51
	3.071	100	100,00

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Untuk proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Individu sebagai sasaran wawancara ini disebut *key informan*,

yaitu orang yang memiliki keahlian atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang ingin diketahui. Sebaliknya wawancara juga dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang dirinya sendiri, seperti pendirian, pandangan, persepsi, sikap, atau perilaku. Individu sebagai sasaran wawancara ini sering disebut responden. Informan maupun responden tidak harus saling menggantikan. Keduanya dibutuhkan sebagai sasaran wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif. Apalagi informan maupun responden sebagai sasaran yang diwawancara hanya menunjuk pada unit observasi yang dengannya data dikumpulkan tentang sesuatu masalah yang ada dalam unit analisis.

Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai informan adalah :

1. Pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang baik yang pernah ataupun belum pernah mendapatkan program bantuan. Dengan dijadikannya pelaku UMKM sebagai responden hal ini ditujukan agar memperoleh informasi mengenai penilaian terhadap proses, dampak dan bagaimana kebijakan strategis terhadap program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah. semua UMKM baik yang sudah maupun yang belum menerima program tersebut dijadikan responden dalam penelitian ini dengan tujuan diharapkan dapat memperoleh informasi yang seimbang dari sisi pelaku UMKM, mengenai penilaian terhadap proses, dampak maupun strategi yang perlu disusun bagi perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang.
2. Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Tanjungpinang. Dinas tersebut dijadikan objek dalam penelitian ini karena Disperindagkop merupakan dinas yang bertanggung jawab langsung dalam

pelaksanaan program tersebut. Dari dinas tersebut diambil 2 orang untuk dijadikan informan yaitu sekretaris Disperindagkop Kota Tanjungpinang yang juga sebagai Mantan Kabid koperasi dan UMKM serta Kassubag Program Disperindagkop Kota Tanjung Pinang. Dari kedua informan tersebut diharapkan mampu memberikan semua keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kedua informan tersebut dianggap paling mengetahui bagaimana perkembangan para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota melalui Disperindagkop dijadikan informan dengan tujuan agar diperoleh informasi mengenai UMKM baik dari sisi penyedia program maupun dari para pelaku UMKM sebagai objek dalam program yang sudah ditetapkan.

3. Bappeda Kota Tanjungpinang khususnya bidang ekonomi kreatif, hal ini dikarenakan Badan tersebut memiliki peranan dalam perencanaan pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang.
4. Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, dengan dijadikannya BPS sebagai informan, tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi kontribusi para pelaku UMKM bagi perkembangan ekonomi Kota Tanjungpinang secara mikro.

C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner. Kuesioner merupakan kumpulan beberapa pertanyaan untuk mengukur berbagai indikator, dimana jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 set responden yaitu kuesioner untuk para pelaku

UMKM di Kota Tanjungpinang dan responden yang berasal dari Disperindagkop Kota Tanjungpinang

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung dengan responden dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Alatnya adalah pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaku UMKM Kota Tanjungpinang sebanyak 100 responden
2. Informan yang berasal dari Disperindagkop Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh sekretaris dan Kasubbag program

c. Observasi

Alat yang dibutuhkan adalah kuesioner untuk pengamatan di lokasi penelitian dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal-hal yang akan didapatkan dari observasi ini adalah : bagaimana karakteristik para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, bagaimana evaluasi terhadap proses, dampak dan strategi mengenai program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang sudah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang. selain itu juga observasi dilakuakn terhadap berbagai aktifitas pelaku UMKM melalui beberapa dokumentasi/foto.

Agar pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan efisien, maka kegiatan penelitian ini perlu ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapan - tahapan, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data referensi awal dan studi literatur untuk mendukung kegiatan penelitian.

Dalam hal ini akan dilakukan tinjauan pustaka dan pengumpulan data sekunder dan informasi pendukung lainnya terutama data yang didapat dari SKPD yang berkaitan langsung dengan pelaku UMKM. Jenis kajian ini meliputi; literatur, jurnal, artikel, peraturan dan berbagai kebijakan yang terkait dengan penelitian.

2. Persiapan Teknis.

Persiapan - persiapan teknis yang akan dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan tata urutan penelitian dengan menempuh tahapan - tahapan sebagai berikut;

- Pendalaman metodologi penelitian,
- Diskusi/ bimbingan/tutorial/dari pembimbing penelitian.
- Penetapan target pendataan dan penyusunan rencana pelaksanaan pengumpulan data.
- Penyusunan rencana pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dan jadwal pelaksanaan penelitian.

3. Observasi Lapangan.

Kegiatan observasi lapangan pada prinsipnya dilakukan untuk mengenali kondisi riil keadaan dilapangan serta mempelajari karakteristik pelaku UMKM setempat serta menghimpun data - data sekunder terkait penelitian untuk memudahkan peneliti pada saat tahapan pelaksanaan pengumpulan data akan dilaksanakan.

4. Kajian Awal dan Persiapan Kuesioner.

Tahapan ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi lapangan dan telaah data sekunder. Pokok tahapan ini adalah melakukan identifikasi dan resume kondisi lapangan berdasarkan hasil kegiatan observasi lapangan yang masih bersifat global/umum. Berdasarkan kajian awal maka akan disusun daftar pertanyaan (kuesioner), yang fokus kepada objek penelitian. Untuk pertanyaan yang bersifat wawancara (*indepth interview*) dilakukan dengan eksploratif melalui pendalaman pertanyaan - pertanyaan yang ada pada kuesioner yang dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat survey dilaksanakan.

5. Melakukan Survey Lapangan/Pendataan

Pada tahapan ini akan membutuhkan waktu untuk menghimpun data \pm 1 bulan, yaitu antara bulan April s/d Mei 2013.

D. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 18.0, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Deskriptif

yaitu analisis yang hanya bersifat menggambarkan terhadap persoalan yang sedang dihadapi (Suprianto, 2006). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. (Masri Singarimbun, 1987:4)

2. Analisis Wilcoxon

Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberian program bantuan terhadap omzet, keuntungan, jumlah modal dan jumlah anggota sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan, apakah memberikan dampak yang signifikan atau tidak terhadap keempat unsur yang tadi (Walpole, 1992). Metode tersebut digunakan untuk mengevaluasi suatu perlakuan, Jika kita mempertimbangkan disamping arah juga mempertimbangkan besarnya relatif perbedaan diantara hasil - hasil perlakuan itu maka kita menggunakan tes ranking bertanda wilcoxon.

3. *Importance-performance analysis*

Tujuan dari analisis ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan baik terhadap koordinasi, proses, dampak dan pelaksanaan program bantuan tersebut, apakah sudah memuaskan atau belum. (supranto, 2006). *Importance and performance analysis* atau analisis tingkat kepentingan dan kinerja merupakan metode deskriptif kualitatif - kuantitatif dalam menganalisis data penelitian untuk menjawab sejauh mana proses impact dan strategic dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja/penampilan maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya.

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah (supranto, j, 1997).

Dalam penelitian ini terdapat 2 peubah yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, dimana X merupakan tingkat kinerja sedangkan Y adalah tingkat kepentingan pengusaha UMKM.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$Tk_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

Tki :Tingkat kesesuaian faktor ke-i

Xi :Total skor penilaian kinerja program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Yi :Total skor penilaian kepentingan/harapan pengusaha

Analisa tingkat kepentingan dan kinerja pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dapat menghasilkan suatu diagram kartesius yang dapat menunjukkan letak factor - faktor atau unsure - unsur jasa yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, dimana dalam diagram kartesius faktor-faktor tersebut akan dijabarkan kedalam empat bagian.

Sumbu mendatar (X) yang terdapat dalam diagram kartesius akan diisi oleh rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh rata-rata skor tingkat kepentingan/harapan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X}_i = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \quad \bar{Y}_i = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$

Dimana:

\bar{X}_i : Rata-rata skor tingkat pelaksanaan/kepuasan faktor/unsur program ke-i

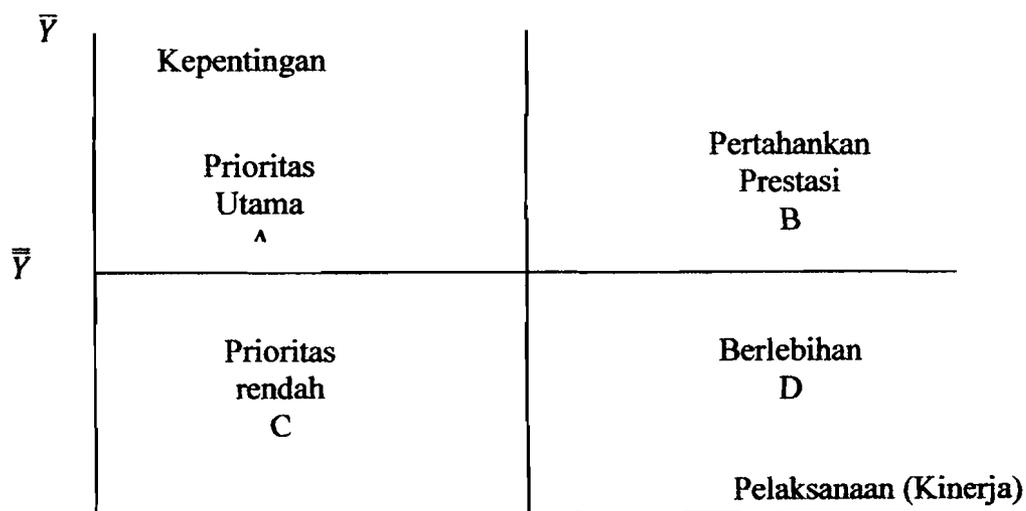
- \bar{Y}_i : Rata-rata skor tingkat kepentingan faktor/unsur ke I
 $\sum X_i$: Total skor tingkat pelaksanaan/kepuasan faktor/unsur
 $\sum Y_i$: Total skor tingkat kepentingan faktor/unsur ke-i
 N : Jumlah responden

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (\bar{X}, \bar{Y}) dimana \bar{X} , merupakan rata - rata skor tingkat pelaksanaan/kinerja seluruh faktor atau atribut dan \bar{Y} , merupakan rata-rata dari skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{X}_i}{K} \quad \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{Y}_i}{K}$$

Dengan K= Banyaknya atribut/fakta/peubah

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius



Keterangan

- A. Menunjukkan faktor/unsur yang dianggap mempengaruhi kepuasan pengusaha termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap penting, namun pemerintah belum melaksanakan sesuai keinginan pengusaha, sehingga mengecewakan/banyak pengusaha yang menyatakan tidak puas
- B. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan pemerintah, untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan pelaksanaannya sangat memuaskan.
- C. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pengusaha, pelaksanaannya oleh pemerintah biasa-biasa saja. dianggap merupakan faktor yang kurang penting dan kurang memuaskan.
- D. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pengusaha akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap faktor yang kurang penting tetapi pelaksanaannya sudah memuaskan.

(J Supranto, 1997)

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian tentang program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam bab ini akan disajikan data deskriptif objek penelitian, kemudian akan dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan uji wilcoxon, uji ini digunakan untuk mengevaluasi apakah program yang sudah ditetapkan memberi pengaruh yang signifikan terhadap modal, keuntungan, omzet dan jumlah tenaga kerja pelaku UMKM. Selain itu juga dilakukan *Importance-performance analysis* untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap suatu program/kegiatan yang dilakukan pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM Kota Tanjungpinang. Setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan dibahas dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis tersebut.

A. Temuan Lokasi Penelitian

4.A.1 Deskripsi Kota Tanjungpinang

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang terbentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2001, yang awalnya berstatus sebagai Kota Administratif dibawah Pemerintah Propinsi Riau. Sejak tahun 2001, berdiri sendiri sebagai kota otonom di bawah lingkungan Propinsi Kepulauan Riau. Letak yang sangat strategis sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Riau dan sebagian masih berkantornya Pemerintah Kabupaten Bintan di daerah Kota

Tanjungpinang membuat geliatnya roda perekonomian dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi terutama kebutuhan akan properti - properti atau rumah tempat tinggal yang layak dan nyaman serta begitu juga dengan properti dibidang dunia usaha.

Secara geografis Kota Tanjungpinang merupakan satu dari dua kota yang berada di wilayah Propinsi Kepulauan Riau yang terletak pada posisi $0^{\circ} 51'$ sampai dengan $0^{\circ} 59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ} 23'$ sampai dengan $104^{\circ} 34'$ Bujur Timur yang beriklim tropis dengan rata-rata temperatur udara sekitar $26,7$ derajat Celsius dan kelembaban udara sekitar 85 persen dengan rata-rata curah hujan $13,2$ mm per hari. Adapun batas - batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bintan dan Kota Batam
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan
- c. Sebelah Barat : Kota Batam
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Bintan.

Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai $239,50$ km² yang terdiri dari daratan $131,54$ km² dan lautan $107,96$ km² dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Keadaan geologis Kota Tanjungpinang sebagian berbukit - bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Pada umumnya struktur tanah mengandung bauksit dan memiliki sifat keasaman yang tinggi serta terdiri dari atas granit dan diorit yang membentuk daerah perbukitan dengan formasi batuan tersebar cukup luas berupa batu pasir.

UMKM yang telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis moneter, diharapkan akan menjadi pilar perekonomian di Kota Tanjungpinang dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah sebagaimana Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan menjadi kekuatan baru bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif terutama bagi sektor UMKM.

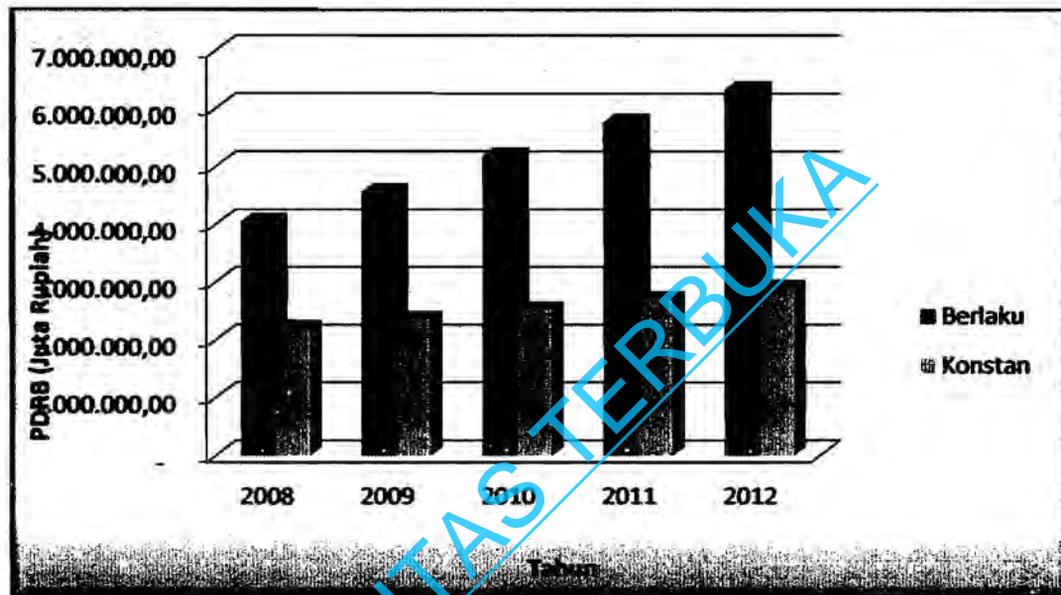
Kota Tanjungpinang yang dibentuk melalui Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 memiliki potensi perdagangan, Industri dan Jasa serta menjadi daerah tujuan wisata, juga merupakan salah satu basis kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura-*Growth Triangle*) dan *Asean Free Trade Area* (AFTA). Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

4.A.2 Perkembangan Ekonomi Tanjungpinang

Jika dilihat dari hasil perhitungan PDRB Kota Tanjungpinang tiap tahunnya, maka sub sector perdagangan dan industri pengolahan merupakan sub sector dominan penyumbang PDRB terbesar di daerah ini yaitu dengan melihat persentase data tahun 2012 dari sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,17 %. Sedangkan pada sector industri pengolahan sebesar 14,97% .Secara umum PDRB Kota Tanjungpinang terus mengalami kenaikan dari 4,048,719.43 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi 6,323,618.68 juta rupiah di tahun 2012. Berikut

mengenai perkembangan PDRB Kota Tanjungpinang dari tahun 2008 sampai dengan 2012 baik harga berlaku maupun konstan.

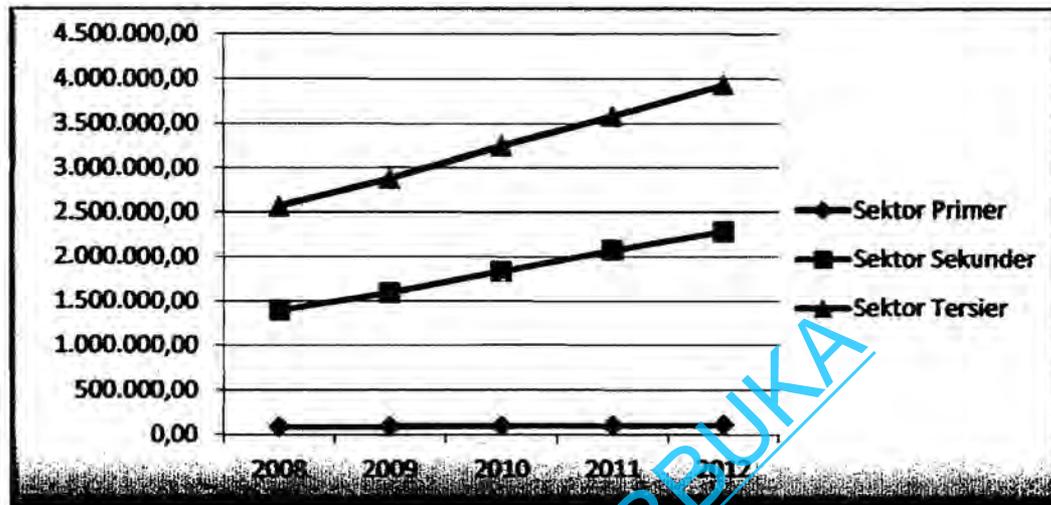
Grafik 4.1
Perkembangan PDRB Kota Tanjungpinang Tahun 2008 s.d 2012
Pada harga berlaku maupun konstan



Sumber data: BPS Kota Tanjungpinang

Struktur perekonomian Kota Tanjungpinang didominasi oleh sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, serta sektor jasa-jasa. Sektor ini memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB daerah sebesar 63.36 % pada tahun 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi sebesar 62.17%. Fenomena perubahan struktur ekonomi Kota Tanjungpinang yang terjadi pada sektor tersier menunjukkan pergeseran yang mengarah pada sektor perdagangan dan pengangkutan serta sektor jasa-jasa.

Grafik 4.2
Distribusi PDRB Kota Tanjungpinang Menurut Sektor Tahun 2008 -2012,
Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber data BPS Kota Tanjungpinang

Perkembangan tersebut merupakan kecenderungan yang lazim terjadi di berbagai kota, namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi berbagai hal berikut, yang pertama, kesiapan infrastruktur Kota Tanjungpinang dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini, karena dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk, kelancaran lalu lintas, masalah lingkungan seperti meningkatnya volume sampah dan masih banyak lagi. Kedua adalah seberapa besar peran masyarakat Kota Tanjungpinang dalam sektor ini, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat kelompok tertentu dan masyarakat dari luar Kota Tanjungpinang. Bila hal ini sampai terjadi, maka yang akan memperoleh manfaat dari kemajuan sektor tersier ini akan keluar dari Kota Tanjungpinang. Ketiga, terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan di kemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan berdampak positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya. Sektor sekunder, khususnya dari sektor industri pengolahan dan bangunan masih cukup besar peranannya terhadap PDRB Kota Tanjungpinang dan proporsinya mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun terutama untuk sektor bangunan dimana sejak ditetapkannya Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan rumah semakin meningkat juga, sehingga sektor bangunan pada Tahun 2012 menjadi sektor kedua terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kota Tanjungpinang setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Bila pada tahun 2008 kontribusi sektor sekunder mencapai 34.47 %, pada tahun 2012 kontribusinya meningkat menjadi 36.09 %. Masih tingginya peran sektor industri pengolahan ini perlu mendapat perhatian, terutama keterkaitannya dengan semakin menurunnya peran sektor primer. Ini dapat menggambarkan bahwa dominasi bahan baku untuk industri khususnya industri makanan berasal dari luar wilayah. Bila hal ini terjadi, maka ketergantungan pada daerah lain akan semakin meningkat, sedangkan dari sisi biaya produksi akan memicu kenaikan yang berdampak pada daya saing hasil industri pengolahan dari Kota Tanjungpinang sehingga perdagangan di Kota Tanjungpinang dapat memberikan kontribusi yang sangat baik, hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM di dalam mengembangkan usahanya di kota ini. Dari hasil pembahasan tersebut, maka penulis menampilkan tentang perkembangan PDRB Kota Tanjungpinang dari sisi sektoral dan sub sektoral dari produksi yang dihasilkan dari tahun 2008 s.d 2012 atas dasar harga berlaku dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TANJUNGPINANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 - 2012 (JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010*	2011*	2012**
I. PERTANIAN	85,604.30	88,635.51	94,690.94	108,293.96	106,383.87
a. Tanaman Bahan Makanan	10,949.39	11,057.62	11,899.67	12,415.39	12,635.66
b. Tanaman Perkebunan	738.47	761.04	807.04	864.17	841.28
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	58,565.67	60,676.96	64,598.47	67,838.91	69,735.17
d. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabel 4.1 Lanjutan

e. Perikanan	15,350.97	16,139.90	17,385.76	19,175.50	23,171.76
2. PERTAMBANGAN & PENGALIAN	2,410.15	2,686.25	2,984.31	3,215.71	3,573.25
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	2,410.15	2,686.25	2,984.31	3,215.71	3,573.25
c. Pengalihan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	672,147.54	733,652.80	809,363.31	873,578.53	941,913.55
a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas	672,147.54	733,652.80	809,363.31	873,578.53	941,913.55
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	29,096.84	33,316.41	40,971.92	43,505.65	48,799.14
a. Listrik	24,789.17	28,702.30	35,578.91	37,736.76	42,138.30
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	4,307.67	4,614.10	5,393.01	5,768.89	6,660.85
5. BANGUNAN	793,347.40	826,179.47	983,198.10	1,157,536.73	1,291,431.60
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1,149,952.71	1,321,109.16	1,513,646.58	1,673,753.63	1,808,893.71
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,045,562.65	1,202,403.53	1,379,288.50	1,525,635.07	1,647,218.55
b. Hotel	73,072.79	83,248.47	93,128.07	102,725.71	109,725.11
c. Restoran	31,317.27	35,457.15	41,330.25	45,392.86	51,652.06
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	719,303.58	773,714.27	864,192.97	948,861.29	1,049,759.26
a. Pengangkutan	660,540.02	704,253.37	789,273.79	848,969.11	965,860.10
1. Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	414,866.51	428,885.89	473,137.91	525,822.06	587,474.78
3. Angkutan Laut	203,024.61	226,460.66	261,064.64	280,429.25	308,741.79
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	1,731.49	2,144.71	2,419.55	2,825.29	3,329.09
6. Jasa Penunjang Angkutan	40,911.40	46,762.75	52,651.69	59,892.51	66,314.44
b. Komunikasi	58,763.56	69,460.28	74,919.19	79,892.18	83,899.17
1. Pos dan Telekomunikasi	58,763.56	69,460.28	74,919.19	79,892.18	83,899.17
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	303,007.08	351,907.24	400,115.47	453,867.36	494,025.36
a. Bank	89,713.63	104,588.69	118,227.24	129,474.2145	145,144.35
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	25,520.94	29,541.83	31,515.59	33,215.55618	35,990.40
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	182,975.69	212,735.84	244,853.86	285,527.46	306,623.45
e. Jasa Perusahaan	4,796.82	5,040.88	5,518.78	5,650.1251	6,267.16
9. JASA-JASA	392,953.02	430,124.20	467,994.65	505,393.15	549,136.94
a. Pemerintahan Umum	259,869.71	283,105.27	307,104.81	331,532.07	363,072.89
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	259,869.71	283,105.27	307,104.81	331,532.07	363,072.89
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	133,083.31	147,018.93	160,889.84	173,861.08	186,064.05
1. Sosial Kemasyarakatan	28,868.58	31,309.52	33,708.50	36,736.81	40,384.31
2. Hiburan & Rekreasi	29,154.92	27,634.05	29,077.49	31,365.54	33,795.75
3. Perawatan & Rumah tangga	75,059.81	88,075.35	98,103.84	105,758.73	111,883.99
PDRB TANPA MIGAS	4,147,822.82	4,561,325.30	5,177,158.35	5,759,998.02	6,293,618.68

Sumber data : BPS Kota Tanjungpinang

4.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang di ukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000. Kondisi daerah yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan perekonomian yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mengalami perkembangan yang cukup menggembarakan, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang yang mencapai 7.09% pada tahun 2012, dimana nilai pertumbuhan tersebut berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 6.23 %. Hal ini bisa terjadi karena langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik pemerintah maupun pihak swasta dengan berbagai inovasi program dan ide - ide yang tepat sehingga memacu seluruh sektor-sektor ekonomi mencapai hasil yang maksimal. Selama periode tiga tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 7,09 %, menurut perhitungan BPS Kota Tanjungpinang hal ini disebabkan seiring dengan membaiknya kondisi finansial global meskipun tetap perlu diantisipasi adanya kemungkinan krisis baru.

B. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Disperindagkop-UMKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Disperindagkop-UMKM.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disperindagkop-UMKM menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindagkop-UMKM;
- pemberian layanan di bidang perindagkop-UMKM;
- pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perindagkop-UMKM;
- pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dibawah ini merupakan tugas pokok dan fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan yang membantu bidang UMKM didalam menyusun program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan program dan pelaporan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) di bidang perindagkop-UMKM;
- penyelenggaraan koordinasi penyusunan program kerja Dinas;
- penyelenggaraan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data;
- penyelenggaraan pengelolaan statistik mengenai kegiatan Dinas;
- penyelenggaraan sistem informasi manajemen bidang perindagkop-UMKM;
- penyelenggaraan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan;
- penyelenggaraan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi; dan
- pelaksanaan tugas lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi pada bidang Koperasi dan UMKM pada dinas tersebut yang berhubungan langsung dengan pelaku UMKM dalam melaksanakan tugasnya sebagai bidang yang menjalankan program bagi pelaku usaha di Kota Tanjungpinang dengan penjabaran sebagai berikut :

4.2.1 Bidang Koperasi dan UMKM

- Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Koperasi dan UMKM.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis dibidang perkoperasian dan UMKM;

- pelaksanaan urusan otonomi daerah dibidang perkoperasian dan UMKM;
- pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perkoperasian dan UMKM;
- pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dari bidang Koperasi dan UMKM tersebut, maka di rincikan dengan pembagian dari masing – masing seksi untuk membantu kelancaran terhadap tugas – tugas yang sudah diberikan yaitu :

A. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi

(1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan dan pengembangan koperasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kelembagaan dan pengembangan koperasi;
- peningkatan kualitas manajemen organisasi dan usaha koperasi;
- peningkatan kinerja koperasi sehingga menjadi koperasi berkualitas mandiri;
- peningkatan citra koperasi dengan membangun kepercayaan masyarakat, lembaga keuangan dan mitra bisnis koperasi;
- pengembangan peran serta masyarakat dan peningkatan sinergi instansi pemerintah serta dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan UMKM di bidang pembinaan dan pengembangan UMKM.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan dan pengembangan UMKM;
- penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis operasional pembinaan dan pengembangan UMKM;
- pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan dan pengembangan UMKM;
- pendataan usaha yang potensial untuk pola kemitraan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan pengembangan UMKM; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Seksi Pemasaran UMKM

(1) Seksi Pemasaran UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan UMKM di bidang Pemasaran UMKM.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran UMKM menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program dibidang pemasaran UMKM;
- penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis operasional pemasaran UMKM;
- pemberian bimbingan teknis mengenai pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- peningkatan kemampuan manajemen pemasaran;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemasaran UMKM; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum pembangunan Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program kepala daerah, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran dari visi, misi, prioritas dan strategi pembangunan di Kota Tanjungpinang dalam jangka waktu yang akan datang. Berdasarkan visi Kota Tanjungpinang serta analisis potensi daerah, maka yang menjadi prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang salah satunya adalah "Peningkatan Kinerja Sektor Perekonomian" yaitu dengan peningkatan kinerja sektor perekonomian diarahkan pada pengembangan aktifitas industri, perdagangan serta pengembangan

UMKM. Hal tersebut bisa di lihat dari berbagai program prioritas yang berhubungan dengan pengembangan perekonomian di Kota Tanjungpinang seperti:

- Program peningkatan iklim investasi dan kepastian usaha yang kondusif
- Program peningkatan iklim investasi dan dunia usaha
- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Program pengembangan Koperasi dan UKM
- Program peningkatan keterampilan IKM dan UKM nelayan
- Program fasilitas dan pengembangan usaha bagi UMKM

Program kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan usaha mikro kecil menengah yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, terdiri dari 5 kegiatan yang diantaranya adalah :

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- Pelatihan dan bimbingan usaha bagi pelaku usaha kota Tanjungpinang
- Bimbingan teknis pengawasan pembinaan dan penagihan pinjaman modal UKM Kota Tanjungpinang
- Fasilitas pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
- Pelatihan teknis peningkatan kualitas produk UMKM

2. Program pemberdayaan UKM, terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan penguasaan sertifikat hak atas tanah bagi pelaku UKM

3. Program pembinaan PKL dan asongan terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

- Pengadaan pasar murah
 - Sosialisasi dan penertiban PKL dan asongan
 - Peningkatan fasilitas akau Kota Tanjungpinang
 - Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, terdiri dari 7 kegiatan yaitu :
- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
 - Pengadaan gerobak jualan bagi UKM
 - Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM
 - Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang
 - Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang
 - Penyelenggaraan promosi produk UMKM
 - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UKM
5. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
- Studi kasus pengembangan kawasan bagi pelaku UKM
 - Pembinaan UMKM dan koperasi di Kelurahan
 - Fasilitas kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
6. Program rumah tangga miskin usaha kecil menengah yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
- Pembinaan usaha warung usaha kecil rumah tangga rentan miskin

Berikut ini penulis akan memberikan data ringkasan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan urusan UMKM sebagaimana tersebut diatas selama periode 2008 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran
Bidang Usaha Mikro Keci Menengah di Kota Tanjungpinang

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi
2008	963.200.000	831.246.219	86,30
2009	1.661.197.000	1.297.804.092	78,12
2010	1.780.825.000	1.579.312.055	88,68
2011	2.288.372.500	2.204.372.213	96,33
2012	2.896.786.500	1.087.416.890	37,54
Jumlah	9.590.381.000	7.000.550.579	72,99

Sumber data : Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Tanjungpinang

Pelaksanaan program pembangunan sektor UMKM oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan sebuah kolektifitas dari program-program pelaksanaan pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling terkait satu dengan lainnya, namun demikian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang mengemban amanah pengembangan UMKM adalah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Meskipun rencana kerja (renja) secara kolektif SKPD - SKPD terkait bersama-sama dalam tiap tahun anggaran belanja daerah yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 - 2013 dan rencana strategis SKPD terkait tersebut dan telah melalui mekanisme Musrenbang (*Bottom-Up*) tiap tahun anggarannya, namun masih juga kita mendengar keluhan dari para pelaku usaha baik dari sisi kurangnya permodalan, aksesibilitas, sarana prasarana, persyaratan pengajuan kredit (agunan) serta pemasaran hasil produksi yang dihadapi selama ini.

Program kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan usaha mikro kecil menengah yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 6 (enam) program yaitu :

- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Program pemberdayaan UKM
- Program pembinaan PKL dan asongan
- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- Program penciptaan iklim UKM yang kondusif
- Program rumah tangga miskin usaha kecil menengah

Dengan melalui program – program tersebut di atas, maka diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat, karena UMKM merupakan suatu badan usaha yang berbasis kerakyatan dalam meningkatkan ekonomi daerah. Ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku – pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk di dalamnya ada UMKM.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada 100 (seratus) pengusaha UMKM di Kota Tanjungpinang dan pejabat yang berwenang langsung terhadap program/ kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil. Total populasi yang tercatat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan PM Kota Tanjungpinang sebanyak 3.071 UMKM yang memiliki izin

usahnya di Kota Tanjungpinang. Namun ada juga data yang didapat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM yang mencatat bahwa data UMKM di Kota Tanjungpinang baik yang memiliki izin usaha dan yang tidak memiliki izin usaha sebanyak 4.242 UMKM.

Dari 100 (seratus) responden tersebut yang sudah diperoleh datanya, maka penulis perlu menyajikan dalam bentuk tabel agar dapat memudahkan dalam memberikan informasi terkait tentang perkembangan UMKM yang disesuaikan dengan kuesioner dari pelaku – pelaku usaha yang selama ini di bina oleh SKPD terkait Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dalam hal ini penulis memberikan ulasan tentang hasil yang didapat yaitu :

4.3.1 Karakteristik UMKM di Tanjungpinang

Karakteristik UMKM yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu status usaha, pendidikan pengusaha, tahun berdiri, Status perusahaan, sumber modal, omzet perusahaan per bulan, keuntungan perusahaan, jumlah tenaga kerja menurut sektor pendidikan, jarak ke tempat penjualan, lama usaha, sumber modal, pengalaman ikut pelatihan dan modal awal. diperoleh hasil sebagai berikut:

4.3.1.1 Status usaha

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya yang membedakan antara usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-undang no 20 tahun 2008 yaitu Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta rupiah, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar yaitu sekitar 300 juta rupiah, usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 juta rupiah atau

paling banyak 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga maksimum 2,5 Milyar rupiah sedangkan usaha menengah yaitu perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah hingga paling banyak 10 Milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas 2,5 M rupiah dan paling banyak 50 Milyar rupiah.

Tabel 4.3. Jenis Usaha UMKM

Jenis Usaha	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
Mikro	91	91,0
Kecil	9	9,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan data pada tabel 4.3, dari 100 UMKM, yang termasuk kedalam usaha mikro sekitar 91 persen (91 usaha) dan sisanya termasuk kedalam kategori kecil yaitu sekitar 9 perusahaan. Dalam penentuan sampel, sebenarnya sudah dialokasikan untuk UMKM yang termasuk kedalam kategori menengah namun pada saat dilihat dari sisi kekayaan bersih dimana suatu usaha dikatakan termasuk kategori menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun setelah dilakukan penelitian dilapangan ternyata kekayaan bersih dan hasil penjualannya tidak memenuhi syarat minimal suatu usaha dikatakan termasuk kategori menengah, hal ini memberikan gambaran kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM dalam hal mengkategorikan usahanya termasuk

kedalam kategori apa, selain dari para pelakunya itu sendiri, tidak sedikit para pegawai dari disperindagkop selaku penyedia program, masih bingung dalam menentukan kategori suatu UMKM, hal ini lah yang menyebabkan seolah-olah tidak ada pelaku UMKM berkategori menengah yang tidak terpilih sebagai sampel. Kedepannya diharapkan ada sosialisasi lebih jauh lagi dari pihak disperindagkop Kota Tanjungpinang dalam hal sosialisasi pengkategorian suatu usaha UMKM dengan melibatkan berbagai dinas dan unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM.

4.3.1.2. Pendidikan Pengusaha UMKM

Menurut Tulus Tambunan (2012:11), apabila dilihat dari sisi pendidikan, untuk pengusaha mikro, jumlah pengusaha yang berpendidikan sekolah dasar lebih banyak dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. sedangkan untuk usaha Kecil, memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha mikro.

Berdasarkan data pada tabel 4.4, sebagian besar pengusaha UMKM memiliki berpendidikan SD, dengan persentase sekitar 41 persen (41 orang), di posisi kedua yaitu pengusaha dengan pendidikan SLTA yaitu sekitar 37 persen (37 orang) dan yang paling sedikit yaitu pengusaha dengan pendidikan SLTP, sekitar 22 persen (22 orang). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tulus Tambunan yang menyatakan pengusaha mikro biasanya memiliki pendidikan yang sangat rendah.

Tabel 4.4. Pendidikan pengusaha UMKM

Pendidikan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
SD	41	41,0
SLTP	22	22,0
SMA	37	37,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan pengamatan penulis, tenaga kerja yang terlibat di sektor UMKM sebagian besar berpendidikan rendah termasuk pengusahanya hal ini disebabkan UMKM berfungsi sebagai 'penampung terakhir' (*last resort*) bagi kebanyakan orang yang berpendidikan rendah, biasanya mereka yang berpendidikan rendah, tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, terutama di sektor formal, sebagai alternatif satu-satunya untuk bertahan hidup yaitu terpaksa bekerja di atau membuka usaha UMKM. Selain itu juga usaha UMKM sangat mudah dimasuki oleh masyarakat dari berbagai lapisan dengan berbagai jenjang pendidikan, semua usaha UMKM tidak mensyaratkan syarat apapun bagi siapa saja yang mau bergerak dalam bidang UMKM, oleh karena itu UMKM merupakan sektor usaha yang bisa menampung semua kalangan masyarakat termasuk yang berpendidikan rendah, hal ini lah salah satu yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan pelaku usaha UMKM.

4.3.1.3. Tahun Berdiri UMKM

Menurut Tulus Tambunan (2012), UMKM bisa tumbuh sangat cepat dan mampu bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998. Dalam Berry dkk (2001), kelompok usaha UMKM dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau pada ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/1998 yang dialami oleh beberapa Negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa, jumlah perusahaan yang berdiri dibawah tahun 2009 ada sebanyak 61 perusahaan dengan rincian berdiri pada tahun 1998 kebawah

sekitar 10 persen (10 usaha) dan sekitar 51 persen (51 usaha) UMKM berdiri antara tahun 1999-2009 sedangkan perusahaan yang berdiri dari tahun 2010 - 2013 sekitar 39 persen (39 usaha), hal ini memberikan gambaran bahwa UMKM mampu bertahan disaat terjadi krisis baik pada saat krisis ekonomi maupun krisis global, hal ini terbukti dari sampel yang terpilih dalam penelitian sekitar 61 persen berdiri mulai dari tahun 2009 ke bawah. Berdasarkan observasi dilapangan, UMKM di Kota Tanjungpinang mampu bertahan lama dalam berbagai kondisi krisis apapun, hal ini disebabkan pertama UMKM tidak memiliki utang luar negeri, kedua tidak banyak utang UMKM ke dunia perbankan, karena mereka dianggap *unbankable*, ketiga sebagian besar UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang menggunakan input atau bahan baku lokal, sehingga efek kenaikan nilai tukar rupiah atau tingginya inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga bahan baku lokal, dan yang keempat, sudah ada UMKM di Kota Tanjungpinang yang berorientasi ekspor misalkan usaha kerajinan khas Tanjungpinang, Batik Gonggong dan sebagainya.

Tabel 4.5. Tahun Berdiri UMKM

Tahun Berdiri	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
Sebelum tahun 1998	10	10,00
1999 -2009	51	51,00
2010 – 2013	39	39,00
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan data diatas, juga bisa diambil kesimpulan bahwa, lamanya usaha UMKM di kota Tanjungpinang, paling lama sekitar 27 tahun, dengan rata-rata lamanya usaha sekitar 6,20 tahun. Keadaan ini mendukung pendapat Tulus Tambunan (2012) dan Berry dkk (2001) yang menyatakan bahwa usaha UMKM

mampu bertahan sangat lama terhadap krisis ekonomi 1997/1998 atau pun pada saat terjadi krisis Global pada tahun 2009.

Menurut Ervina 2013, beberapa alasan UMKM mampu bertahan ditengah krisis moneter ataupun krisis global dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Barang yang di produksi UMKM adalah barang konsumsi dan jasa-jasa. sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan tingkat elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan, sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.
2. Modal UMKM kebanyakan dari modal sendiri dan akses terhadap perbankan sangat rendah, bukan modal dari perbankan, implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini
3. UMKM mempunyai modal terbatas dan pasar yang bersaing dampaknya UMKM mempunyai spesialisasi produk yang ketat, hal ini memungkinkan UMKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain, hambatan keluar masuk tidak ada
4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UMKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengaaan bahan baku, akibatnya biaya produksi menurun dan efisiensi meningkat, tetapi karena adanya krisis ekonomi maka pengaruhnya tidak terlalu besar
5. Dengan adanya krisis ekonomi dan globalisasi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak yang memberhentikan pegawainya

sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal salah satunya UMKM, inilah yang menyebabkan jumlah UMKM terus meningkat.

6. Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas perhatian dari pemerintah Kota Tanjungpinang dengan berbagai program yang mendukung keberadaan UMKM, mampu membantu UMKM untuk bertahan lebih lama.

Keenam hal tersebut diatas, mampu membantu UMKM untuk bertahan dari berbagai krisis apapun yang terjadi khususnya di Kota Tanjungpinang.

4.3.1.4. Jenis Usaha UMKM

Banyak sekali barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM, termasuk untuk masyarakat kelas menengah dan atas walaupun proporsinya sangat kecil, secara umum pasar utama bagi UMKM adalah barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah, namun demikian banyak juga UMKM yang membuat barang-barang non konsumsi seperti peralatan produksi, berbagai macam alat mesin sederhana dan atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan, dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan kegiatan dibanyak sektor seperti industri, konstruksi, pertanian, perdagangan, pariwisata dan transportasi. (Tulus Tambunan, 2012).

Dari Tabel 4.6, sekitar 66 persen UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang bergerak di sektor perdagangan yang terdiri dari 34 persen UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang, bergerak disektor perdagangan barang. Sebagian besar dari usaha UMKM bergerak di sektor perdagangan yang terdiri dari jualan bubur ayam, kue, mainan anak, sayuran, pot bunga, bakso, gorengan, jagung bakar,

ketoprak, makanan dan minuman, otak-otak, souvenir, bakso, air minum isi ulang serta ATK dan gorden, kemudian diikuti yang bergerak di sektor warung makan/kedai kopi (perdagangan makanan) yaitu sekitar 32 persen. Setelah sektor perdagangan, kemudian diikuti oleh sektor industri sekitar 25 persen yang terdiri dari industri kerupuk, keripik singkong, keripik tempe, keripik ubi, kue basah dan kue kering, mie kering, roti dan pengolahan bawang dan yang terakhir adalah Sektor jasa-jasa sekitar 9 persen yang terdiri dari 6 persen bergerak dalam jasa menjahit, 2 persen bergerak dalam jasa bengkel dan 1 persen bergerak dalam jasa tambal ban.

Tabel 4.6. Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Perdagangan	66	66,00
Industri	25	25,00
jasa-jasa	9	9,00
Total	100	100,00

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan

Berdasarkan keterangan diatas, sektor UMKM banyak bergerak dalam bidang yang menghasilkan barang-barang dan jasa konsumsi sederhana yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum.

4.3.1.5. Sumber Modal

Menurut Tulus Tambunan (2012), pada umumnya pengusaha - pengusaha UMKM membiayai sebagian besar operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, para pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka para konsumen. karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan peranan penting lainnya yaitu sebagai alat untuk mengalokasikan

tabungan - tabungan pedesaan, yang kalau tidak akan digunakan untuk maksud - maksud yang tidak produktif. Berdasarkan hasil data BPS yang dilakukan pada tahun 2005 terhadap usaha mikro dan kecil, sebagian besar UMK di Indonesia sumber modal usahanya yaitu berasal dari modal sendiri, kemudian diikuti oleh modal sendiri dan pinjaman, dan yang terakhir semuanya berasal dari pinjaman.

Tabel 4.7.sumber modal UMKM

Sumber Modal	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Modal sendiri	96	96,00
Pinjaman	2	2,00
Modal sendiri dan pinjaman	2	2,00
Total	100	100,00

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan data pada tabel 4.7, terlihat bahwa sekitar 96 persen UMK yang ada di Kota Tanjungpinang menggunakan modal sendiri sebagai sumber modal usahanya, kemudian yang menggunakan pinjaman dan gabungan antara modal sendiri dan pinjaman, masing-masing sebesar 2 persen. Hal ini sesuai dengan pendapat Tulus Tambunan (2012), Pada umumnya pemilik UMK adalah keluarga miskin yang nilai total asetnya seperti rumah atau tanah tidak memenuhi nilai jaminan yang diharuskan oleh perbankan, sehingga UMK cenderung lebih menggunakan dana sendiri dibandingkan pinjaman. Selain itu juga sesuai dengan pendapat Jumhur (2006) dalam Tulus Tambunan (2012 : 158) yang menyatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi usaha kecil adalah kesulitan permodalan, terutama kesulitan untuk mengakses dana dari pihak perbankan, karena persyaratan yang tidak bisa terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, pinjaman yang diperoleh UMK berasal dari beberapa instansi yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungpinang yaitu dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta yang berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk UMK dengan sumber permodalan usahanya merupakan gabungan dari modal sendiri dan pinjaman, memiliki proporsi masing - masing 80 atau 70 persen yang berasal dari modal sendiri serta 20 atau 30 persen yang berasal dari pinjaman.

Para pelaku UMKM yang ada di kota Tanjungpinang sebagian besar banyak yang menggunakan modal sendiri, berdasarkan hasil observasi dilapangan hal ini dikarenakan untuk bergerak di sektor dalam bidang UMKM tidak memerlukan banyak modal untuk memulai menggeluti bidang ini, faktor ini lah yang menyebabkan sektor UMKM tidak membutuhkan modal awal yang terlalu besar, sehingga modal tersebut bisa langsung menggunakan modal yang berasal dari pelaku UMKM yang bersangkutan, alasan kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu kesulitan para pelaku UMKM yaitu akses terhadap perbankan sangat rendah karena mereka dianggap *unbankable* hal ini lah yang menyebabkan para pelaku UMKM banyak yang menggunakan modal yang bersumber dari modal sendiri.

4.3.1.6. Omzet perusahaan

Sebagaiman telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan UU No 20 tahun 2008 pasal 6 UU menyebutkan bahwa, usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah, untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan antara 300 juta sampe 2,5 Milyar rupiah dan untuk usaha menengah memiliki hasil

penjualan antara 2,5 Milyar rupiah sampai dengan 50 Milyar rupiah.

Tabel 4.8. Nilai rata-rata dan nilai maksimum omzet perusahaan dan keuntungan perusahaan per bulan.

Uraian	Maksimum	Rata-rata hitung
[1]	[2]	[3]
Omzet perusahaan per bulan	56.700.000	4.213.100
Keuntungan Perusahaan per bulan	6.500.000	1.709.116

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan sampel yang dikumpulkan, rata omzet perusahaan per bulan usaha UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu sebesar Rp. 4.213.100,00 atau sekitar Rp.50.557.200,00 setahun dengan nilai omzet terbesar sebesar 56.700.000,00 atau sekitar Rp. 680.400.000,00 per tahun sedangkan keuntungan bersih perusahaan UMKM per bulan memiliki rata-rata Rp. 1.709.116,00 atau sekitar Rp.20.509.392,00 dengan keuntungan bersih maksimum sebesar Rp.6.500.000,00 atau sekitar Rp. 78.000.000,00 per tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengklasifikasian UMKM sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

4.3.1.7. Tenaga kerja di sektor UMKM

Sektor UMKM tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga memudahkan bagi lulusan apapun untuk masuk kedalam sektor ini selain itu juga menurut Tulus Tambunan (2012:7), apabila dilihat dari sisi pendidikan, untuk usaha mikro, memiliki tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin dengan motivasi utama yaitu untuk survival. sedangkan untuk usaha Kecil, memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha mikro.

Berdasarkan data pada tabel 4.9. Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan, paling banyak lulusan SLTP ke bawah, sekitar 72,22 persen tenaga kerja di sektor UMKM lulusan SLTP ke bawah. dengan rincian 38,89

persen lulusan SD/ sederajat, 31,25 persen lulusan SLTP/ sederajat dan 2,08 persen tidak/ belum pernah sekolah. Sedangkan yang lulusan SLTA/ sederajat sekitar 27,78 persen. Hal tersebut mendukung pernyataan dari Tulus tambunan (2012) yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang terlibat di sektor UMKM sebagian besar berpendidikan rendah. selain itu juga UMKM berfungsi sebagai 'penampung terakhir' (*last resort*) bagi kebanyakan orang yang berpendidikan rendah, biasanya mereka yang berpendidikan rendah, tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, terutama di sektor formal, sebagai alternatif satu satunya untuk bertahan hidup yaitu terpaksa bekerja di atau membuka usaha UMKM (Tulus Tambunan, 2012:40).

Tabel 4.9. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM menurut jenjang tertinggi pendidikan yang ditamatkan

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak/ belum sekolah	3	2,08
SD/ Sederajat	56	38,89
SLTP/ Sederajat	45	31,25
SLTA/ Sederajat	40	27,78
Jumlah	144	100,00

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Beberapa pihak, mendefenisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan. Pendekatan batasan kegiatan informal lainnya diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Matrik Batasan Kegiatan Informal

Jenis Pekerjaan Utama	Status Pekerjaan						
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	Buruh/Karyawan/Pegawai	Pekerja Bebas di Pertanian	Pekerja Bebas di Non Pertanian	Pekerja Tak Dibayar
Tenaga Profesional	F	F	F	F	F	F	INF
Tenaga Kepemimpinan	F	F	F	F	F	F	INF
Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	F	F	F	F	F	F	INF
Tenaga Penjualan	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Tenaga Usaha Jasa	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Tenaga Usaha Pertanian	INF	INF	F	F	INF	INF	INF
Tenaga Produksi	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Tenaga Operasional	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Pekerja Kasar	INF	F	F	F	INF	INF	INF
Lainnya	INF	INF	F	F	INF	INF	INF

Catatan : F= Formal
INF=Informal
(ILO, 2002).

Sedangkan pada perkembangannya, untuk menentukan sektor formal atau informal hanya dilihat dari status pekerjaannya saja, dikatakan formal yaitu yang memiliki status pekerjaan dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan status pekerjaan sisanya dimasukkan kedalam sektor informal (BPS, 2012).

Tabel. 4.11. Jumlah pelaku UMKM menurut tenaga kerja

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tenaga kerja ≤ 1	89	89,00
Tenaga kerja > 2 dan memiliki karyawan di bayar	11	11,00
Total	100	100,00

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, jumlah pelaku UMKM yang mempekerjakan pekerja dibayar/buruh dibayar (sektor formal) selain yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak dibayar/dibantu pekerja keluarga ada sebanyak 11 persen sedangkan yang memiliki tenaga kerja ≤ 1 yaitu pelaku UMKM yang memiliki status pekerjaan berusaha sendiri atau dibantu pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar (sektor informal) ada sebanyak 89 persen. pelaku UMKM yang banyak terdapat pekerja formalnya, bergerak dalam bidang industri kerupuk, industri keripik, industri kue, industri tahu-tempe, menjahit, warung kelontong dan warung makanan minuman. sedangkan yang banyak pekerja sektor informalnya seperti jualan bubur ayam, jualan kue, jualan mainan anak, jualan bakso, jualan gorengan, jualan jagung bakar, ketoprak jualan bakso dan kue basah.

Tabel 4.12. Tenaga kerja menurut sektor usaha dan jenjang pendidikan yang ditamatkan

Sektor usaha	Tidak sekolah	SD/ sederajat	SLTP sederajat	SLTA sederajat	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Formal	0	12	14	15	41
Informal	3	44	31	25	103
Jumlah	3	56	45	40	144

Sumber : Hasil Olahan data lapangan

Apabila diperhatikan data pada tabel diatas, sebagian besar sebagian besar tenaga kerja yang bergerak dalam bidang UMKM paling banyak bergerak dalam sektor formal, sekitar 71,53 persen (103 orang) bergerak dalam sektor informal dan sekitar 28,47 persen (41 orang) bergerak dalam sektor formal. Hal ini menunjukkan bagi tenaga kerja yang bergerak dalam sektor UMKM, untuk yang tenaga kerja yang tidak sekolah, hampir 100 persen (3 Orang) terserap di sektor Informal, bagi yang lulusan SD/ sederajat, 78,57 persen (44 orang) terserap di sektor

informal dan 21,43 persen (12 orang) terserap disektor formal. Untuk tenaga kerja berpendidikan SLTP/ sederajat, sekitar 68,89 persen (31 orang) terserap disektor informal dan 31,11 persen (14 orang) bergerak dalam sektor formal sedangkan bagi tenaga kerja lulusan SLTA/ sederajat, sekitar 62,50 persen (25 orang) terserap di sektor informal dan 37,50 persen (15 orang) bergerak dalam sektor formal

Berdasarkan keterangan tersebut, sebagian besar tenaga kerja di sektor UMKM banyak terserap di sektor informal, hal ini disebabkan sektor informal sangat mudah menyerap tenaga kerja, sektor informal tidak mensyaratkan apapun bagi tenaga kerja siapa saja yang akan mencoba sektor informal tersebut.

4.3.1.8. Jarak ketempat usaha.

Jarak tempat usaha merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjaga kontinuitas dengan responden.

Tabel 4.13. Jarak ketempat Usaha

Jarak Ketempat usaha	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
≤ 1	72	72,0
2	5	5,0
3	8	8,0
4	8	8,0
5	2	2,0
6	2	2,0
10	3	3,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan data pada tabel diatas, 72 persen usaha UMKM di Kota Tanjungpinang memiliki jarak ke tempat usaha dari tempat tinggalnya yaitu sekitar ≤ 1 KM, dan sisanya sebanyak 28 persen memiliki jarak ≥ 2 Km dari tempat tinggalnya sedangkan paling jauh memiliki jarak ke tempat usaha yaitu 10 KM

sebanyak 3 persen. Rata-rata jarak ke tempat usaha dari tempat tinggal nya yaitu sekitar 1,41 KM.

Sekitar 72 persen pelaku UMKM memiliki jarak ketempat usaha kurang dari 1 KM, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM tersebut kebanyakan menggunakan lahan/sebagian rumahnya untuk melakukan usaha sehingga, berdasarkan pengamatan dilapangan, mereka tidak mampu menyewa tempat usaha misalkan ruko diluar rumahnya, hal ini dikarenakan terbatasnya modal yang mereka miliki serta tingginya harga sewa tempat usaha/ruko.

Berdasarkan keterangan diatas, sekitar 3 persen para pelaku UMKM memiliki jarak usaha sekitar 10 KM, pelaku tersebut yaitu industri roti dan industri kerupuk, mereka memilih tempat usaha yang jauh dari tempat tinggalnya dikarenakan mereka mencari tempat usaha yang murah, sehingga walaupun jauh tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan bagi mereka selain itu juga, jarak ke tempat usaha agak jauh hal ini dikarenakan mereka mencari tempat usaha yang agak jauh dari lingkungan warga, untuk meminimalisir dampak pencemaran langsung yang dapat dirasakan oleh warga sekitar sebagai akibat didirikannya industri atau pabrik tersebut.

4.3.1.9. Pengalaman ikut Pelatihan

Pengusaha dan tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM biasanya memiliki pendidikan rendah, dengan keahlian yang sangat terbatas. Salah satu cara agar mereka mampu bersaing dengan usaha lainnya yaitu melalui proses pembekalan dengan mengikutsertakan mereka kedalam berbagai pelatihan yang berhubungan dengan UMKM. Pelatihan tersebut diantaranya yaitu pelatihan kewirausahaan bagi

pelaku usaha ditambah lagi dengan pelatihan kemasan produk daerah.

Apabila kita perhatikan, berdasarkan sampel dalam penelitian sekarang, sebagian besar usaha UMKM belum pernah mengikuti pelatihan, sekitar 97 persen usaha UMKM belum pernah mengikuti pelatihan pembekalan usaha UMKM dan sisanya sekitar 3 persen sudah pernah mengikuti pelatihan.

Tabel 4.14. Pengalaman UMKM dalam mengikuti pelatihan

Jumlah Pelatihan yang pernah diikuti	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
0	97	97,0
1	2	2,0
5	1	1,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar para pelaku UMKM di kota Tanjungpinang sangat antusias untuk mengikuti pelatihan, hal ini dikarenakan dengan adanya pelatihan, mereka dapat mendapatkan pengetahuan tambahan yang bisa digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha nya tetapi karena keterbatasan jumlah peserta pelatihan yang bisa mengikuti pelatihan dan kurangnya informasi mengenai pelatihan UMKM mengakibatkan sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang banyak yang belum pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan UMKM.

4.3.1.10 Modal awal UMKM

Permodalan merupakan hambatan yang sering terjadi pada dunia usaha kecil. Ada sejumlah persoalan umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di negara berkembang termasuk juga di Kota Tanjungpinang. Hambatan

tersebut diantaranya yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi (Tulus Tambunan, 2012:53).

Tabel 4.15. Modal awal UMKM

Modal Awal	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
$\leq 1.000.000$	35	35,00
$1.000.000 < x \leq 5.000.000$	55	55,00
$5.000.000 < x \leq 15.000.000$	8	8,00
$15.000.000 < x \leq 40.000.000$	2	2,00
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Modal awal UMKM Kota Tanjungpinang, menurut data pada tabel 4.15 relatif sangat kecil sekali. 90 persen UMKM di Kota Tanjungpinang memiliki modal awal 5 juta kebawah dengan rincian jumlah UMKM dengan modal awal 1 juta kebawah sekitar 35 persen dan diantara 1 juta sampai dengan 5 juta sekitar 55 persen. sedangkan yang memiliki modal awal antara 5 juta sampai dengan 15 juta sebanyak 8 persen dan yang memiliki modal awa antara 15 juta sampai 40 juta ada sekitar 2 persen. Ini memberikan gambaran bahwa, modal awal UMKM di Kota Tanjungpinang relatif sangat kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, pelaku usaha yang memiliki modal dibawah satu juta yaitu diantaranya yaitu pedagang kue, makanan dan minuman, penjual otak-otak, penjual jagung bakar, pedagang sayur penjual bakso dan usaha tambal ban. sedangkan yang memiliki modal antar 1 juta sampai 5 juta diantaranya yaitu warung kelontong, ada juga warung makanan dan minuman, penjual bakso, indutri keripik, industri kue, keripik ubi, industri tahu tempe, usaha menjahit,penjual tanaman hias, industri pengolahan bawang dan usaha bengkel. pelaku UMKM yang memiliki modal awal antara 5 sampai 15 juta yaitu pedagang

mainan anak, industri kerupuk yang relatif besar, warung makan yang lumayan besar, percetakan, industri kerupuk serta air minum isi ulang, biasanya modal yang relatif esar digunakan untuk membeli barang modal yang relatif mahal.

Untuk pelaku usaha dengan modal awal antara 15 sampai 40 juta yaitu industri roti dan yang membuka usaha warung kelontong yang sangat besar atau mendekati distributor.

4.3.2. Beberapa hal tentang bantuan bagi UMKM di Kota Tanjungpinang

Kegiatan evaluasi dalam penelitian ini, meliputi evaluasi proses, evaluasi dampak dan evaluasi strategi berdasarkan dari proses dan dampak.

4.3.2.1. Penjelasan dari pemerintah daerah tentang dukungan permodalan

Dukungan usaha UMKM bukan saja dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, tetapi juga dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selain itu juga ada dari beberapa BUMN. Dukungan usaha tersebut akan sangat berarti apabila ditunjang oleh sosialisai kegiatan yang memadai.

Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar UMKM di Indonesia termasuk juga di Tanjungpinang adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui berbagai SKPD yang ada mengadakan berbagai program, diantaranya yaitu berusaha memberikan bantuan berupa dukungan permodalan bagi UMKM yang ada, tetapi walaupun demikian sangat disayangkan, berdasarkan data pada tabel 4.15, sekitar 91 persen UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang menganggap tidak pernah ada penjelasan dari pemerintah daerah tentang program adanya dukungan permodalan dan 9 persen sisanya pernah mendengar penjelasan pemerintah daerah tentang dukungan

permodalan, hal ini menunjukkan rendahnya sosialisasi program pemerintah tentang dukungan permodalan bagi UMKM di Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.16. Pernah ada penjelasan dari pemerintah daerah tentang dukungan permodalan

Uraian	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
Pernah	9	9,0
Tidak Pernah	91	91,0
Total	100	100,0

sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan hasil pengamatan lainnya mengenai informasi memperoleh informasi tentang program bantuan tersebut, sekitar 96,67 persen pelaku UMKM mengetahui informasi tersebut dari pegawai/aparat pemerintah dan sekitar 13,33 persen mengetahui dari pihak lainnya, diantaranya yaitu dari sesama pelaku UMKM.

4.3.2.2. Pernah tidaknya mendengar tentang program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka mendukung keberadaan UMKM, mengadakan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah diantaranya melalui sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pengadaan gerobak jualan bagi UKM, Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang, Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang, Penyelenggaraan promosi produk UMKM dan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UKM.

Program ini sudah dilakukan selama 5 tahun berturut - turut dari tahun 2008 s.d 2012, namun walaupun demikian sekitar 88 persen UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang tidak pernah mendengar tentang program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah dan sisanya sekitar 18 persen pernah mendengar tentang program tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, menurut para pelaku UMKM, Hal ini menunjukkan rendahnya sosialisasi program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Tetapi berbeda dengan pendapat dari nara sumber yang berasal dari Disperindagkop Kota Tanjungpinang dinas sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi sebelum program tersebut digulirkan, menurut dinas, banyaknya para pelaku UMKM yang tidak tahu tentang program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah hal ini disebabkan para pelaku UMKM itu tahunya hanya bantuan uang/permodalan saja padahal itu merupakan sebenarnya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan sosialisasi yang lebih giat lagi dengan menjelaskan lebih detail lagi bagi para pelaku UMKM mengenai bantuan apa yang akan segera diluncurkan untuk mendukung perkembangan UMKM di kota Tanjungpinang.

Tabl 4.17. Pernah tidaknya mendengar program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Pernah	12	12,0
Tidak Pernah	88	88,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

4.3.2.3 Pernah tidaknya mendapatkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM telah memberikan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 100 usaha UMKM, 60 persen diantaranya pernah mendapatkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan sisanya sebanyak 40 persen belum pernah mendapatkan bantuan dari program tersebut.

Tabel 4.18. Pernah mendapatkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Pernah	60	60,0
Tidak Pernah	40	40,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari penjelasan sebelumnya, UMKM yang pernah mendengar program bantuan tersebut hanya sekitar 12 persen sedangkan yang pernah mendapatkan hampir 60 persen, hal ini memberikan gambaran bahwa ada beberapa UMKM yang

hanya menerima bantuan tanpa mengetahui jenis program yang mereka dapatkan, hal ini salah satunya disebabkan karena lemahnya sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang tentang program tersebut.

Tabel 4.19. Jumlah UMKM berdasarkan alasan tidak mendapatkan bantuan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
1. Tidak ada informasi	19	47,5
2. Tidak Tahu Prosedur	15	37,5
3. Tidak Berminat	4	10
4. Tidak ada yang mengusulkan dari RT atau pihak yang berkompeten	2	5
JUMLAH	40	100

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dari 40 persen UMKM yang belum pernah mendapatkan program bantuan tersebut, sebanyak 47,5 persen disebabkan karena tidak ada informasi mengenai program tersebut, kemudian diikuti oleh UMKM yang tidak tahu mengenai prosedur bagaimana mendapatkan bantuan dari program tersebut yaitu sekitar 37,5 persen, setelah itu diikuti oleh UMKM yang tidak berminat terhadap bantuan yang diberikan, alasan tidak berminat diantaranya dikarenakan terlalu kecilnya bantuan yang diberikan. Jumlah UMKM yang tidak berminat terhadap bantuan ini yaitu sekitar 10 persen dan yang terakhir sekitar 5 persen dari UMKM berpikir bahwa yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan bantuan hal ini disebabkan karena tidak ada yang mengusulkan dari pihak RT atau pihak lain yang dianggap berkompeten.

Berdasarkan keterangan tersebut, prosedur untuk mendapatkan program bantuan tersebut, selain merupakan usulan dari pihak RT atau pihak lain yang dianggap berkompeten, juga masing-masing UMKM bisa mengusulkan sendiri

UMKM mereka untuk mendapatkan program bantuan kemudian usulan tersebut ditindak lanjuti dengan proses verifikasi dilapangan oleh pegawai disperindagkop yang berkompeten untuk memberikan penilaian.

Bagi UMKM yang pernah mendapatkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, paling banyak mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tanpa pengembalian yaitu sekitar 81,67 persen, kemudian UMKM yang mendapatkan bantuan dalam bentuk gerobak penjualan sebanyak 16,67 persen, dan sisanya sebanyak 1,67 persen mendapatkan pinjaman uang dengan pengembalian.

Tabel 4.20 Jumlah UMKM berdasarkan bantuan yang diterima dalam program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Bantuan	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Gerobak Penjualan	10	16,67
Pinjaman Uang	1	1,67
Uang Tanpa Pengembalian	49	81,67
Total	60	100

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari semua bentuk bantuan dalam program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, berdasarkan hasil observasi dilapangan, menurut para pelaku UMKM yang pernah mendapatkan program tersebut, paling efektif yaitu bantuan berupa uang tanpa pengembalian, apabila dipergunakan dengan sebaik mungkin, uang tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya baik dari sisi permodalan, omzet ataupun jumlah tenaga kerja yang terlibat, berdasarkan keterangan dari beberapa responden, mereka menginginkan pengawasan yang ketat pada saat pembagian bantuan berupa

uang, karena bantuan tersebut sangat rawan diselewengkan apalagi bantuan uang tersebut tidak menuntut pengembalian atau berupa hibah. Kemudian dari pihak Disperindagkop Kota Tanjungpinang, mengharapkan bantuan berupa uang tersebut, benar-benar digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan UMKM, dinas berharap uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal diluar pengembangan UMKM, tidak digunakan untuk foya-foya, karena tidak sedikit berdasarkan pengamatan dinas dilapangan, uang yang mereka bagikan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna oleh para pelaku UMKM yang menerimanya. Hal ini memberikan gambaran perlunya dilakukan pengawasan dan monitoring yang ketat, baik bagi dinas sebagai penyedia program maupun bagi para pelaku UMKM sebagai objek dari program tersebut.

4.3.2.4. Frekuensi mendapatkan bantuan mendapatkan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah sudah berlangsung sejak tahun 2003 dan program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang hendaknya yang menerima bantuan dari program tersebut bergantian.

Dari hasil penelitian bahwa 96,7 persen UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 1 kali, sedangkan sisanya sebanyak 3,3 persen mendapatkan bantuan tersebut lebih dari satu kali. UMKM yang mendapatkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah lebih dari satu kali, UMKM tersebut menerima bantuan sebanyak 2 kali, ada yang tahunnya berturut - turut yaitu menerima pada

tahun 2011 dan tahun 2012 serta ada juga yang tidak berturut - turut yaitu tahun 2008 dan 2010.

Tabel 4.21. Frekuensi menerima Program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Frekuensi Menerima bantuan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
1	58	96,7
2	2	3,3
Total	60	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Untuk UMKM yang menerima bantuan lebih dari satu kali, bantuan yang mereka peroleh pada saat yang pertama dengan bantuan yang kedua itu berbeda, ada beberapa UMKM yang memperoleh bantuan pertama kali berupa uang, kemudian pada bantuan yang kedua memperoleh gerobak atau promosi usahanya.

4.3.2.5. Bentuk program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Bentuk program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah bermacam - macam, diantaranya yaitu sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, pengadaan gerobak jualan bagi UMKM, Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang, Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang, Penyelenggaraan promosi produk UMKM, Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UKM. Bagi UMKM yang mendapatkan program bantuan tersebut lebih dari satu kali, ada yang mendapatkan bantuan yang berbeda di masing-masing tahunnya, misalkan pada saat pertama kali mendapatkan bantuan permodalan berupa uang, yang kedua kalinya mendapatkan gerobak usaha.

Tetapi ada juga yang mendapatkan bantuan yang sama di 2 tahun yang berbeda, bantuan tersebut yaitu bantuan uang.

Pada penelitian ini yang mendapatkan program bantuan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan berupa uang sebanyak 81,97 persen, yang mendapatkan gerobak bantuan sekitar 14,75 persen dan yang pernah mendapatkan keduanya sekitar 3,28 persen.

Tabel 4.22. Jumlah UMKM berdasarkan bentuk program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Uraian [1]	Jumlah [2]	Persentase [3]
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	50	81,97
Pengadaan gerobak jualan bagi UKM	9	14,75
Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM	0	0
Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang	0	0
Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang	0	0
Penyelenggaraan promosi produk UMKM	0	0
Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UMKM	0	0
Bantuan permodalan dan gerobak	2	3,28

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Hasil tersebut menggambarkan bahwa program bantuan ini, dapat dirasakan secara bergilir, dan bila mendapatkan lebih dari satu kali bantuan, biasanya antara bantuan yang pertama dengan yang kedua, jenisnya berbeda. Bagi UMKM yang pernah mendapatkan bantuan berupa sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan sekaligus mendapatkan bantuan uang yang diperoleh paling banyak digunakan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan usaha UMKM. UMKM yang menggunakan bantuan berupa uang untuk keperluan lainnya ada sekitar 68 persen. Keperluan lainnya yang dimaksud diantaranya yaitu membeli

barang modal berupa bahan baku, perlengkapan usaha, perlengkapan bengkel dan sebagainya dengan jumlah UMKM sekitar 95,83 persen dan sisanya sekitar 4,17 persen digunakan untuk rehabilitasi tempat usaha.

Di posisi kedua yaitu digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, jumlah UMKM yang menggunakan bantuan berupa uang untuk kepentingan tersebut yaitu sekitar 32 persen. Adapun alasan digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada yaitu UMKM tersebut merasa yakin bahwa bidang usaha mereka sekarang sangat menguntungkan, memiliki hasil usaha yang bagus, memiliki produksi yang cukup meningkat, potensi penjualan terus meningkat sehingga perlu dikembangkan, perlu diperluas pangsa pasarnya.

Tabel 4.23. Jumlah UMKM menurut pemanfaatan bantuan modal berupa uang

Bentuk pemanfaatan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
Membuka usaha baru	2	4,0
Mengembangkan usaha yang telah ada	16	32,0
untuk membeli kendaraan operasional	1	2,0
Lainnya (membeli barang modal berupa bahan baku, perlengkapan usaha, perlengkapan bengkel)	31	62,0
Total	50	100,00

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Selain digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada dan digunakan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan usaha UMKM, bantuan modal berupa uang juga digunakan untuk membuka usaha baru, jumlah UMKM yang menggunakan bantuan modal berupa uang untuk kepentingan ini sekitar 4,0 persen. UMKM tersebut menganggap bidang usaha yang sekarang kurang prospektif sehingga perlu dialihkan ke bidang usaha yang lainnya dan yang

terakhir, sekitar 2 persen UMKM menggunakan bantuan modal berupa uang untuk membeli kendaraan operasional yang bisa mendukung kegiatan usaha UMKM.

4.3.3 Evaluasi Proses Program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Evaluasi proses program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah meliputi proses terhadap proses seleksi/persyaratan teknis, manfaat seleksi, efektivitas proses pencairan dana, proses pendampingan, efektivitas penyaluran dana, pengembalian pada pihak disperindagkop, perguliran dana ke pihak lain, efektivitas tenaga pendamping, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, penyaluran tepat waktu, jumlah, sebaran dan mekanisme serta proses pada birokrasi pemerintahan

4.3.3.1. Proses seleksi/persyaratan administrasi

Proses seleksi/persyaratan administrasi merupakan hal pertama yang dilihat pada saat pengajuan Program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Jelaskan persyaratan administrasi yang dimaksud yaitu dengan surat keterangan usaha dari pihak kelurahan setempat.

Tabel 4.24. Proses Seleksi/persyaratan administrasi program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	4	4,0
cukup memuaskan	36	36,0
Memuaskan	56	56,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari tabel 4.24 tersebut, terlihat bahwa secara umum proses

seleksi/persyaratan administrasi program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah sudah memuaskan, 56 persen responden menganggap proses seleksi persyaratan administrasi tersebut memuaskan. Namun walaupun demikian masih ada sekitar 4 persen responden yang menganggap bahwa proses seleksi persyaratan administrasi tersebut tidak memuaskan, berdasarkan studi lapangan ketidakpuasan mengenai proses tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan dari persyaratan administrasi yang dinilai pada saat proses seleksi.

4.3.3.2. Manfaat seleksi

Seleksi bertujuan untuk mendapatkan calon UMKM penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Proses seleksi diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan untuk seleksi itu sendiri.

Tabel 4.25. Manfaat seleksi program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	4	4,0
cukup memuaskan	40	40,0
Memuaskan	52	52,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Secara umum, berdasarkan data pada tabel 4.25, Proses seleksi/persyaratan administrasi program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah sudah memuaskan, 52 persen responden menganggap proses seleksi persyaratan administrasi tersebut memuaskan atau dengan kata lain proses seleksi mampu memberikan manfaat seperti yang diharapkan, bahkan ada sekitar 4 persen

responden yang menilai sangat memuaskan, walaupun demikian masih ada sekitar 4 persen responden yang menganggap bahwa manfaat seleksi persyaratan administrasi tersebut tidak memuaskan, mereka menganggap, seleksi hanya formalitas saja dan yang mendapatkan bantuan hanya UMKM itu - itu saja, menganggap bahwa proses seleksi tidak terlalu memberikan manfaat yang signifikan.

4.3.3.3. Efektivitas proses pencairan dana.

Para penerima program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah mengharapkan proses pencairan dana sangat efektif dan tidak terlalu berbelit - belit. Mulai Tahun 2011 yang lalu, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Tanjungpinang memberikan modal secara hibah dan langsung diserahkan kepada pelaku UMKM.

Tabel 4.26. Efektivitas Proses Pencairan Dana program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	14	14,0
cukup memuaskan	36	36,0
Memuaskan	46	46,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Dari tabel 4.26, secara umum usaha UMKM berpendapat bahwa efektifitas proses pencairan dana termasuk kedalam kategori memuaskan, 46 persen UMKM menilai efektifitas proses pencairan dana memuaskan dan bahkan sekitar 4 persen, usaha UMKM di kota Tanjungpinang menilai bahwa efektifitas proses pencairan dana sangat memuaskan, tetapi walaupun demikian yang menyatakan tidak puas

terhadap efektifitas proses pencairan dana masih sangat tinggi, sekitar 14 persen UMKM menilai efektifitas proses pencairan dana tidak memuaskan, pencairan dana masih sangat berbeli-belit dan terlalu lama.

4.3.3.4. Efektivitas proses pendampingan

Proses pendampingan dari SKPD yang mencanangkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah bertujuan agar bantuan yang diberikan tepat guna dan berhasil guna, bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha UMKM.

Tabel 4.27. Efektivitas Proses Pendampingan dalam program bantuan

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	18	18,0
cukup memuaskan	38	38,0
Memuaskan	43	43,0
Sangat memuaskan	1	1,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari hasil pada tabel 4.27, efektivitas proses pendampingan termasuk kedalam kategori memuaskan 43 persen responden menganggap efektivitas proses pendampingan tersebut memuaskan dan bahkan 18 persen UMKM menganggap bahwa efektivitas proses pendampingan sangat memuaskan atau dengan kata lain proses pendampingan ini sangat efektif. Tetapi walaupun demikian masih ada UMKM yang menganggap bahwa efektivitas proses pendampingan tidak memuaskan, UMKM tersebut menganggap proses pendampingan hanya buang-buang biaya saja dan manfaat yang diberikan tidak maksimal karena tidak jarang setelah bantuan digulirkan, pendampingan tidak dilakukan atau ada UMKM yang tidak didatangi oleh petugas pendamping

4.3.3.5. Efektivitas penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan langsung di SKPD yang bersangkutan, hal ini dengan maksud agar penyaluran dana bisa dilakukan secara efektif. Dari tabel 4.28, sebagian besar usaha UMKM yaitu sekitar 61 persen menganggap bahwa penyaluran dana efektif, dengan rincian 57 persen efektifitas penyaluran dana memuaskan dan sekitar 4 persen menganggap efektifitas penyaluran dana sangat memuaskan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penyaluran dana langsung dilakukan oleh SKPD terkait sehingga mekanismenya tidak berbelit belit.

Tabel 4.28. Efektivitas penyaluran dana pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	3	3,0
cukup memuaskan	36	36,0
Memuaskan	57	57,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

4.3.3.6. Perguliran dana ke pihak lainnya

Jumlah UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang sangat banyak, tetapi jumlah dana atau bantuan sangat terbatas, sehingga diharapkan dana/bantuan tersebut bergulir, dengan bergulirnya dana tersebut diharapkan semua UMKM menerima bantuan atau dana tersebut.

Berdasarkan data pada tabel 4.29, secara umum, UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang menilai bahwa perguliran dana ke pihak lain memuaskan, sekitar 41 persen UMKM menyatakan perguliran dana ke pihak lainnya memuaskan dan sekitar 3 persen menyatakan perguliran dana ke pihak lainnya sangat memuaskan.

Dana ke pihak lainnya tidak memuaskan masih sangat tinggi yaitu sekitar 19 persen. Walaupun demikian yang menganggap perguliran dana ke pihak lainnya tidak memuaskan masih sangat tinggi, sekitar 19 persen usaha UMKM menganggap perguliran dana ke pihak lainnya tidak memuaskan, mereka menganggap dana/bantuan hanya bergulir ke UMKM yang itu-itu saja, tidak secara bergilir. Anggapan itulah yang membuat penilaian mereka terhadap perguliran dana bergilir tidak memuaskan.

Tabel 4.29. Perguliran dana ke pihak lainnya

Uraian [1]	Jumlah [2]	Persentase [3]
Tidak memuaskan	19	19,0
cukup memuaskan	37	37,0
Memuaskan	41	41,0
Sangat memuaskan	3	3,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

4.3.3.7. Efektivitas Tenaga Pendamping

Pendamping dalam arti luas adalah orang yang membantu kelompok dalam mencapai tujuannya dengan cara memberikan bantuan, arahan ataupun pengawasan. Adapun pengertian lain dari pendamping adalah orang yang memiliki keahlian tinggi yang bekerja dengan kelompok untuk membantu kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Pendamping dalam program pemberdayaan UKM adalah orang yang membantu pengurus dan anggota pelaku UKM berperan aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan, arahan atau pengawasan. Program pemberdayaan tidak saja harus mempertimbangkan materi tetapi pendampingan sesuai dengan kondisi kelompok sasaran (kebutuhan) dapat dilakukan dengan *need assessment* (pendekatan

kebutuhan).

1. Dengan kata lain komunikasi yang strategik terkontrol oleh monitoring dan evaluasi melalui program pendampingan, peran seorang pendamping lapangan sebaiknya tanggung jawab manajemen dan komunikasi dalam administrasi lapangan, menyiapkan lapangan (sumber daya, materi komunikasi), dukungan program dilapangan, keperluan logistik dilapangan dan kelanjutan kegiatan di lapangan.
2. Merancang kegiatan pendampingan pada tahap sebelum kegiatan dilakukan (*pre-field*), saat kegiatan berlangsung(*on-field*) dan setelah kegiatan dilakukan (*post-field*). (Linda darmayanti, dkk 2012).

Tenaga pendamping pada program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah di Kota Tanjungpinang secara langsung tidak ada, yang ada hanya petugas yang hanya memberikan arahan saja secara garis besar tentang program tersebut, oleh karena itu keberadaan tenaga pendamping belum bisa dirasakan secara maksimal.

Tabel 4.30. Efektivitas Tenaga Pendamping

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	34	34,00
cukup memuaskan	37	37,00
Memuaskan	28	28,00
Sangat memuaskan	1	1,00
Total	100	100,00

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan data pada tabel 4.30, terlihat bahwa kebanyakan pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang menyatakan efektivitas tenaga pendamping cukup memuaskan, sekitar 37 persen menyatakan efektifitas tenaga penadamping cukup

memuaskan, bahkan yang menyatakan efektifitas tenaga pendamping tidak memuaskan masih juga tinggi yaitu sekitar 34 persen. hal ini kemungkinan besar dikarenakan tidak adanya orang yang benar-benar ditunjuk sebagai tenaga pendamping pada Program bantuan tersebut, padahal manfaat dari tenaga pendamping sangat banyak sekali.

4.3.3.8. Proses Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi

Dalam siklus manajemen, pelaporan, monitoring dan evaluasi (*monev*) merupakan unsur penting yang memberikan input balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan organisasi dan keinginan pemangku kepentingan. Sehingga untuk memperoleh hasil yang diinginkan maka evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring. Monitoring dan evaluasi yang sifatnya terintegrasi ini akan dapat menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi yang berperan.

Untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di berbagai aspek pembangunan, maka harus dikembangkan upaya - upaya pengamanan (*safeguarding*) program - program sektor di bawah koordinasinya. Salah satu komponen *safeguarding* yang dikembangkan adalah monitoring dan evaluasi yang terpadu dan melibatkan multi pihak, baik pelaksana program maupun pihak-pihak independen. Pelaksana program dilibatkan dalam

kegiatan monev ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap program yang dikelolanya, sedangkan pihak - pihak independen yang termasuk pula masyarakat luas diharapkan keterlibatannya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kepemilikannya terhadap program yang dilaksanakan di lingkungannya. Konsistensi dan komitmen sejak dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan program/kegiatan penting untuk dipahami oleh para evaluator.

Tabel 4.31. Proses pelaporan, monitoring dan evaluasi

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	34	34,0
cukup memuaskan	42	42,0
Memuaskan	23	23,0
Sangat memuaskan	1	1,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari tabel diatas, terlihat bahwa proses pelaporan, monitoring dan evaluasi cukup memuaskan, hal ini terlihat sekitar 42 persen pelaku usaha menilai bahwa proses pelaporan, monitoring dan evaluasi cukup memuaskan. Ada hal menarik berdasarkan fakta dilapangan, 34 persen pelaku UMKM menilai bahwa proses pelaporan, monitoring dan evaluasi tidak memuaskan, menurut para pelaku UMKM tersebut berpendapat bahwa program bantuan hanya bersifat bagi - bagi saja tanpa ada kejelasan bagaimana proses pelaporan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban baik bagi pemerintah daerah sebagai pemberi dana maupun bagi UMKM yang memperoleh dana tersebut. Selain itu juga mereka berpendapat bahwa selama ini tidak pernah ada evaluasi terhadap UMKM yang pernah mendapatkan bantuan tersebut baik evaluasi mengenai peruntukan bantuan

keuangan yang diberikan maupun evaluasi dampak sebagai efek domino diberikannya bantuan buat mereka, dan dalam pemberian bantuan khususnya bantuan modal berupa uang, menurut pelaku UMKM yang menyatakan tidak puas, tidak pernah dilakukan monitoring terhadap UMKM yang pernah mendapatkan dana bantuan.

4.3.3.9. Penyaluran tepat waktu, tepat jumlah, tempat sebaran dan sesuai dengan mekanisme

Para pelaku UMKM berharap bantuan yang akan diberikan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sebaran dan penyaluran sesuai dengan mekanisme tepat waktu berarti penyaluran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian dilapangan, menurut para pelaku UMKM, penyaluran dari sisi waktu memuaskan dengan kata lain penyaluran sudah tepat waktu. Sekitar 58 persen pelaku UMKM menyatakan penyaluran dari sisi waktu memuaskan.

Tabel. 4.32. Penyaluran tepat waktu

Urutan	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	4	4,0
cukup memuaskan	35	35,0
Memuaskan	58	58,0
Sangat memuaskan	3	3,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah terdiri dari :

- a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan yang berupa pemberian modal usaha tanpa pengembalian (hibah) sebesar dengan rata – rata Rp. 2.000.000 per pelaku usaha

- b. Pengadaan gerobak jualan bagi UKM, masing-masing pelaku UMKM akan mendapatkan 1 gerobak untuk bantuan usaha
- c. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, berupabantuan peralatan mesin jahit, alat kemasan (Pagkeging), prosur untuk produk UKM, penggiling tanaman umbian, peralatan mesin giling/mesin pemotong dan peralatan home industri lainnya.
- d. Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang.
- e. Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang.
- f. Penyelenggaraan promosi produk UMKM Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UKM.

Diharapkan penyaluran semua bentuk bantuan tersebut tepat dari sisi jumlah baik kuantitas ataupun kualitas yang sudah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan sebagian besar pelaku UMKM merasa puas terhadap penyaluran bantuan dari sisi kuantitasnya. Hal ini berarti bantuan yang diberikan sesuai dengan yang direncanakan dari sisi kuantitasnya.

Tabel 4.33. Penyaluran tepat jumlah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	5	5,0
cukup memuaskan	34	34,0
Memuaskan	58	58,0
Sangat memuaskan	3	3,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Sekitar 58 persen pelaku UMKM menganggap penyaluran dari sisi kuantitasnya memuaskan bagi semua UMKM yang menerimanya. Hal ini

menunjukkan apa yang sudah dijanjikan sesuai dengan yang direalisasikan dari sisi bantuan menurut kuantitasnya.

Selain dari sisi masalah ketepatan waktu dan kuantitas penyaluran yang diberikan, bantuan yang akan diberikan juga diharapkan tepat sebarannya, dari sekian banyak bantuan yang diberikan dalam program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah diharapkan tidak hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang sama, tetapi tersebar hampir keseluruhan UMKM yang ada dan diharapkan semua UMKM pernah menerima bantuan program tersebut.

Tabel 4.34. Penyaluran Tepat Sebaran

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	5	5,0
cukup memuaskan	34	34,0
Memuaskan	57	57,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari tabel 4.34, terlihat bahwa sekitar 57 persen UMKM, menganggap penyaluran tepat sebaran memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang sudah diberikan menyebar, tidak saja menumpuk pada UMKM tertentu saja, tetapi walaupun demikian, masih ada juga UMKM yang menganggap penyaluran dari sisi sebarannya tidak memuaskan, sekitar 5 persen menganggap penyaluran tepat sebaran tidak memuaskan, bantuan hanya di berikan kepada UMKM tertentu saja, tidak semua pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan tersebut, hal ini lah yang menyebabkan mereka tidak puas terhadap penyaluran bantuan tepat sebaran.

Berdasarkan mekanisme penyaluran bantuan yang sudah direncanakan, agar penyaluran cepat dan tepat sasaran, maka mekanisme penyalurannya dilakukan langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang, kemudian untuk pengambilan bantuannya harus diambil sendiri oleh pemilik UMKM tersebut dengan membawa identitas diri yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Berdasarkan data pada tabel 4.34, sekitar 56 persen pelaku UMKM menilai penyaluran sesuai dengan mekanisme memuaskan, dengan kata lain penyaluran sudah sesuai dengan mekanisme yang disepakati, tanpa terjadi penyimpangan apapun.

Tabel 4.35. Penyaluran Sesuai mekanisme

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	4	4,0
cukup memuaskan	36	36,0
Memuaskan	56	56,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

4.3.3.10. Penilaian pelaku UMKM terhadap birokrasi pemerintahan

Birokrasi pemerintahan pada saat pengurusan bantuan untuk UMKN diharapkan tidak terlalu berbelit - belit.

Tabel 4.36. Birokrasi pemerintahan

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak memuaskan	4	4,0
cukup memuaskan	36	36,0
Memuaskan	56	56,0
Sangat memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan data pada tabel 4.36, sekitar 56 persen pelaku UMKM menganggap birokrasi pemerintahan memuaskan, tidak berbelit-belit, birokrasi pemerintahan bukan hal yang menghambat perolehan bantuan untuk UMKM.

4.3.4. Kesimpulan umum evaluasi proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Secara umum proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, menurut para pelaku UMKM sudah memuaskan baik dari sisi proses seleksi/persyaratan administrasi, manfaat seleksi, efektivitas proses pencairan dana, efektivitas penyaluran dana oleh SKPD yang ditunjuk, penyaluran tepat waktu, tepat jumlah, penyaluran tepat sebaran, penyaluran sesuai mekanisme dan birokrasi penjelasan.

Tabel 4.37 Evaluasi proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Tidak Memuaskan	4	4,0
Cukup memuaskan	35	35,0
Memuaskan	57	57,0
Sangat Memuaskan	4	4,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Hasil pada tabel 4.37 menunjukkan bahwa , 57 persen pelaku UMKM menganggap bahwa proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah sudah memuaskan para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, tetapi walaupun demikian perlu diperhatikan penilaian para pelaku UMKM yang masih banyak menyatakan tidak memuaskan terhadap berapa bagian proses diantaranya yaitu perguliran dana ke pihak lainnya, efektifitas proses

pendampingan, efektivitas tenaga pendamping dan proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, ketiga hal ini lah yang perlu lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang agar proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah bisa memuaskan seluruh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang dan memuaskan diseluruh bagian – bagian proses program tersebut.

4.3.4.1. Penilaian terhadap proses seleksi

Proses seleksi calon penerima bantuan terdiri dari beberapa tahapan, mulai seleksi administrasi baik dari sisi ijin usaha dan sebagainya dan proses klarifikasi dilapangan. Berdasarkan tabel 4.38, secara keseluruhan proses seleksi sudah dilaksanakan secara fair, sekitar 54,00 persen pelaku UMKM menyatakan bahwa proses seleksi sudah fair, hal ini sesuai dengan prinsip yang diterapkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang yang berusaha menerapkan sistem *good governance* sehingga mampu menjamin keseluruhan proses seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya diharapkan tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 4.38. Proses seleksi UMKM penerima program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah telah dilakukan secara adil (transparan dan akuntabel)

Uraian	Frequency	Percent
[1]	[2]	[3]
sangat fair dan sesuai pedoman pelaksanaan	2	2,0
Fair	54	54,0
cukup fair	42	42,0
tidak fair	2	2,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

4.3.4.2. *Importance-Performance Analysis* (analisis tingkat kepentingan dan kinerja)

Berdasarkan hasil *Importance-Performance Analysis* dapat dihitung tingkat kesesuaian dari unsur - unsur proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang perlu dievaluasi, dimana tingkat kesesuaian dapat menentukan urutan prioritas peningkatan kinerja program tersebut. Adapun urutan prioritas peningkatan kinerja program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah berdasarkan tingkat kesesuaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.39 Prioritas peningkatan kinerja program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah berdasarkan tingkat kesesuaian

No [1]	Sub Proses [2]	Tingkat kesesuaian [3]
1	Efektivitas Tenaga Pendamping	70,48
2	Proses Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi	76,98
3	Efektivitas Proses Pendampingan	86,05
4	Perguliran bantuan ke pihak lainnya	86,77
5	Efektivitas Proses Pencairan Dana	91,40
6	Manfaat Seleksi	95,70
7	Penyaluran Tepat Sebaran	96,77
8	Penyaluran Sesuai mekanisme	96,77
9	Birokrasi pemerintahan	96,77
10	Penyaluran Tepat Jumlah	97,03
11	Penyaluran Tepat Waktu	97,04
12	Efektivitas Penyaluran Dana Oleh SKPD	97,05
13	Proses Seleksi/persyaratan administrasi	97,56

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepentingan dan kinerja juga memungkinkan pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat menitikberatkan usaha - usaha perbaikan terhadap bagian dari proses program

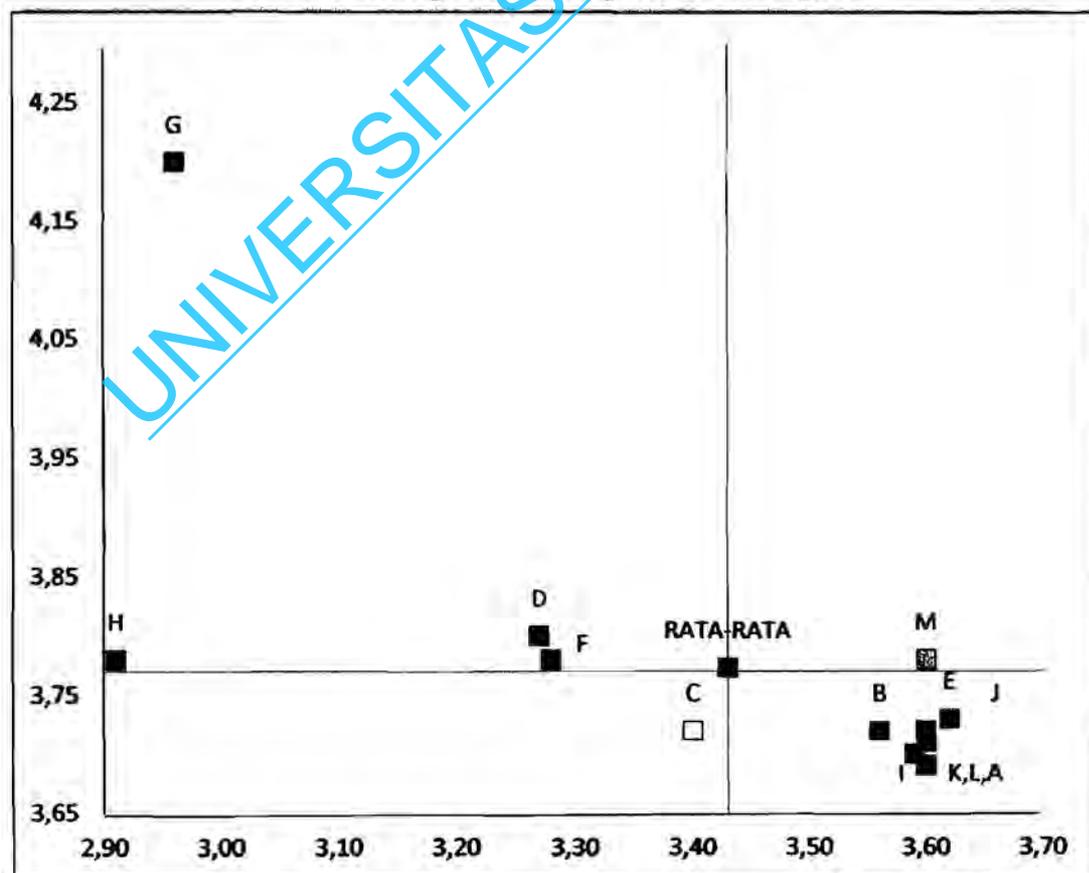
bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dianggap penting oleh pelaku UMKM agar hasilnya lebih memuaskan lagi. Hal ini dapat dibuat suatu diagram kartesius yang menunjukkan letak dari pelaksanaan proses program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut:

- A. Menunjukkan faktor/unsur yang dianggap mempengaruhi kepuasan pengusaha termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap penting, namun pemerintah belum melaksanakan sesuai keinginan pengusaha, sehingga mengecewakan/banyak pengusaha yang menyatakan tidak puas. Unsur unsur tersebut yaitu :
1. Efektivitas tenaga pendamping (G)
 2. Proses pelaporan, monitoring dan evaluasi (H)
 3. Efektifitas proses pendampingan (D)
 4. Perguliran bantuan ke pihak lainnya (F)
- B. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan pemerintah, untuk itu wajib dipertahankan. Danggap sangat penting dan pelaksanaannya sangat memuaskan dan yang termasuk kedalam penelitian yaitu proses birokrasi pemerintahan (M)
- C. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pengusaha, pelaksanaannya oleh pemerintah biasa - biasa saja dianggap merupakan faktor yang kurang penting dan kurang memuaskan yang termasuk kedalam kategori kuadran ini adalah efektivitas proses pencairan dana (C)

D. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pengusaha akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap faktor yang kurang penting tetapi pelaksanaannya sudah memuaskan yaitu :

1. Seleksi/persyaratan administrasi (A)
2. Manfaat seleksi (B)
3. Efektivitas penyaluran dana oleh dinas terkait (E)
4. Penyaluran Tepat waktu (I)
5. Penyaluran tepat jumlah (J)
6. Penyaluran tepat sebaran (K)
7. Penyaluran sesuai mekanisme (L)

Gambar 4.1 *Importance-Performance Analysis*



Sumber : Hasil olahan data lapangan

4.3.5. Evaluasi Dampak program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Evaluasi dampak pada program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah meliputi bagaimana perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima bantuan secara umum baik dampak terhadap rata-rata omzet, keuntungan, modal dan jumlah tenaga kerja.

4.3.5.1. Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima bantuan program

Dengan diberikannya program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah diharapkan para Pelaku UMKM berkembang usahanya.

Tabel. 4.40. Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima bantuan program

Uraian	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Mengalami Kemajuan Usaha	2	3,33
Ada Peningkatan Sedikit	56	93,33
Mengalami Kemunduran usaha	2	3,33
Total	60	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, 93,33 persen pelaku UMKM beranggapan bahwa usahanya ada peningkatan walaupun sedikit setelah mendapatkan program bantuan, peningkatan tersebut terjadi baik dari sisi permodalan, omzet, keuntungan maupun jumlah tenaga kerja, kemudian justru ada yang mengalami kemunduran usaha yaitu sekitar 3,33 persen. Ada pelaku UMKM justru mengalami kebangkrutan setelah mendapatkan bantuan, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, hal ini diantaranya disebabkan tidak mampu bersaing dengan pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang yang sama. Selain itu sekitar

3,33 persen pelaku UMKM mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah mendapatkan program bantuan terutama dari sisi keuntungan per bulan.

Naik turunnya perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan diantaranya yaitu permintaan konsumen akan barang yang ditawarkan menurun, sehingga barang menjadi tidak laku, untuk lokasi disekitar pulau Penyengat dimana para pelaku UMKM yang bergerak disektor penjualan souvenir, kelangsungan usaha para pelaku UMKM tersebut juga dipengaruhi oleh seberapa banyak pengunjung baik wisatawan mancanegara ataupun dalam negeri yang datang berkunjung ke Pulau Penyengat. selain itu juga perkembangan UMKM disebabkan oleh masalah tersedia atau tidaknya bahan pokok/baku di pasaran, selain dari sisi ketersediaan secara kuantitas, juga dipengaruhi oleh seberapa besar harga pasarnya, harga bahan baku yang terus meningkat sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kelangsungan pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang

Tabel 4.41. Evaluasi dampak program terhadap rata - rata omzet per bulan, keuntungan per bulan, rata-rata jumlah modal usaha dan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan

Rata-rata [1]	Sebelum [2]	Sesudah [3]	Persentase [4]
1. Omzet per bulan	2.252.632	2.604.169	15,61 %
2. Keuntungan Per bulan	858.772	1.369.492	59,47%
3. Jumlah Modal usaha	2.049.123	3.459.322	68,82%
4. Jumlah Tenaga Kerja	1,18	1,34	13,56%

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Dari data pada tabel diatas, Dampak dari pemberian bantuan program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah terhadap omzet,

keuntungann per bulan, jumlah modal usaha dan jumlah tenaga kerja adalah sebagai berikut sebelum diberikan bantuan, pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang memiliki rata-rata omzet per bulan sebesar Rp. 2.252.632,- sedangkan setelah mendapatkan bantuan rata-rata omzet per bulan menjadi Rp. 2.604.169,- atau mengalami peningkatan sekitar 15,61 persen. Untuk keuntungan per bulan, sebelum mendapatkan bantuan sebesar Rp.858.772,- sedangkan setelah mendapatkan bantuan sebesar Rp.1.369.492,- atau mengalami peningkatan sekitar 59,47 persen. Setelah mendapatkan program bantuan berdampak pada peningkatan Omzet per bulan dan keuntungan per bulan para pelaku UMKM, hal ini sebagai dampak meningkatnya modal, dikarenakan setelah mendapatkan bantuan maka mereka mendapatkan suntikan dana untuk Modal usaha, sebelum mendapatkan bantuan, rata-rata modal usaha para pelaku UMKM sebesar Rp. 2.049.123,- sedangkan setelah mendapatkan modal bantuan, rata-rata modal para pelaku UMKM naik menjadi Rp. 3.459.322,- atau naik sekitar 68,82 persen. Kenaikan modal inilah yang memicu kenaikan keuntungan dan omzet per bulan para pelaku UMKM yang mendapatkan program bantuan. Apabila diperhatikan dari sisi jumlah tenaga kerja, secara rata-rata sebelum mendapatkan bantuan, rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 1,18 orang sedangkan setelah mendapatkan bantuan, rata-rata jumlah tenaga kerja menjadi 1,34 orang atau naik sekitar 13,56 persen. Dari keterangan diatas terlihat jelas bahwa secara deskriptif rata-rata omzet, keuntungan, jumlah modal dan jumlah tenaga kerja para pelaku UMKM mengalami kenaikan yang lumayan signifikan setelah mendapatkan program bantuan.

4.3.5.2. Pengujian Hipotesis untuk melihat dampak pemberian bantuan bagi pelaku UMKM

Untuk mengetahui secara lebih tepat tentang perkembangan omzet, keuntungan, modal dan tenaga kerja, maka peneliti melakukan pengujian hipotesis.

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yaitu:

Ho : $\mu_1 = \mu_2$ (rata-rata omzet/keuntungan/modal/tenaga kerja per bulan sebelum dan sesudah mendapatkan program bantuan sama)

H1 : $\mu_1 \neq \mu_2$ (rata-rata omzet//keuntungan/modal/tenaga kerja per bulan sebelum dan sesudah mendapatkan program bantuan berbeda)

Tabel 4.42. Rata - rata omzet, keuntungan, modal usaha dan tenaga kerja per bulan

Uraian	Omzet	Keuntungan	Modal Usaha	Tenaga Kerja
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rangking negatif	3,33	0,00	3,33	0,00
Rangking positif	93,33	96,67	91,67	18,33
Angka sama	3,33	3,33	5,00	81,67
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Olahan data Lapangan

Keterangan:

- a Rangking negatif: setelah mendapat bantuan < sebelum mendapat bantuan
- b Rangking positif: setelah mendapat bantuan > sebelum mendapat bantuan
- c Angka yang sama : setelah mendapat bantuan = sebelum mendapat bantuan

Dari tabel 4.42, terlihat bahwa untuk rata - rata omzet per bulan, sekitar 93,33 persen pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan rata-rata omzet setelah mendapatkan bantuan, kemudian untuk rata-rata keuntungan per bulan sekitar 96,67 persen para pelaku usaha mengalami kenaikan keuntungan setelah mendapatkan bantuan, sekitar 91,67 persen pelaku UMKM mengalami kenaikan modal usaha. Kenaikan setelah mendapatkan program bantuan tidak terjadi pada tenaga kerja 81,67 persen pelaku UMKM, tidak mengalami perubahan

jumlah tenaga kerja setelah mendapatkan bantuan usaha, sedangkan yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja hanya 18,33 persen.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, baik untuk rata-rata omzet per bulan, keuntungan per bulan, rata-rata modal usaha dan jumlah tenaga kerja, memiliki nilai *p-value* < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata omzet per bulan, keuntungan per bulan, modal usaha dan jumlah tenaga kerja mengalami perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan atau dengan kata lain pemberian program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah secara signifikan mampu merubah para pelaku UMKM baik dari sisi rata - rata omzet, keuntungan per bulan, modal usaha dan tenaga kerja kearah yang lebih baik lagi dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya.

Tabel 4.43. Hasil Output Uji Wilcoxon

Uraian	omzet setelah sebelum mendapat bantuan	keuntungan setelah - sebelum mendapatkan bantuan	Modal usaha setelah - sebelum mendapatkan bantuan	jumlah tenaga kerja setelah - sebelum mendapatkan bantuan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Z	-5,923(a)	-6,633(a)	-5,934(a)	-3,207(a)
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001

Sumber : Hasil Olahan Data Lapangan

a Based on negative ranks.

b Wilcoxon Signed Ranks Test

Berdasarkan hasil pada tabel 4.43 diketahui bahwa ada pertumbuhan omzet, keuntungan, modal dan tenaga kerja dan berdasarkan hasil pengujian wilcoxon, ada perbedaan yang signifikan baik omzet, keuntungan, modal dan tenaga kerja sebelum dan sesudah mendapatkan program bantuan dukungan usaha UMKM, hal

ini membuktikan bahwa pemberian program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah memberikan dampak yang positif bagi para pelaku UMKM yang mendapatkannya

4.3.6. Evaluasi Strategis program bantuan dukungan usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, aada beberapa rencana strategis yang perlu dibuat untuk lebih mengembangkan usaha UMKM di Kota Tanjungpinang

4.3.6.1. Harapan pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang

Masing-masing pelaku UMKM memiliki permasalahan tersendiri dalam menjalankan usahanya, untuk mngatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan mengharapkan bantuan dari Pemerintah setempat untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM.

Tabel 4.44. Bentuk bantuan yang diharapkan para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang

Uraian	Jumlah	Persenta se
[1]	[2]	[3]
Bantuan per modalan usaha	40	40
Bantuan Pelatihan	19	19
Bantuan Tempat usaha yang memadai	13	13
Bantuan dengan suku bunga rendah dan angsuran ringan	16	16
Bantuan Per modalan usaha yang berkelanjutan dan bergulir	8	8
Bantuan Promosi Usaha	1	1
Lainnya	3	3
Total	100	100

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Perkembangan UMKM di Negara yang sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan - hambatan tersebut bisa berbeda satu daerah dan

daerah lainnya, namun walaupun demikian, ada sejumlah persoalan umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga. Rintangan - rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan - kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan kerja dengan keahlian tinggi dan sebagainya (Tulus Tambunan, 2012:51). Persoalan-persoalan tersebut juga terjadi pada pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, sehingga untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa bentuk bantuan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu sekitar 40 persen mengharapkan bantuan berupa modal baik berupa uang maupun peralatan yang akan digunakan dalam mendukung kegiatan usaha UMKM. Modal ini digunakan untuk menambah permodalan yang sudah ada, bukan sebagai modal awal bagi pelaku UMKM baru. Ada beberapa UMKM yang mengharapkan bahwa bantuan modal tersebut bersifat bergulir dan berkelanjutan, hal ini berdasarkan pengamatan dilapangan, mereka berasumsi dengan bantuan bergulir dan berkelanjutan, hal tersebut mampu menjaga kelestarian pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang, saat ini bantuan permodalan berupa uang hanya bersifat hibah, setiap pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut, beberapa pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, menganggap hal tersebut tidak mendidik bagi pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan. Ada sekitar 8 persen para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yang mengharapkan bantuan tersebut bergulir dan berkelanjutan. Apabila diterapkan bantuan yang bergulir dan berkelanjutan,

beberapa pelaku UMKM mengharapkan, suku bunga yang diterapkan sangat kecil dan cicilannya ringan, sekitar 16 persen pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang mengharapkan bantuan dengan pengembalian yang memiliki suku bunga rendah dan cicilan ringan.

Selain bantuan berupa modal, para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang juga mengharapkan diadakannya pelatihan baik berupa pelatihan yang berhubungan dengan langsung dengan jenis usaha yang sedang mereka gerakkan atau pun pelatihan berupa tata kelola UMKM yang baik misalkan pelatihan administrasi keuangan, bagaimana pengajuan permohonan kredit ke perbankan ataupun pelatihan pembuatan proposal pengajuan bantuan. Sekitar 19 persen pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang mengharapkan bantuan dari Pemerintah setempat berupa pelatihan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang.

Bantuan yang diharapkan oleh pelaku UMKM yang lainnya yaitu bantuan tempat usaha yang layak dan memadai, sekitar 13 persen pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang mengharapkan bantuan tempat yang layak dan memadai. Di kota Tanjungpinang selama ini yang berhubungan dengan tempat yang memadai baru bantuan berupa penyediaan gerobak untuk usaha aja. selain itu juga ada sekitar 1 persen pelaku UMKM yang mengharapkan bantuan promosi usaha mereka.

4.3.6.2. Bentuk kepedulian dan ketidakpedulian Pemerintah Daerah terhadap UMKM di Kota Tanjungpinang

Perkembangan UMKM di suatu wilayah diantaranya dipengaruhi oleh peduli tidaknya Pemerintah Daerah terhadap UMKM di wilayah tersebut.

Dinas/SKPD terkait di Kota Tanjungpinang yang berhubungan langsung dengan UMKM yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Tabel 4.45. Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan UMKM di Kota Tanjungpinang

Uraian	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]
Sangat Peduli	46	46,0
Peduli	1	1,0
Cukup peduli	52	52,0
Kurang Peduli	1	1,0
Total	100	100,0

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Dari Tabel 4.45, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang cukup peduli terhadap keberadaan UMKM di Kota Tanjungpinang, sekitar 52 persen pelaku UMKM, menilai pemerintah daerah cukup peduli terhadap keberadaan UMKM. Bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan UMKM diantaranya yaitu dengan adanya program bantuan baik berupa uang untuk modal, peralatan, gerobak dan sebagainya. Bentuk kepedulian yang lainnya yaitu dalam bentuk kemudahan birokrasi dalam hal pengurusan ijin usaha ataupun kemudahan dalam memperoleh bantuan. Kemudian bentuk kepedulian lainya yaitu dengan selalu diadakannya pameran dan bazaar bagi para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, dan ada juga para pelaku UMKM menganggap Pemerintah Daerah peduli terhadap pelaku UMKM melalui tidak diperlakukannya pungutan pajak atau diberlakukan pungutan pajak yang sangat kecil bagi UMKM.

Tabel. 4.46. Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan UMKM

Bentuk Kepedulian	Total	Persentase
[1]	[2]	[3]
Bantuan Tiap Tahun	81	81
Adanya Pameran/Bazar untuk UMKM	5	5
Birokrasi/Pengurusan Ijin Usaha dipermudah	8	8
Tidak ada pungutan pajak/pajak kecil	6	6
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Adapun bentuk kepedulian yang diharapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu bantuan modal berupa uang untuk memperbesar usaha, mesin jahit dan sebagainya, sekitar 28 persen UMKM mengharapkan bentuk kepedulian tersebut. Sekitar 25 persen pelaku UMKM, mengharapkan kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan tempat usaha yang layak dan memadai, 21 persen pelaku UMKM mengharapkan kepedulian Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan dengan bantuan permodalan berupa uang dengan angsuran ringan, bunga rendah, serta tanpa agunan, 21 persen pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang mengharapkan kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal pemasaran produk, pendampingan pemasaran dan promosi produk.

Tabel 4.47. Bentuk kepedulian yang diharapkan dari Pemerintah Daerah

Bentuk Kepedulian dari Pemda yang diHarapkan	Jumlah	Persentase
[1]	[2]	[3]
Bantuan modal berupa uang, mesin jahit, memperbesar modal usaha	28	28
Bantuan berkelanjutan dan lebih efektif	4	4
bantuan dengan angsuran ringan, bunga rendah, cicilan lunak tanpa agunan	21	21
Pemasaran, pendampingan pemasaran dan promosi produk	14	14
Tempat usaha yang layak dan memadai	25	25
Pelatihan pelaku UMKM	2	2
Lainnya	6	6
Total	100	100

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Adapun bentuk ketidakpedulian Pemerintah Daerah kepada UMKM diantaranya yaitu masih minimnya informasi tentang bantuan untuk UMKM, kurangnya pembinaan terhadap pelaku UMKM yang sudah ada, Pemerintah Daerah kurang selektif terhadap calon penerima bantuan dan belum menjangkau keseluruhan UMKM di Kota Tanjungpinang

4.3.7. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya SKPD terkait untuk mengembangkan usaha serta menjalankan kegiatan yang disesuaikan dengan aturan – aturan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di kota tanjungpinang yaitu:

1. Rendahnya kualitas pengusaha dan tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, pendidikan pengusaha dan tenaga kerjanya sangat rendah. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari salah satu narasumber di Disperindagkop Kota Tanjungpinang, kualitas SDM para pelaku UMKM masih jauh dari standar yang ada.
2. Kurangnya permodalan, pelaku UMKM masih banyak yang kesulitan untuk mengakses modal dari perbankan ,mereka dianggap *unbankable*, hal ini lah yang menyebabkan para pelaku UMKM banyak yang menggunakan modal yang bersumber dari modal sendiri.ditambah dengan masih minimnya bantuan modal untuk UMKM
3. Masih kurangnya sosialisasi program bantuan dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah.

4. Masih kurang memuaskannya beberapa tahapan dalam proses pemberian bantuan program dukungan usaha UMKM dalam hal Efektivitas tenaga pendamping, Proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, Efektifitas proses pendampingan dan Perguliran bantuan ke pihak lainnya.
5. Menurut narasumber dari Disperindagkop Kota Tanjungpinang, pengembangan UKM mengalami hambatan dalam operasionalnya, pengetahuan para produsen atau pemilik UMKM mengenai teknologi masih sangat jauh dari cukup, kebanyakan masih menggunakan peralatan tradisional, sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan jika para pelaku UMKM tersebut menggunakan mesin-mesin modern

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan sebelumnya:

Dilihat dari karakteristik pengusaha UMKM di Kota Tanjungpinang memiliki pendidikan yang rendah (sebagian besar SD/sederajat), mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama (sebagian besar berdiri antara tahun 1999 - 2009), sebagian besar bergerak dalam sektor perdagangan, sumber modal berasal dari modal sendiri, tenaga kerja disektor UMKM berpendidikan rendah/SD sederajat, jarak ketempat usaha sebagian besar \leq IKM, sebagian besar pelaku UMKM tidak pernah mengikuti pelatihan, modal awal antara 1 juta rupiah sampai 5 juta rupiah.

Proses penerimaan program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, ada yang sudah memuaskan ada juga yang belum memuaskan bagi pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Sebagian besar dalam pelaksanaannya, proses tersebut sudah memuaskan para pelaku UMKM diantaranya yaitu proses seleksi/persyaratan administrasi, birokrasi pemerintahan, manfaat seleksi, penyaluran tepat jumlah, waktu, sebaran dan sesuai mekanisme, efektifitas penyaluran dana oleh dinas terkait sedangkan proses yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu efektifitas tenaga pendamping, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, efektifitas proses pendampingan, dan perguliran bantuan ke pihak lainnya.

Secara strategis berdasarkan hasil di lapangan, bentuk bantuan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu berupa bantuan permodalan, bantuan pelatihan, bantuan permodalan dengan tingkat suku bunga rendah dan angsuran ringan, bantuan tempat usaha yang memadai, bantuan permodalan yang berkelanjutan dan bergulir serta bantuan promosi usaha. Hal ini menunjukkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah sudah sangat tepat untuk digulirkan karena kegiatan-kegiatan dalam program tersebut sudah sesuai dengan bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaannya, bentuk bantuan yang diperoleh para pelaku UMKM sebagian besar hanya berupa permodalan dan sebagian dalam bentuk penerimaan gerobak (sarana pendukung usaha), sedangkan untuk sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan partisipasi sekolah lapangan belum bisa dinikmati oleh sebagian besar pelaku UMKM di kota Tanjungpinang, kedepannya kegiatan-kegiatan yang belum bisa dinikmati oleh sebagian pelaku seperti sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan partisipasi sekolah lapangan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi kuotanya agar sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang bisa memperoleh bantuan tersebut dan juga dari sisi penyediaan sarana pendukung usaha selain dalam bentuk bantuan gerobak juga bisa ditambah dengan penyediaan tempat usaha yang memadai. Sedangkan berdasarkan evaluasi proses, agar lebih memuaskan para pelaku UMKM maka pemerintah harus memperhatikan efektivitas tenaga pendamping, proses pelaporan, monitoring dan

evaluasi, efektifitas proses pendampingan, dan perguliran bantuan ke pihak lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis Wilcoxon, pemberian program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, secara signifikan program tersebut berpengaruh cukup besar terhadap rata-rata omzet per bulan, rata-rata keuntungan per bulan, rata-rata modal usaha dan rata-rata jumlah tenaga kerja. Berdasarkan evaluasi dampak dapat disimpulkan bahwa pemberian program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah relatif sudah berhasil dalam rangka mengembangkan UMKM di Kota Tanjungpinang.

Kendala-kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu rendahnya kualitas para pengusaha dan tenaga kerja di sektor UMKM, masalah permodalan, kurangnya sosialisasi program bantuan dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, Masih kurang memuaskannya beberapa tahapan dalam proses pemberian bantuan program dukungan usaha UMKM dalam hal Efektivitas tenaga pendamping, Proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, Efektifitas proses pendampingan dan Perguliran bantuan ke pihak lainnya serta masih rendahnya produsen atau pemilik UMKM mengenai teknologi. Selain hal tersebut kendala yang lainnya yaitu masih kurang bervariasinya bentuk sarana pendukung kegiatan UMKM yaitu baru pemberian grobak, padahal ada beberapa pelaku UMKM yang mengharapkan sarana usaha yang memadai.

B. Saran

Program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah tetap harus digulirkan bagi para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang, tetapi dalam pelaksanaannya perlu ditambahkan kuotanya agar semua pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang bisa menikmati semua bentuk bantuan tersebut, diantaranya yaitu sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan partisipasi sekolah lapangan ditambah dengan penyediaan tempat usaha yang memadai sebagai wujud dari kegiatan pendukung usaha.

Agar pemberian program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah lebih baik lagi, berdasarkan hasil survei menyatakan bahwa:

- a. Bantuan hanya berupa modal usaha, karena modal usaha sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya
- b. Bantuan diberikan hanya kepada pelaku UMKM yang sudah berjalan/usahanya sudah lama, bukan bersifat modal awal bagi mereka yang baru ingin menjadi pelaku UMKM
- c. Bantuan diberikan kepada para pelaku UMKM yang memiliki alamat yang jelas, agar memudahkan proses verifikasi bagi petugas dan proses monitoring kedepannya.
- d. Bantuan diutamakan bagi usaha mikro dan kecil terlebih dahulu, karena mereka rentan bangkrut
- e. Proses verifikasi calon penerima bantuan harus dilaksanakan seketat mungkin, petugas dari dinas perindustrian dan koperasi Kota Tanjungpinang harus

- melakukan peninjauan langsung kelapangan/harus benar2 turun kelapangan
untuk melihat secara riil diapangan keadaan usaha calon penerima bantuan
- f. Proses seleksi harus melibatkan aparat Pemerintah yang paling kecil yaitu ketua RT dan RW
- g. Pemerintah daerah harus membentuk tenaga pendamping bagi UMKM, melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap pemberian bantuan agar UMKM di Kota Tanjungpinang tetap berkembang.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2005). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah*. Makasar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Adiningsih, S. (2005). *Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Dunn, W. N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke Dua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Irawan, P. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kish. (1999). *Sampling Techniques*. New York: Wiley.
- Lenora, B. (2008). *Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) " Garda Emas" (Studi Kasus UMKM Penghasil Sandal Di Kecamatan Bogor Selatan)*. Bogor: Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Fakultas Pertanian IPB Skripsi.
- Nugraha, M. Q. (2011). *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pastaliza, F. (2012). *Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Solok*. Padang: Program Magister Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- Prasetyo, E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY* , Volume 2 Universitas PGRI Yogyakarta.

- Rangkuti, & Freddy. (2009). *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Samuelson, Paul, A., & Nordhaus, W. D. (1985). *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sentot, G. H. (2001). Pembinaan Dan Pembangunan Usaha Kecil. *Management & Kewirausahaan*, No.1 Vol.3 FE UKP Surabaya.
- Siegel, S. (1992). *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, M. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno, N. (n.d.). www.smeccda.com/deputi7/...../Lembaga_Keuangan_Mikro.pdf. Energi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (diakses 6 juli 2010)
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukesi. (2012). *Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Identifikasi Evaluasi Permasalahan, Kebutuhan, Potensi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Malang*. Surabaya: Universitas DR.Soetomo.
- Sumodiningrat, G. (1998). *Meribangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Bekerjasama dengan IDEA.
- Supranto, J. (2006). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supranto, J. (2002). *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Suwitri, S. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/99 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Tangkilisan, & Nogis, H. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik (Penjelasan, Analisis dan Transformasi)*. Yogyakarta: Pikiran Nagel Balairung & Co.
- Undang - Undang Nomor 1 tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang - Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil Industri.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Walpole. (2006). *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Wasistiono, S. (2005). Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance. In H. Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Bandung: IPDN.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiryo, W. (2005). *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar System Keuangan Nasional*. Indonesia:Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus.

UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA PENELITI

Nama : HERMAWAN,SE

NIM : 017106028

Tempat dan Tgl.Lahir : Pekanbaru, 03 April 1975

Jenis Kelamin : Laki – laki

Anggota Keluarga :

- Istri : Julriana

- Anak : Haliza Fitri

Muhammad Raihan

Herni Febriana

Telp/HP : 0771-23283/082173490068

Alamat Email : Hermawaning@yahoo.com

Pengalaman Pendidikan :

1. Tamatan SDN 009 Pekanbaru Tahun 1988
2. Tamatan SMPN 6 Tanjungpinang Tahun 1991
3. Tamatan SMAN 2 Tanjungpinang Tahun 1994
4. Tamatan UMA Medan Tahun 1999
5. Masuk Program S2 MAP UT Tahun 2012

Pengalaman Pekerjaan :

1. Jasa kontraktor Tanjungpinang Tahun 2000
2. CPNS Staf Bappeda Tanjungpinang Tahun 2003
3. PNS Staf Bappeda Tanjungpinang Tahun 2005
4. Kasubid Perindagkop dan Dunia Usaha Bappeda Tanjungpinang Tahun 2008
5. Kasubid Investasi dan Promosi Bappeda dan PM Tanjungpinang Tahun 2009
6. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Tanjungpinang Tahun 2013-sekarang

Prestasi atau Penghargaan
Yang pernah diraih : -

Tanjungpinang, November 2013

Hermawan.SE
NIM.017106028

EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG UMKM

1. Menurut Bapak/ibu, apakah pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap pembangunan UMKM
 - a. sangat peduli
 - b. Peduli
 - c. Kurang peduli
2. Mohon dijelaskan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM

3. Mohon dijelaskan bentuk ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM

4. Apakah Bapak/Ibu, puas dengan salah satu program pemerintah dalam bidang UMKM yaitu pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
 - a. Sangat Puas karena.....
 - b. Kurang Puas karena.....
 - c. Tidak dapat memberikan penilaian, karena.....
5. Menurut Bapak/Ibu hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam bidang UMKM khususnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, jelaskan

6. Menurut Bapak/Ibu, dampak apa saja yang dapat dirasakan pengusaha UMKM yang pernah mendapatkan program pemerintah dalam bidang UMKM yaitu program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, jelaskan

7. Menurut Bapak/ibu, Jenis kebijakan/Program apa saja yang sekiranya perlu dilakukan selain program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, jelaskan.....

NO. KUESIONER		

BAGIAN I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama responden:
2. Pendidikan Ketua/Pemilik:.....
3. Tahun Berdiri:
4. Jenis Usaha :
5. Status perusahaan
 - a. Mikro
 - b. Kecil
 - c. Menengah
 - d. Besar
6. Sumber Modal:
 - a. Milik sendiri (termasuk hibah/transfer) :.....%
 - b. Pihak lain :.....% sebutkan.....
7. Omzet Perusahaan/Bulan Rp.....
8. Keuntungan Perusahaan/Bulan Rp.....
9. Jumlah Tenaga Kerja:
 - a. Tidak/belum sekolah Orang
 - b. SD/Sederajat Orang
 - c. SLTP/Sederajat Orang
 - d. SLTA/ sederajat Orang
 - e. DI/DII/DIII Orang
 - f. DIV/S1 Orang
 - g. S2/S3 Orang
10. jarak ke tempat penjualan(km)
11. lama usaha (tahun)
12. sumber modal
 - a. sumbernya bukan modal sendiri
 - b. sumbernya modal sendiri
13. Pengalaman ikut pelatihan:..... Kali
14. Modal awal waktu mulai usaha : Rp.....

A. SOSIALISAI DUKUNGAN USAHA

1. Selama saudara Berusaha, apakah pernah ada penjelasan dari Pemerintah daerah tentang dukungan pemodalannya?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
2. Apakah usaha saudara pernah mendengar program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah usaha saudara pernah mendapatkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
 - a. Ya
 - b. Tidak,
alasan.....
.....
.....
4. Apabila pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah, apa bentuknya?
Jawab:.....
.....

JIKA jawaban No 3 : "iya"

5. Berapa kali usaha saudara mendapatkan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.....kali
6. Jenis program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang pernah di peroleh: (Lingkari apa yang sudah pernah diperoleh):
 - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, besarnya yang diperoleh:.....
 - b. Pengadaan gerobak jualan bagi UKM
 - c. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM
 - d. Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang
 - e. Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang
 - f. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
 - g. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UMKM
7. Jika mendapatkan permodalan usaha, bantuan uang tersebut telah bapak/ibu gunakan untuk:
 - a. Membuka usaha baru, karena.....
 - b. Mengembangkan usaha yang telah ada, karena.....
 - c. Digunakan untuk membeli kendaraan operasional/peralatan, karena.....
 - d. Lainnya,.....

8. Berikan Penilaian bapak/ibu Terhadap Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan berikut ini:

Uraian	Tingkat Pengalaman					Tingkat Kepentingan				
	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
1. Proses Seleksi/persyaratan administrasi										
2. Manfaat Seleksi										
3. Efektivitas Proses Pencairan Dana										
4. Efektivitas Proses Pendampingan										
5. Efektivitas Penyaluran Dana Oleh Dinas yang ditunjuk										
6. Perguliran dana ke pihak lainnya										
7. Efektivitas Tenaga Pendamping										
8. Proses Pelaporan, Monitoring Dan										
9. Penyaluran Tepat Waktu										
10. Penyaluran Tepat Jumlah										
11. Penyaluran Tepat Sebaran										
12. Penyaluran Sesuai mekanisme										
13. Birokrasi pemerintahan										

Keterangan

Tingkat Pengalaman

1. Sangat tidak memuaskan
2. Tidak memuaskan
3. Cukup memuaskan
4. Memuaskan
5. Sangat memuaskan

Tingkat Kepentingan

1. Sangat Tidak Penting
2. Tidak Penting
3. Cukup Penting
4. Penting
5. Sangat Penting

9. Mohon dijelaskan kegiatan usaha bapak/ibu sebelum dan sesudah menerima bantuan program.....

- a) Mengalami kemunduran usaha
- b) Ada peningkatan sedikit
- c) Mengalami kemunduran usaha

10. Perubahan yang terjadi:

Aspek	Kinerja Usaha sebelum/sesudah menerima program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	
	Sebelum	Setelah
1. Omzet per bulan	Rp.	Rp.
2. Keuntungan Per bulan		
3. Jumlah Modal usaha		
4. Jumlah Tenaga Kerja		

11. Bila usaha mengalami kemunduran, apa penyebabnya?

Jawab:.....

12. Dari manakah Bapak/Ibu memperoleh informasi adanya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah bagi UMKM pada saat ini
- Staf Intansi Pemerintah
 - Media Masa
 - Bentuk/pihak lainnya, mohon dosebutkan
 - Belum pernah tahu

13. Apakah proses seleksi UMKM penerima program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah telah dilakukan secara adil (transparan dan akuntabel)
- Sangat adil dan sesuai pedoman pelaksanaan
 - adil
 - cukup adil
 - Tidak adil, karena,
 - Sangat Tidak adil, karena

14. Berikan saran-saran supaya seleksi penerima program bantuan kedepan lebih baik.

Jawab:.....

15. Apakah UMKM saudara mengalami kesulitan dalam proses pengajuan persyaratan administrasi, penarikan dan pencairan dana, pengembalian dalam bentuk angsuran atau perguliran kembali dana yang bersangkutan?mohon dijelaskan bentuk kesulitannya (jika ada) dan usulan perbaikannya

Aspek	Bentuk kesulitan yang dihadapi	Usulan Perbaikan
1.Persyaratan Administrasi		
2.Penarikan dan pencairan dana		
3.Pengembalian kepada Bank		
4. Perguliran Ke UMKM lainnya		
5.Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi		
6.Birokrasi pemerintahan		
7. Biaya Tambahan Pengurusan		

Jika Jawaban No 2 : "Tidak"

5. Jika tidak pernah memperoleh bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah bagi UMKM, alasan utamanya adalah:
- Tidak tahu Prosedur
 - Proposal ditolak
 - Tidak berminat
 - Tidak Tahu
 - lainnya, (sebutkan.....)
6. Apakah Pernah mendapatkan bantuan UMKM dalam bentuk lainnya
- Ya, Sebutkan
 - Tidak
7. Penilaian bapak/ibu Terhadap Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Pada Masing-Masing Pola Perkuatan

	Tingkat Pengalaman					Tingkat Kepentingan				
	5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
1. Proses Seleksi/persyaratan administrasi										
2. Manfaat Seleksi										
3. Efektivitas Proses Pencairan Dana										
4. Efektivitas Proses Pendampingan										
5. Efektivitas Penyaluran Dana Oleh Bank Pelaksana										
6. Pengembalian kepada Bank										
7. Penguliran dana ke pihak lainnya										
8. Efektivitas Tenaga Pendamping										
9. Proses Pelaporan, Monitoring Dan										
10. Penyaluran Tepat Waktu										
11. Penyaluran Tepat Jumlah										
12. Penyaluran Tepat Sebaran										
13. Penyaluran Sesuai mekanisme										
14. Birokrasi pemerintahan										

Keterangan

Tingkat Pengalaman

- Sangat tidak memuaskan
- Tidak memuaskan
- Cukup memuaskan
- Memuaskan
- Sangat memuaskan

Tingkat Kepentingan

- Sangat Tidak Penting
- Tidak Penting
- Cukup Penting
- Penting
- Sangat Penting

8. Apakah proses seleksi UMKM penerima program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah telah dilakukan secara fair (transparan dan akuntabel)
- Sangat fair dan sesuai pedoman pelaksanaan
 - fair
 - cukup air

- d. Tidak fair, karena, mohon sarannya.....
- e. Sangat Tidak fair, karena, mohon sarannya.....

9. Apakah UMKM saudara mengalami kesulitan dalam proses pengajuan persyaratan administrasi, penarikan dan pencairan dana, pengembalian dalam bentuk angsuran atau perguliran kembali dana yang bersangkutan?mohon dijelaskan bentuk kesulitannya (jika ada) dan usulan perbaikannya

Aspek	Bentuk kesulitan yang dihadapi	Usulan Perbaikan
1.Persyaratan Administrasi		
2.Penarikan dan pencairan dana		
3.Pengembalian kepada Bank		
4. Perguliran Ke UMKM lainnya		
5.Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi		
6.Birokrasi pemerintahan		
7. Biaya Tambahan Pengurusan		

10. Mohon dijelaskan kegiatan usaha bapak/ibu

Aspek	Kinerja Usaha
1. Omzet per bulan	
2. Keuntungan Per bulan	
3. Jumlah Modal usaha	
4. Jumlah Tenaga Kerja	

11. Jelaskan apa yang mempengaruhi naik turunnya omset/keuntungan:

Jawab:.....

.....

.....

BAGIAN III

UNTUK SEMUA PERUSAHAAN

1. Menurut Bapak/ibu, apa bentuk kebijakan atau program pembangunan usaha mikro dan kecil yang harus dilakukan oleh pemerintah pada masa mendatang?

.....

2. Menurut Bapak/ibu, apakah pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap pembangunan UMKM?

- a. Sangat Peduli
- b. Peduli, sebatas bagian dari upaya membangun citra politik yang pro rakyat
- c. Cukup Peduli
- d. Kurang peduli
- e. Sangat Kurang peduli

3. Mohon dijelaskan contoh kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM

.....

4. Bentuk kepedulian apa yang saudara harapkan dari pemerintah daerah

.....

5. Mohon dijelaskan contoh kurang pedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM

.....

6. Mohon dijelaskan menurut bapak/ibu instansi pemerintah daerah yang bapak ibu nilai memiliki kebijakan atau program yang mendukung upaya pembangunan UMKM (Jika ada)

Nama Dinas/Intansi/lembaga	Bentuk Kebijakan/program pemberdayaan UMKM
1.	
2.	
3.	
4.	

7. Mohon dijelaskan menurut pendapat bapak/ibu instansi pemerintah daerah yang bapak ibu nilai memiliki kebijakan atau program yang kurang mendukung upaya pembangunan UMKM

Nama Dinas/Intansi/lembaga	Bentuk Kebijakan/program yang menghambat pemberdayaan UMKM
1.	
2.	
3.	
4.	

8. Apakah ada program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bapak/ibu nilai sangat efektif untuk meberdayakan UMKM sehingga perlu dijadikan program berkelanjutan
- a. Ada, contohnya;, karena.....
 - b. Tidak ada, karena.....
 - c. Tidak tahu, karena.....

UNIVERSITAS TERBUKA